



**KEPUTUSAN BRASIL MENERIMA PENGUNGSI SURIAH  
(*BRAZIL'S DECISION IN ACCEPTING SYRIAN REFUGEES*)**

**SKRIPSI**

oleh

**PUTRI LARASATI FATWATUR RAHMI  
NIM 110910101041**

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**KEPUTUSAN BRASIL MENERIMA PENGUNGSI SURIAH  
(*BRAZIL'S DECISION IN ACCEPTING SYRIAN REFUGEES*)**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

**PUTRI LARASATI FATWATUR RAHMI**

**NIM 110910101041**

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sriyatun dan Ayahanda Hari Purnomo yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Nenek Paijem yang telah memberi dukungan, doa, dan kasih sayang yang tiada tara;
3. Adik-adik, Nico, Agung, dan Ori;
4. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Hubungan Internasional Jember.

**MOTTO**

*If pain must come, may it come quickly. Because I have a life to live, and I need to live it in the best way possible\**



---

\* Paulo Coelho. 2012. *By the River Piedra I Sat Down and Wept*. New York: HarperCollins e-book.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Larasati Fatwatur Rahmi

NIM : 110910101041

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Keputusan Brasil Menerima Pengungsi Suriah” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabhasahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Juli 2015

Yang menyatakan

Putri Larasati Fatwatur Rahmi

NIM 110910101041

**SKRIPSI**

**KEPUTUSAN BRASIL MENERIMA PENGUNGI SURIAH**

Oleh

**PUTRI LARASATI FATWATUR RAHMI**

**NIM 110910101041**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si., Ph. D

Dosen Pembimbing Anggota : Fuat Albayumi, SIP. M.A.

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Keputusan Brasil Menerima Pengungsi Suriah” telah diuji dan disahkan pada:

hari : Senin  
tanggal : 28 September 2015  
waktu : 09.00  
tempat : FISIP Universitas Jember

Tim Penguji  
Ketua

Drs. Agung Purwanto, M.Si  
196810221993031002

Anggota I

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si., Ph. D.  
NIP. 196802291998031001

Anggota II

Fuat Albayumi, SIP. M.A.  
NIP. 197404242005011002

Anggota I

Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si  
196105151988021001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA  
NIP. 195207271981031003

## RINGKASAN

**Keputusan Brasill Menerima Pengungsi Suriah;** Putri Larasati Fatwatur Rahmi, 110910101041; 2015: 110 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Menurut pengertian dari UNHCR pengungsi merupakan seseorang yang meninggalkan negaranya karena terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pihak-pihak dari negara asal mereka. Konflik sipil antara pemerintah dan etnis Sunni Suriah telah menyebabkan sebagian masyarakatnya untuk mencari perlindungan ke negara lain. Mayoritas dari mereka menuju Yordania, Iran, Irak, Turki, dan Mesir yang berbatasan langsung dengan wilayah Suriah. Jumlah pengungsi yang semakin bertambah menyebabkan terjadinya krisis pengungsi yang parah. Setelah mereka negara yang seharusnya memberikan perlindungan bagi mereka, para pengungsi masih harus berjuang di negara tujuan mereka.

Brasil adalah salah satu negara di luar Timur Tengah yang bersedia untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi Suriah yang berusaha mencari suaka. Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas untuk mempermudah pengungsi masuk ke wilayah Brasil dan berusaha membantu mereka untuk beradaptasi di Brasil, meskipun banyak opini yang mengatakan bahwa kedatangan pengungsi dapat mengganggu kestabilan sosial, ekonomi, dan politik negara.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang mendorong Brasil untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi Suriah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi pustaka (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode berpikir deduktif dimana konsep dan teori ditentukan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan konsep *human security*, pengungsi, *responsibility to protect*, dan diaspora.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama Brasil dalam memberikan perlindungan untuk pengungsi Suriah adalah dedikasi Brasil terhadap kemanusiaan. Brasil memiliki dedikasi yang tinggi terhadap kemanusiaan yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri, meningkatnya bantuan yang diberikan kepada luar negeri, peningkatan penerimaan pengungsi, ratifikasi Konvensi UNHCR 1951 dan Protokol 1967. Brasil mendirikan organisasi BRICS yang berdasarkan nilai demokrasi dan multilateralisme bersama Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Selain itu, Brasil memiliki hubungan sejarah dengan masyarakat keturunan Suriah yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian Brasil melalui usaha tekstil. Meskipun demikian, hal tersebut tidak bersifat signifikan karena jika berdasarkan kalkulasi secara ekonomi, kerugian Brasil akibat menerima pengungsi lebih besar daripada keuntungannya.

## PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “KEPUTUSAN BRASIL MENERIMA PENGUNGSISURIAH”. Dalam tulisan ini, penulis berusaha untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong Brasil untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi yang berasal dari Suriah.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sepenuhnya penulis dapat bekerja sendiri. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, nasehat, bantuan dan pelayanan yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si., Ph. D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
3. Ibu Dra. Sri Yuniati, M. Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
4. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si., Ph. D, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan segala kesabarannya telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, pengarahan, nasehat dan juga kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Fuat Albayumi, SIP. M.A, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan segala kesabarannya telah memberikan banyak ilmu, bimbingan,

pengarahan, nasehat dan juga kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Drs. Agung Purwanto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis secara akademik selama menuntut ilmu di jurusan Hubungan Internasional Universitas Jember;
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan segala ilmu dan pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama belajar di jurusan ini;
8. Pimpinan dan staf perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
9. Teman-teman dekat penulis, Deta Malatasya, Siti Rozalia dan seluruh mahasiswa HI angkatan 2011;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

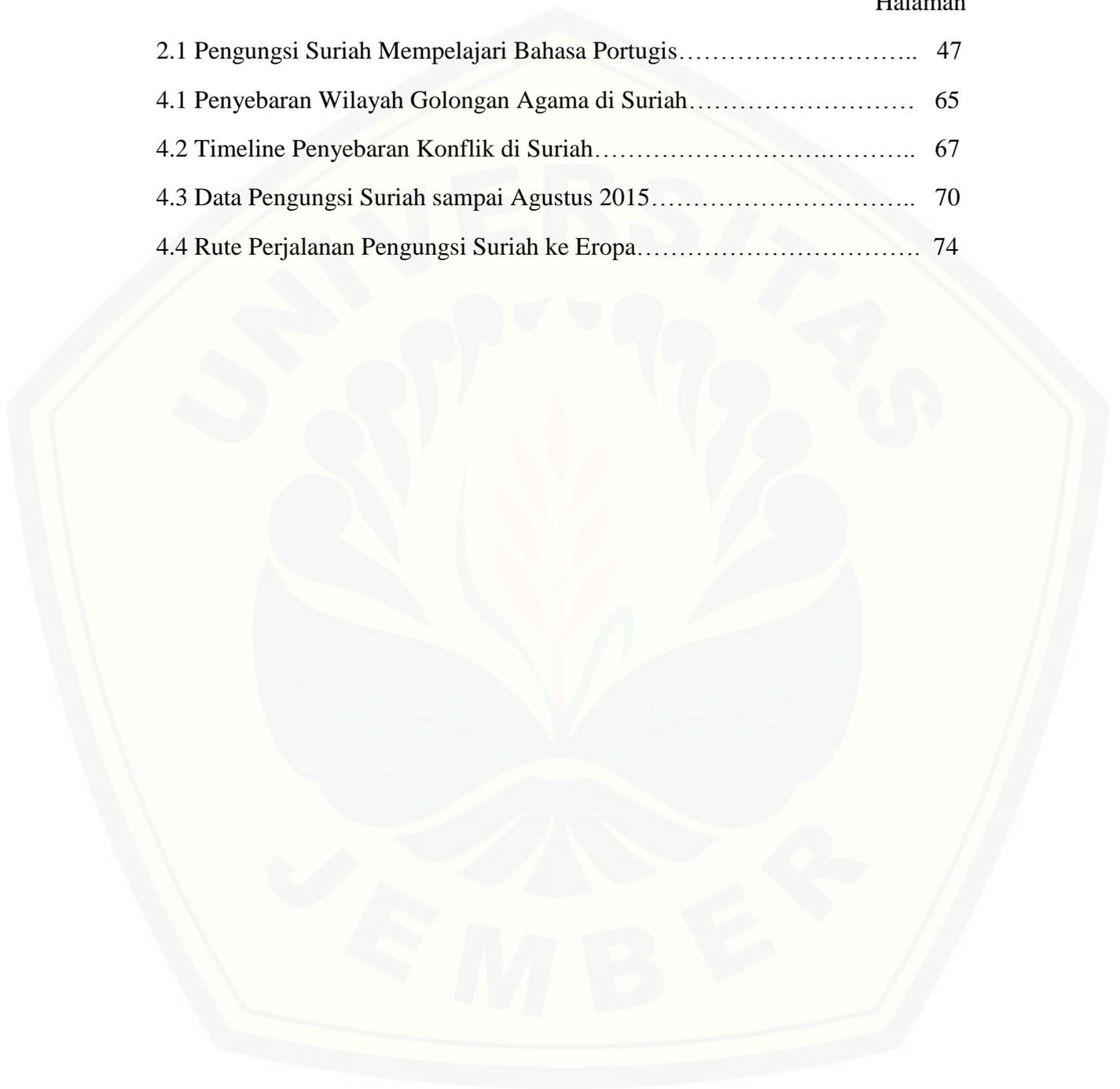
Penulis sadar tanpa dukungan dari banyak pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi kemajuan penulis sendiri dan bagi semua pihak yang berkenan membacanya.

Jember, 2015

Penulis

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Pengungsi Suriah Mempelajari Bahasa Portugis.....	47
4.1 Penyebaran Wilayah Golongan Agama di Suriah.....	65
4.2 Timeline Penyebaran Konflik di Suriah.....	67
4.3 Data Pengungsi Suriah sampai Agustus 2015.....	70
4.4 Rute Perjalanan Pengungsi Suriah ke Eropa.....	74



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Ruang Lingkup Pembahasan .....</b>	<b>9</b>
1.2.1. Batasan Materi .....	9
1.2.2. Batasan Waktu .....	9
<b>1.3. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>1.4. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>1.5. Landasan Pemikiran.....</b>	<b>10</b>
1.5.1. <i>Human Security</i> .....	11
1.5.2. <i>Pengungsi (Refugee)</i> .....	15
1.5.3. <i>Responsibility to Protect</i> .....	17
1.5.4. <i>Diaspora</i> .....	20
<b>1.6. Argumen Utama .....</b>	<b>22</b>

1.7. Metode Penelitian.....	23
1.7.1. Teknik Pengumpulan Data .....	23
1.7.2. Teknik Analisa Data .....	24
1.8. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB 2. PENERAPAN <i>HUMAN SECURITY</i> DI BRASIL .....</b>	<b>26</b>
2.1. <i>Human Security</i> Menurut Brasil.....	26
2.2. <i>Responsibility While Protecting</i> .....	33
2.3. Kebijakan Pemerintah Brasil dalam Mengatur Pengungsi .....	36
2.4. <i>Resettlement</i> Pengungsi Suriah di Brasil .....	45
<b>BAB 3. HUBUNGAN BRASIL DENGAN SURIAH .....</b>	<b>48</b>
3.1. Kedatangan Penduduk Suriah ke Brasil .....	48
3.2. Hubungan Politik Brasil dengan Suriah .....	54
3.3. Hubungan Ekonomi Brasil dengan Suriah.....	60
<b>BAB 4. FAKTOR YANG MENDORONG BRASIL UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PENGUNGI SURIAH .....</b>	<b>64</b>
4.1. Permasalahan Keamanan Manusia Pengungsi Suriah dan Dedikasi Brasil terhadap Keamanan Manusia .....	64
4.1.1. <i>Komitmen terhadap Konvensi UNHCR 1951 dan                 Protokol 1967</i> .....	80
4.2. Solidaritas Brasil dengan Komunitas Negara Anggota BRICS .....	84
4.3. Peran Penting Penduduk Keturunan Suriah terhadap Perekonomian Brasil.....	93
<b>BAB 5. KESIMPULAN.....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR SINGKATAN**

ASAV	: <i>Antônio Vieira Association</i>
BNDES	: <i>O Banco Nacional Do Desenvolvimento</i>
BRICS	: <i>Brazil, Russia, India, China, South Africa</i>
CAM	: <i>Cáritas Arquidiocesana of Manaus</i>
CARJ	: <i>Cáritas Arquidiocesana of Rio de Janeiro</i>
CASP	: <i>Cáritas Arquidiocesana of São Paulo</i>
CCAB	: <i>Câmara de Comércio Árabe Brasileira</i>
CDDH	: <i>Center for the Defense of Human Rights in Guarulhos</i>
CNIg	: <i>Conselho Nacional de Imigração</i>
CONARE	: <i>Comitê Nacional para os Refugiados</i>
CPF	: <i>Cadastro de Pessoa Física</i>
CV	: <i>Curriculum Vitae</i>
DAC	: <i>Development Assistance Committee</i>
DARF	: <i>Darul Islamic Relief Fund</i>
DK	: <i>Dewan Keamanan</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organizations</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
IAEA	: <i>International Atomic Energy Agency</i>
IBSA	: <i>India, Brazil, South Africa</i>
ICISS	: <i>International Commission on Intervention and State Sovereignty</i>
IDB	: <i>Inter-American Development Bank</i>
IDP	: <i>Internally Displaced People</i>
IRO	: <i>International Refugees Organization</i>
ISIS	: <i>Islamic State in Iraq and Syria</i>
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
MHRI	: <i>Migration and Human Rights Institute</i>



MERCOSUR	: <i>Mercado Común del Sur</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
OAS	: <i>Organization of American States</i>
OECD	: <i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-bangsa</i>
RNE	: <i>Registro Nacional de Estrangeiro</i>
SDA	: <i>Sumber Daya Alam</i>
SPBU	: <i>Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum</i>
UNASUR	: <i>Unión de Naciones Suramericanas</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugee</i>
UNICEF	: <i>United Nation Children's Fund</i>
UNOSSC	: <i>United Nations Office for South-South Cooperation</i>
WFP	: <i>World Food Programme</i>
WNA	: <i>Warga Negara Asing</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terdapat berbagai definisi mengenai pengungsi yang masing-masing diatur oleh pihak dengan berbagai identitas dan kepentingan. Definisi secara umum adalah seseorang yang terpaksa keluar dari negara asalnya disebabkan oleh adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup> Salah satu pengertiannya diatur oleh hukum internasional, yaitu *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR) yang merupakan badan *sub-ordinate* dari Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) yang resmi menangani mengenai masalah yang berkaitan dengan pengungsi. Berdasarkan Konvensi UNHCR 1951 Mengenai Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*), pengertian dari pengungsi adalah orang yang tidak dapat atau tidak ingin untuk kembali ke negara asal mereka karena kekhawatiran yang disebabkan oleh masalah perbedaan ras, agama, nasionalitas, keanggotaan akan kelompok sosial tertentu, atau opini politik.<sup>3</sup>

Seseorang dapat dikategorikan sebagai pengungsi ketika mereka pindah melewati batas wilayah negara karena negara tempat asal mereka sudah tidak dapat menjamin keamanan mereka, oleh karena itu mereka mencari perlindungan ke negara lain.<sup>4</sup> Penting untuk diketahui terdapat situasi lain yang memosisikan seseorang serupa dengan pengungsi, tetapi mereka bukanlah pengungsi. Situasi tersebut misalnya, seseorang yang karena perang melakukan perpindahan dari daerah konflik ke tempat aman yang masih ada pada lingkup dalam negeri.

---

<sup>2</sup>Miriam Potocky-Tripodi. 2002. *Best Practice For Social Work with Refugees and Immigrants*. New York: Columbia University Press. hal. 4

<sup>3</sup>UNHCR. 2011. *Convention and Protocol Relating to The Status of Refugees*. <http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html> [20 Nopember 2014]

<sup>4</sup>Miriam Potocky-Tripodi. *Op. Cit.* hal. 7

Mereka tidak dapat disebut pengungsi karena mereka hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah negara yang sama. Seseorang yang masuk dalam kategori ini disebut sebagai *Internally Displaced People* (IDP).<sup>5</sup>

Situasi lainnya yang menyerupai pengungsi adalah ketika seseorang melakukan perpindahan dari satu negara ke negara yang lain dengan penyebab bencana alam, seperti banjir dan kekeringan. Bencana alam tidak disebutkan dalam Konvensi UNHCR 1951 sebagai faktor yang mempengaruhi seseorang untuk meninggalkan negara asalnya. Mereka yang meninggalkan negara asalnya dengan sebab bencana alam dengan demikian tidak dapat disebut sebagai pengungsi karena mereka tidak mengalami penganiayaan oleh orang lain.<sup>6</sup>

Sampai akhir tahun 2013, UNHCR mencatat terdapat 51,2 juta orang yang hidup sebagai pengungsi dan IDP tersebar di seluruh dunia. Jumlah tersebut meningkat sebanyak enam juta orang dari tahun 2012 yang berjumlah 45,2 juta orang. Peningkatan jumlah tersebut disebabkan oleh terjadinya perang sipil di Suriah yang dimulai pada tahun 2011. Sejak tahun 2011 sampai akhir tahun 2013 sebanyak 2,5 juta rakyat Suriah pergi meninggalkan negara asal mereka dan 6,5 juta orang tercatat sebagai IDP.<sup>7</sup>

Konflik di Suriah terjadi karena pemimpin Suriah, Presiden Bashar al-Assad, gagal melakukan reformasi di bidang politik dan ekonomi. Reformasi di Suriah tidak membawa kesejahteraan untuk rakyat sipil. Selain itu kebijakan yang dilakukan Presiden Bashar tidak dapat mempertahankan stabilitas masyarakat Suriah yang multigolongan. Terdapat beberapa golongan yang mendiami wilayah Suriah, yaitu Sunni yang menjadi golongan mayoritas, Kurdi, Kristen, *Druze*,

---

<sup>5</sup> Sharon Stanton Russell. 2002. *Refugees: Risks and Challenges Worldwide*. <http://www.migrationpolicy.org/article/refugees-risks-and-challenges-worldwide> [16 Desember 2014]

<sup>6</sup> Miriam Potocky-Tripodi. *Loc. Cit.*

<sup>7</sup> Harriet Sherwood. 2014. *Global Refugee Figure Passes 50m for First Time Since Second World War*. [www.theguardian.com/world/2014/jun/20/global-refugee-figure-passes-50-million-unhcr-report](http://www.theguardian.com/world/2014/jun/20/global-refugee-figure-passes-50-million-unhcr-report) [3 Desember 2014]

*Ismaeli*, dan Syiah.<sup>8</sup> Presiden Bashar sendiri termasuk dalam golongan Alawite yang ada dalam golongan Syiah. Golongan Sunni hidup di pedesaan dan bekerja sebagai petani, sedangkan golongan yang lain, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Bashar hidup di daerah industri sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang lebih baik. Pada akhirnya rakyat golongan Sunni merasakan adanya kesenjangan antara mereka dengan penduduk golongan lainnya.<sup>9</sup>

Konflik di Suriah semakin parah sejak munculnya *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS) yang terbentuk pada April 2013. Mereka merupakan kelompok Islam radikal yang berusaha mendirikan negara Islam di wilayah yang ditinggali golongan Sunni di Irak dan Suriah. Tidak hanya berselisih dengan pemerintah, kelompok ISIS juga berselisih dengan kelompok golongan di Suriah.<sup>10</sup> Pada Mei 2014, ISIS menculik lebih dari 140 remaja golongan Kurdi untuk didoktrin mengenai teologi yang telah dirancang ISIS. Selanjutnya pada bulan Juni, ISIS mengambil alih beberapa wilayah Irak yang berbatasan dengan Suriah, yaitu Mosul, Tikrit, dan Al-Qaim.<sup>11</sup>

Konflik ini telah menimbulkan banyak kerugian, baik secara materi dan nyawa. Menurut catatan PBB sampai bulan Agustus 2014, jumlah korban meninggal sebanyak 191.000 jiwa. Selain itu rakyat Suriah harus meninggalkan negara mereka untuk menyelamatkan diri. Mereka mencari perlindungan di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Suriah, yaitu: Lebanon, Yordania, Mesir, dan Turki. Sebagian kecil dari mereka ada yang mencari

<sup>8</sup> Joseph Holliday. 2011. *The Struggle for Syria in 2011. Middle East Security Report 2*. Washington DC: Institute for The Study of War hal. 8

<sup>9</sup> Christopher Phillips. 2012. *Syria's Bloody Arab Spring*. Hal. 37 [http://www.lse.ac.uk/ideas/publications/reports/pdf/sr011/final\\_lse\\_ideas\\_syriasbloodyarabspiring\\_phillips.pdf](http://www.lse.ac.uk/ideas/publications/reports/pdf/sr011/final_lse_ideas_syriasbloodyarabspiring_phillips.pdf) [20 Oktober 2014]

<sup>10</sup> United Nations. 2014. *Rule of Terror: Living Under ISIS in Syria*. [http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/HRC\\_CRP\\_ISIS\\_14Nov2014.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/HRC_CRP_ISIS_14Nov2014.pdf) [16 November 2014]

<sup>11</sup> CNN Library. 2014. *ISIS Fast Facts*. [www.cnn.com/2014/08/08/world/isis-fast-facts/](http://www.cnn.com/2014/08/08/world/isis-fast-facts/) [20 Nopember 2014]

perlindungan ke tempat yang lebih jauh, seperti Amerika Serikat, Uruguay, Eropa, Venezuela, dan Brasil.<sup>12</sup>

Para pengungsi yang berhasil meninggalkan Suriah tetap menemui permasalahan di negara baru tempat mereka mencari perlindungan. Mereka kehilangan pekerjaan, rumah, dukungan sosial dari komunitas, dan akses publik, seperti kesehatan dan pendidikan setelah meninggalkan Suriah. Banyak dari para pengungsi yang memiliki masalah trauma psikologi yang disebabkan oleh kematian atau perpisahan dengan anggota keluarga. Mereka juga kesulitan dalam beradaptasi dengan tempat tinggal yang baru. Mereka akan mendapat perlakuan tidak ramah dari penduduk negara tempat mereka mencari perlindungan ketika mereka tinggal di sana terlalu lama dan gagal mengatasi masalah utama yang ada.<sup>13</sup>

Selain berbagai masalah yang dihadapi oleh para pengungsi itu sendiri, negara yang menjadi tujuan pengungsi untuk menyelamatkan diri juga menghadapi masalah ketika mereka memutuskan untuk menerima pengungsi. Kedatangan pengungsi dapat berdampak pada ranah sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik di negara tujuan (*host country*). Masalah akan menjadi semakin pelik ketika kedatangan pengungsi mempengaruhi keseimbangan jumlah penduduk negara tujuan. Pengungsi dan penduduk asli negara tujuan akan bersaing dalam bidang ekonomi, perolehan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur. Penduduk asli merasa bahwa pengungsi mengancam sumber penghidupan dan perkembangan mereka sehingga mereka mengucilkan pengungsi yang datang.<sup>14</sup>

Pengungsi akan bersaing dengan penduduk lokal dalam sumber daya yang langka, seperti lahan, air, perumahan, bahan pangan, dan pelayanan kesehatan.

---

<sup>12</sup>Fox News Latino. 2014. *Syria's refugees find a new home in Uruguay and throughout Latin America* <http://latino.foxnews.com/latino/news/2014/10/01/syria-refugees-find-new-home-in-uruguay-and-throughout-latin-america/> [20 Oktober 2014]

<sup>13</sup>Care Research. Tanpa Tahun. *Issues for Refugees and Asylum Seeker*. <http://www.caresearch.com.au/caresearch/tabid/2385/Default.aspx> [2 Desember 2014]

<sup>14</sup>*Ibid.*

Pada perkembangannya, kehadiran pengungsi akan mempengaruhi neraca pembayaran negara tujuan dan merusak *structural adjustment initiatives* yang diterapkan oleh pemerintah. Peningkatan permintaan akan kebutuhan pokok akan menyebabkan kenaikan harga barang di pasar yang merugikan warga, terutama warga miskin. Kehadiran pengungsi juga membuat masyarakat lokal merasa sumber penghasilan mereka terancam.

Pada awalnya masyarakat Lebanon bersedia untuk menerima pengungsi Suriah karena terdapat perasaan simpati ketika melihat kondisi para pengungsi yang mengalami berbagai kesulitan. Akan tetapi, ketika perang di Suriah semakin parah dan semakin banyak pengungsi yang mendatangi wilayah Lebanon, mulai terjadi ketegangan antara pengungsi Suriah dengan masyarakat Lebanon. Banyak masyarakat Lebanon yang kehilangan pekerjaan karena ada pengungsi Suriah yang bersedia dibayar lebih murah untuk pekerjaan yang sama.<sup>15</sup> Pemerintah Lebanon menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menampung pengungsi dari Suriah yang pada tahun 2014, jumlahnya sudah lebih dari satu juta penduduk, sedangkan penduduk Lebanon sendiri jumlahnya sebanyak empat juta orang.<sup>16</sup> Banyak anak-anak Suriah yang melanjutkan sekolah di Lebanon. Mereka tertinggal dalam pelajaran dan membutuhkan waktu untuk mengejar ketertinggalan mereka. Akan tetapi, para pelajar Lebanon justru merasa tidak dihiraukan dan tertinggal karena para guru lebih memberikan perhatian untuk anak-anak Suriah.<sup>17</sup>

Bagi pemerintah negara yang menampung pengungsi, kedatangan pengungsi ke negara mereka akan mempengaruhi keuangan negara. Negara tujuan harus menanggung biaya hidup para pengungsi selama mereka menempati kamp

---

<sup>15</sup>BBC. 2013. *Viewpoints: Impact of Syrian Refugees on Host Countries*. <http://m.bbc.com/news/world-23813975> [2 Desember 2014]

<sup>16</sup>Agence France-Presse. 2014. *Lebanon sharply limits Syrian refugee entry*. <http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/10/18/Lebanon-sharply-limits-Syrian-refugee-entry-.html> [16 Desember 2014]

<sup>17</sup>*Ibid.*

pengungsian. Ada beberapa komunitas internasional yang akan membantu negara dalam menutup biaya hidup pengungsi, akan tetapi jumlahnya kecil. Selama periode 2011 sampai 2014 pemerintah Turki harus mengeluarkan dana sebesar 4,5 milyar dolar untuk membantu pengungsi Suriah, sedangkan dana bantuan internasional yang mereka dapatkan hanya berkisar 200-250 juta dolar.

Perbedaan budaya antara pengungsi dengan masyarakat lokal dapat menjadi masalah mendasar dari segi sosial. Kedatangan pengungsi dalam jumlah besar ke dalam suatu wilayah dapat merusak keseimbangan golongan dalam populasi lokal dan menimbulkan konflik. Pada umumnya terdapat komplain dari penduduk lokal mengenai peningkatan kriminalitas, pencurian, dan prostitusi. Terdapat perbedaan budaya antara pengungsi dengan penduduk lokal yang menyebabkan konflik antara penduduk lokal dan pengungsi di Yordania. Hal ini tidak terjadi di semua tempat pengungsian, hanya di beberapa desa dan Kota Amman. Beberapa pria Suriah menggunakan celana pendek di daerah tersebut, namun pria Yordania tidak melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, penduduk lokal merasa tidak nyaman dengan kebiasaan para pengungsi. Selain itu, penduduk Yordania tidak terbiasa dengan adanya sepeda motor yang digunakan oleh para pengungsi, namun banyak pengungsi Suriah yang membawa dan menggunakan sepeda motor. Penduduk Yordania menganggap pengungsi Suriah tidak etis ketika mereka menaiki motor dan membonceng istri-istri mereka. Selain masalah ekonomi dan sosial, kedatangan pengungsi Suriah juga berkaitan dengan masalah lingkungan. Bagi penduduk Yordania, air merupakan barang yang sangat berharga karena wilayah Yordania banyak kekurangan air. Penduduk lokal beranggapan bahwa pengungsi Suriah tidak menghargai air seperti mereka karena

untuk kegiatan sehari-hari pengungsi Suriah menggunakan air dengan boros sehingga persediaan air menjadi semakin sedikit.<sup>18</sup>

Terlepas dari masalah yang berkaitan dengan pengungsi di atas, Brasil tetap bersedia untuk menampung pengungsi Suriah ke wilayah negara mereka. Brasil telah menerima pengungsi Suriah sejak tahun 2011, ketika konflik antara pemerintah dengan rakyat Suriah pertama kali terjadi. Jumlah pengungsi Suriah yang datang ke Brasil terus meningkat setiap tahun. Pada tahun pertama Brasil hanya menerima 17 orang pengungsi.<sup>19</sup> Sampai bulan Juli 2014, jumlahnya meningkat menjadi 1245 orang pengungsi.<sup>20</sup> Brasil merupakan negara yang sering menjadi negara tujuan bagi para pengungsi, meskipun lokasi Brasil jauh dari wilayah konflik. Hal ini merupakan wujud dedikasi Brasil terhadap keamanan manusia (*human security*).

Brasil membentuk Komite Nasional untuk Pengungsi (*Comitê Nacional para os Refugiados/CONARE*) yang merupakan badan yang bekerja untuk menentukan persyaratan pengungsi, mempromosikan kebijakan publik yang berkaitan dengan pengungsi, dan mengevaluasi kegiatan penempatan dan membuat aturan resmi mengenai kerangka kerja suaka pada tahun 1998. Pihak yang bergabung dalam badan ini adalah perwakilan dari Kementerian Keadilan, Hubungan Luar Negeri, Kesehatan dan Pendidikan, ditambah Departemen Kepolisian, dan *Caritas Arquidicesana*, sebuah organisasi non-pemerintah yang telah lama mengurus perlindungan dan pendampingan bagi pengungsi di Brasil. Sedangkan UNHCR hanya berperan sebagai pengawas jalannya seluruh proses kegiatan yang berkaitan dengan penempatan pengungsi.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Tim Redaksi. 2014. *Turkey Spends \$4.5 billion on Syrian Refugees*. <http://www.worldbulletin.net/turkey/147700/turkey-spends-45-billion-syrian-refugees-updated> [2 Desember 2014]

<sup>19</sup>Tim Redaksi. 2014. *Brasil Grants Refugee Status to 532 Syrian*. [www.worldbulletin.net/141652/Brasil-grants-refugee-status-to-532-syrians](http://www.worldbulletin.net/141652/Brasil-grants-refugee-status-to-532-syrians) [20 Nopember 2014]

<sup>20</sup>Fox News Latino. *Loc. Cit.*

<sup>21</sup>Maria Beatriz Nogueira dan Carla Christina Marques. 2008. *Forced Migration Review 30*. Brasil: Ten Years of Refugee Protection. Oxford: Forced Migration Review hal. 57-58

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, kebanyakan peneliti melihat suatu fenomena dari sudut pandang realisme. Dalam skripsi ini, analisis terhadap perilaku Brasil akan dilihat dari sudut pandang idealisme, bertolak belakang dengan mayoritas penelitian yang ada. Perspektif idealisme adalah perspektif yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan perdamaian dunia. Pengikut idealisme percaya dengan adanya *harmony of interest* yang memiliki pengertian bahwa setiap manusia, meskipun memiliki perbedaan ras, agama, dan bahasa yang sama, mereka memiliki visi yang sama mengenai keadilan dan dunia yang damai. Dalam dunia yang identik dengan realisme, masih ada negara yang berusaha menjaga perdamaian dengan tidak mengutamakan kepentingan sendiri.

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Ruang lingkup pembahasan akan mengarahkan analisis penelitian agar lebih fokus pada kajian yang dianalisis. Dalam ruang lingkup pembahasan ini dijelaskan mengenai batasan materi dan batasan waktu.

### **1.2.1 Batasan Materi**

Batasan materi diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan sebagai upaya membuat analisis penelitian dan menentukan hasilnya. Pembuatan batasan materi yang tidak tepat akan mengalihkan perhatian dari hasil yang diinginkan dan mengaburkan hal-hal yang akan diungkap.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulisan dimulai dari hubungan sejarah Suriah dengan Brasil, berlanjut mengenai pemahaman Brasil terhadap *human security* kemudian mengenai alasan yang dimiliki Brasil dalam pertimbangannya untuk menerima pengungsi Suriah.

---

<sup>22</sup>Audie Klotz dan Deepa Prakash. 2008. *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*. New York: Palgrave Macmillan. hal. 20

### 1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam penelitian ini dimulai dari kedatangan orang-orang Suriah ke Brasil pada tahun 2011 pada saat pengungsi Suriah pertama kalinya datang mencari perlindungan ke Brasil saat terjadi konflik sampai tahun 2015. Tahun 2015 merupakan puncak migrasi pengungsi Suriah mencoba menembus negara-negara Eropa dan mengakibatkan banyak ancaman terhadap keamanan manusia.

### 1.3 Rumusan Masalah

Masalah muncul ketika terdapat perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Perumusan masalah dibutuhkan untuk mencari fokus pembahasan. Rumusan masalah akan membantu penulis dalam melakukan analisis dan membuat argumen. Dalam skripsi ini, rumusan masalahnya adalah: **“Mengapa Pemerintah Brasil Memutuskan Untuk Memberi Perlindungan Terhadap Pengungsi Suriah?”**

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan.<sup>23</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu lebih jauh mengenai alasan yang membuat pemerintah Brasil merasa perlu untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi Suriah.

### 1.5 Landasan Pemikiran

Landasan pemikiran berisi alat analisis dalam penelitian ilmiah yang dapat berbentuk teori dan konsep. Fungsinya dalam penelitian adalah untuk menetapkan

---

<sup>23</sup>Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

apa yang akan dipikirkan dan apa yang akan dilihat.<sup>24</sup> Teori dan konsep merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan. Teori menyediakan cara intelektual bagi subyek dalam hubungan internasional. Teori membantu mengorientasikan pemikiran manusia dalam merespon berbagai fenomena yang terjadi di sekitar.<sup>25</sup> Sedangkan konsep memiliki pengertian sebagai dasar konstruksi linguistik yang digunakan untuk mengurutkan dan mengkategorikan realita. Sama seperti teori, konsep merupakan instrumen yang digunakan sebagai pegangan dalam upaya untuk menganalisis suatu fenomena.<sup>26</sup>

Untuk melakukan analisis secara komprehensif, tidak cukup jika hanya menggunakan satu konsep saja. Skripsi ini menggunakan tiga konsep yang saling berhubungan satu sama lain yaitu, *responsibility to protect*, pengungsi, dan *human security* yang difokuskan pada enam kategori, yaitu *personal security*, *food security*, *health security*, *economic security*, *community security*, dan *political security*.

### 1.5.1 Human Security

Akhir Perang Dingin dan adanya globalisasi menjadi titik awal lahirnya berbagai paradigma baru dalam Ilmu Hubungan Internasional. Salah satu konsep baru yang muncul pada masa ini adalah konsep *human security* yang diajukan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) dan mendapatkan respon yang baik dari Kanada dan Jepang dengan menjadikan konsep tersebut sebagai prinsip dalam kebijakan luar negeri. Konsep mengenai *human security* salah satunya dikeluarkan oleh UNDP yang menyebutkan terdapat tujuh kategori dalam *human security*, yaitu *economic security*, *food security*, *health security*, *enviromental security*, *personal security*, *community security*, dan *political*

<sup>24</sup>Audie Klotz dan Deepa Prakash. *Op. Cit.* hal. 15

<sup>25</sup>Scott Burchill dan Andrew Linklater. 1996. *Theories of International Relations*. London: Macmillan Press Ltd. hal. 15

<sup>26</sup>Johann Mouton. 1990. *The Methodology of the Social Sciences*. Pretoria: HSRC Publishers. Hal. 57

*security*. Dalam tulisan ini akan dijelaskan enam konsep *human security* yang sesuai dengan ancaman yang dirasakan oleh pengungsi Suriah, yaitu:

### *1. Food Security*

Keamanan pangan memiliki arti bahwa setiap manusia setiap saat harus memiliki akses, baik secara fisik dan ekonomi, terhadap pangan. Ketersediaan pangan menjadi kondisi yang penting untuk terjaminnya keberlangsungan hidup manusia. Tidak semua orang di dunia dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Hal ini dikarenakan distribusi pangan yang tidak merata. Di negara maju, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pangan dibandingkan dengan masyarakat negara miskin. Masyarakat negara maju secara ekonomi memiliki pendapatan yang tinggi sehingga mereka memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Sementara itu, di negara miskin masyarakatnya hanya mendapatkan upah yang rendah sehingga mereka tidak mampu mendapatkan akses pangan yang baik.

Para pengungsi dari Suriah, menghadapi kesulitan untuk mengakses pangan karena mereka tidak memiliki pekerjaan dan harta benda yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan makanan. Mereka hanya menggantungkan pemenuhan kebutuhan pangan dari para relawan. Hal ini hanya membantu untuk waktu singkat saja. Untuk mendapatkan jaminan *food security* dalam jangka panjang, mereka harus berada di lingkungan yang baik, stabil secara ekonomi, politik, dan sosial. Negara mereka saat ini tidak dapat menyediakan hal tersebut, oleh karena itu mereka meninggalkan Suriah.

### *2. Health Security*

Kesehatan menjadi faktor penting dalam keberlangsungan hidup seseorang. Ketika kesehatan terganggu, maka seseorang tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi para pengungsi Suriah tidak dapat mendukung mereka untuk mendapatkan keamanan di bidang kesehatan. Negara tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana kesehatan karena adanya konflik.

Kondisi mereka di pengungsian yang ada di perbatasan juga sangat buruk. Tidak tersedianya sanitasi yang baik membuat mereka menderita diare, campak, dan malnutrisi.

### 3. *Personal Security*

Terdapat beberapa ancaman bagi keamanan personal, yaitu:

- Ancaman dari negara (siksaan fisik)
- Ancaman dari negara lain (perang)
- Ancaman dari kelompok lain (ketegangan golongan)
- Ancaman dari individu terhadap individu lain (kriminalitas)
- Ancaman yang ditujukan pada wanita (pemeriksaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
- Ancaman yang ditujukan pada anak berdasarkan kelemahan dan ketergantungan mereka (penyiksaan anak)
- Ancaman terhadap diri sendiri (bunuh diri, penggunaan narkoba)

Dalam konflik yang terjadi di Suriah, penduduk sipil mendapat ancaman dari negara, kelompok lain, dan ancaman yang terjadi karena kondisi mereka yang lemah dan tergantung kepada orang lain. Banyak pengungsi anak-anak yang mengalami ancaman secara personal karena mereka terlibat dalam perburuan dan pernikahan.

### 4. *Community Security*

Kebanyakan orang mendapatkan keamanan dari keanggotaan mereka dalam sebuah kelompok, keluarga, komunitas, organisasi, atau kelompok golongan yang dapat menyediakan identitas kultural dan menegakkan aturan-aturan. Penduduk Suriah yang menjadi pengungsi tidak mendapatkan keamanan dari segi komunitas. Akibat konflik dengan pemerintah, banyak warga dari golongan Sunni yang dirugikan. ISIS juga mengancam mereka secara komunitas karena mereka menyerang rakyat Suriah dari golongan Sunni, Kurdi, dan Kristen.

Di tempat pengungsian mereka mengalami perselisihan dengan penduduk asli karena perbedaan kebudayaan dan persaingan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

#### *5. Economic Security*

Untuk mencapai keamanan ekonomi diperlukan penetapan pendapatan dasar yang jelas yang biasanya diperoleh melalui bekerja baik di sektor informal dan formal ataupun dari bantuan negara. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki pekerjaan tetap dan pemerintah yang mampu memberikan subsidi secara rutin. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang merasa tidak aman dalam bidang ekonomi, misalnya krisis ekonomi dan politik, konflik, dan bencana alam.

Pengungsi Suriah saat ini mengalami ancaman di bidang keamanan ekonomi karena adanya konflik. Pemerintah tidak dapat memberikan subsidi karena kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil. Di tempat pengungsian, mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru yang diakibatkan oleh perbedaan budaya, persaingan dengan masyarakat lokal, dan kemampuan karena tidak semua perusahaan membutuhkan kemampuan yang ditawarkan pengungsi.

#### *6. Political Security*

Salah satu aspek penting dalam *human security* adalah bahwa manusia harus mampu untuk hidup dalam masyarakat yang menghargai hak asasi dasar mereka. Keamanan secara politik memiliki pengertian bahwa rakyat rakyat harus bebas dari segala ancaman dan tekanan yang dilakukan oleh negara. Kebebasan tersebut dapat diperoleh ketika negara menganut sistem demokratis. Negara demokratis cenderung lebih mementingkan rakyat, berbeda dengan negara otoriter yang cenderung untuk menguasai segala sumber informasi dan kontrol terhadap ide-ide baru yang terus berkembang. Negara otoriter juga lebih mementingkan

pembangunan militer yang bertujuan untuk melindungi rezim penguasa sehingga mengabaikan kebutuhan rakyat.<sup>27</sup>

Dalam kasus konflik di Suriah, rakyat tidak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka kepada negara. Ketika rakyat berusaha menyampaikan keluhan mereka, pemerintah bereaksi dengan keras dengan menggunakan pihak militer untuk meredakan demonstrasi. Hal ini menimbulkan bentrokan antara pihak sipil dan militer sehingga menimbulkan korban jiwa.

### 1.5.2 Pengungsi (*Refugee*)

Pengertian dan wacana internasional mengenai pengungsi berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Di Brasil, pengertian mengenai pengungsi dipengaruhi oleh definisi dari pengungsi yang dicanangkan oleh UNHCR. Pengertian mengenai pengungsi diatur dalam Konvensi UNHCR 1951 Mengenai Status Pengungsi (*the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*), dan Resolusi 2198 (XXI) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB.

Pengertian pengungsi menurut Konvensi UNHCR 1951 adalah orang yang tidak dapat atau tidak ingin untuk kembali ke negara asal mereka karena kekhawatiran dengan sebab ras, agama, nasionalitas, keanggotaan akan kelompok sosial tertentu, atau opini politik. Konvensi tersebut dipergunakan tanpa adanya diskriminasi jenis kelamin, umur, cacat fisik, seksualitas, atau bentuk diskriminasi lainnya. Selain itu pengungsi tidak dapat dihukum karena menempati wilayah negara lain secara tidak sah karena pemberian suaka dapat memberikan kelonggaran bagi pengungsi untuk lolos dari aturan imigrasi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Yu-tai Tsai. 2009. *The Emergence Of Human Security: A Constructivist View*. [https://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol14\\_2/TSAI%20-%2014n2%20IJS.pdf](https://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol14_2/TSAI%20-%2014n2%20IJS.pdf) [15 Desember 2014]

<sup>28</sup>UNHCR. 2011. *Loc. Cit.*

Brasil mengatur mengenai pengungsi pada Undang-undang Pengungsi Tahun 1997. Dalam Pasal 1 UU tersebut, berisi mengenai pengertian pengungsi dan seseorang dapat dikategorikan sebagai pengungsi apabila:

- karena kekhawatiran atas penganiayaan dengan sebab ras, agama, nasionalitas, kelompok sosial, atau opini politik seseorang pergi meninggalkan negara nasionalitasnya dan tidak dapat atau tidak berkeinginan untuk mengandalkan perlindungan pada negara tersebut;
- tidak mempunyai nasionalitas dan keluar dari negara di mana dia sebelumnya tinggal secara permanen, tidak dapat atau tidak berkeinginan untuk kembali ke negara tersebut berdasarkan kondisi yang disebutkan di atas;
- karena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum dan keras, orang tersebut dipaksa untuk meninggalkan negara asal mereka untuk pindah ke negara lain.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, masyarakat Suriah yang datang ke Brasil dapat dikategorikan sebagai pengungsi. Mereka mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh perselisihan antara pemerintah dengan masyarakat dan juga konflik dengan kelompok lain (ISIS). Ketika pemerintah Suriah gagal menerapkan tanggung jawab untuk memberikan rasa aman kepada penduduknya akibat menggunakan militer untuk melakukan represi dan ancaman dari kelompok ISIS, penduduk Suriah terpaksa meninggalkan tempat asal mereka untuk mencari perlindungan di negara lain.

Isu utama dalam hal yang berkaitan dengan pengungsi dalam dunia internasional adalah mengenai perlindungan bagi mereka. *Responsibility to protect* merupakan prinsip yang dijadikan pegangan oleh komunitas internasional

---

<sup>29</sup> Heidi Savabi. 2014. *The Legal Framework and Institutional Assistance for Refugees in Brasil since the Mid-Twentieth Century: The Impact on Refugee Integration and Assistance*. <http://www.trendsandperspectives.info/pdf/updatedPDF20140724/Heidi%20Savabi%20Spring%202014.pdf> [24 Nopember 2014]

untuk melindungi para pengungsi tersebut. Tanggung jawab perlindungan rakyat sipil akan diambil alih oleh komunitas internasional ketika negara asal gagal mewujudkannya.<sup>30</sup> Berdasarkan prinsip tersebut, karena Suriah gagal melindungi rakyatnya sehingga mereka memutuskan untuk menjadi pengungsi, maka Brasil sebagai bagian dari komunitas internasional dapat mengambil alih perlindungan bagi rakyat Suriah dengan memberikan suaka kepada mereka.

### 1.5.3 *Responsibility to Protect*

Banyaknya konflik sipil yang terjadi membuat komunitas internasional beranggapan bahwa harus ada pihak yang menolong para korban dari konflik. Pertolongan tersebut dilakukan melalui intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*), tetapi tidak semua pihak setuju dengan adanya intervensi kemanusiaan. Terdapat banyak pro dan kontra, seperti mengenai siapa yang boleh mengintervensi, sejauh mana tahapan konflik sampai harus dilakukan intervensi, dan prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh negara. Selain itu bagi negara berkembang prinsip intervensi kemanusiaan memiliki konsep neo-kolonialis yang memberi peluang bagi negara maju untuk ikut campur dalam masalah militer negara berkembang.<sup>31</sup>

*Responsibility to Protect* merupakan sebuah prinsip yang dibuat oleh *International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)*<sup>32</sup> dan dipublikasikan pada 2001 dan ditetapkan dalam *Outcome Document of the 2005 United Nations World Summit*.<sup>33</sup> Pengertian dari *responsibility to protect* sendiri adalah norma internasional yang mengatur agar negara memiliki rasa tanggung

---

<sup>30</sup> Sharon Stanton Russel. *Loc. Cit.*

<sup>31</sup> Eduarda Passarelli Hamann dan Robert Muggah. 2013. *Implementing the Responsibility to Protect: New Directions For International Peace and Security?*. Brasilia: Igarape Institute. hal. 10

<sup>32</sup> ICISS merupakan badan independen yang didirikan oleh pemerintah Kanada untuk mengatasi mengenai dilema komunitas internasional tentang konsep intervensi kemanusiaan dan kedaulatan pada tahun 2000.

<sup>33</sup> Valerie Leunsmann. 2014. *The Impact of the ICISS Report on State Sovereignty*. <http://www.e-ir.info/2014/01/18/the-impact-of-the-iciss-report-on-state-sovereignty/> [15 Desember 2014]

jawab untuk melindungi rakyatnya dalam menghadapi genosida, perang, dan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang lain dan ketika negara gagal untuk melindungi rakyatnya, maka tanggung jawab tersebut dipegang oleh komunitas internasional.<sup>34</sup> Negara harus menyadari bahwa dalam kedaulatan yang mereka miliki juga terdapat tanggung jawab untuk melindungi penduduknya. *Responsibility to protect* adalah prinsip yang memiliki aspek lebih luas dari intervensi kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan merupakan bagian aspek dari *responsibility to protect*. Ide utama dari *responsibility to protect* adalah menghindari pendekatan militer dengan cara-cara damai untuk menyelesaikan konflik dan intervensi militer merupakan upaya terakhir ketika konflik berada di situasi yang ekstrim.<sup>35</sup>

*Responsibility to protect* berkaitan erat dengan konsep kedaulatan (*sovereignty*). Kedaulatan merupakan konsep yang menunjukkan identitas resmi negara dalam hukum internasional. Kedaulatan menunjukkan kapasitas negara untuk membuat otoritas kebijakan dengan memperhatikan rakyat dan sumber daya yang ada dalam wilayah negara. Meskipun demikian, otoritas negara tidak bersifat absolut, tetapi dibatasi dan diregulasikan oleh pembagian kekuasaan. Adanya kedaulatan membuat negara bersikap saling menghormati. Melalui kedaulatan, negara didukung oleh hukum internasional untuk menjalankan peraturan dalam negeri. Negara lain tidak boleh ikut campur mengenai masalah domestik. Jika ada intervensi dari luar negeri, maka negara berhak untuk mempertahankan integritas teritorialnya.

Adanya perang sipil yang menimbulkan banyak korban jiwa, membuat konsep mengenai penghormatan terhadap kedaulatan negara menjadi dilema bagi komunitas internasional. Di satu sisi, komunitas internasional tidak berhak untuk

---

<sup>34</sup>Eduarda Passarelli Hamann dan Robert Muggah. *Loc. Cit.*

<sup>35</sup>ICISS. 2001. *The Responsibility to Protect*. Ottawa: International Development Research Centre hal. 12

ikut campur urusan dalam negeri suatu negara karena adanya konsep kedaulatan, akan tetapi di sisi yang lain kekerasan terhadap umat manusia harus dihentikan. Oleh karena itu muncul gagasan mengenai kedaulatan sebagai tanggung jawab bagi negara untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyatnya.

Terdapat tiga aspek utama dalam konsep *responsibility to protect*. Pertama adalah *responsibility to prevent* (tanggung jawab untuk mencegah) konflik. Konflik dapat bersumber dari kesenjangan, masalah ekonomi internasional, kesehatan, dan kurangnya penghormatan terhadap HAM. Tindakan pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pencegahan secara langsung melalui jalur politik dan diplomasi yang bila perlu melibatkan peran dari (PBB). Jalur politik dan diplomasi dapat berupa forum, dialog dan mediasi, serta diplomasi jalur dua yang melibatkan pihak non-pemerintah. Tindakan pencegahan yang kedua dilakukan melalui jalur ekonomi yang dapat berupa bantuan (hibah ataupun pinjaman) dan juga sanksi (embargo).

Aspek kedua dalam *responsibility to protect* adalah *responsibility to react* (tanggung jawab untuk bertindak) yang memiliki pengertian bahwa segala tindakan yang dilakukan negara untuk melindungi umat manusia. Ketika negara gagal melakukan pencegahan, komunitas internasional harus melakukan tindakan koersif melalui bidang politik, ekonomi ataupun tindakan hukum yang lain, dan jika mendesak, komunitas internasional dalam melakukan intervensi militer. Intervensi militer hanya akan dilakukan ketika konflik menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah atau adanya upaya *ethnic cleansing*, pengusiran secara paksa, dan teror pelecehan seksual.

Aspek yang ketiga dalam *responsibility to protect* adalah *responsibility to rebuild* (tanggung jawab membangun kembali). Tidak hanya tanggung jawab dalam mencegah dan mengambil tindakan intervensi, komunitas internasional juga harus bertanggung jawab untuk membangun kembali negara setelah konflik

terjadi. Rekonsiliasi merupakan proses yang penting. Menurut Sekretaris-Jenderal PBB, dalam proses rekonsiliasi komunitas internasional harus mendahulukan perlindungan terhadap HAM, pengembangan politik yang demokratis, perasaan kesatuan bangsa, dan memastikan bahwa pengungsi dan IDP mendapatkan rasa aman di tempat asal mereka setelah mereka kembali dari kamp pengungsian.<sup>36</sup>

Prinsip *responsibility to protect* masih mendapatkan tantangan dalam upaya pengimplementasiannya. Terdapat dua faktor yang saling bertolak belakang, yaitu kedaulatan negara dan kapasitas komunitas internasional untuk melindungi keamanan manusia (*human security*).<sup>37</sup> Negara berdaulat tidak menginginkan otoritasnya berkurang dengan adanya campur tangan dari pihak luar. Akan tetapi, di pihak lain komunitas internasional berpendapat bahwa mereka harus bertindak ketika terjadi konflik sipil yang ekstrim.

Brasil menerima konsep *responsibility to protect* karena konsep tersebut berdasarkan pada hukum internasional yang ada, fokus terhadap genosida, pembersihan golongan, perang, dan pelanggaran kemanusiaan (*genocide, ethnic cleansing, war crimes and crimes against humanity*), dan mencoba untuk menstimulasi keterlibatan organisasi internasional dan lembaga PBB melebihi Dewan Keamanan (DK) PBB. Alasan-alasan tersebut membuat Brasil beranggapan bahwa *responsibility to protect* memiliki pendekatan yang lebih luas dalam melindungi masyarakat sipil. *Responsibility to protect* memiliki ide wacana yang baik dan sesuai dengan politik luar negeri Brasil yang tidak terlalu menggunakan ekonomi dan militer dalam konteks *power*.<sup>38</sup>

Dalam kasus Suriah, Dewan Keamanan telah mengajukan *draft* resolusi agar pemerintah Suriah menghentikan kekerasannya pada 4 Oktober 2011, tetapi

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hal. 13-75

<sup>37</sup> Roger Shanahan. 2011. *R2P: Seeking Perfection in an Imperfect World*. <http://www.e-ir.info/2011/10/07/r2p-seeking-perfection-in-an-imperfect-world/> [24 Nopember 2014]

<sup>38</sup> Eduarda Passarelli Hamann. 2012. *Brazil and R2P: A Rising Global Player Struggles to Harmonise Discourse and Practice*. [http://igarape.org.br/wp-content/themes/igarape\\_v2/pdf/A-Rising-Global-Player-Struggles-to-Harmonise-Principles-and-Practice-Nov-2012.pdf](http://igarape.org.br/wp-content/themes/igarape_v2/pdf/A-Rising-Global-Player-Struggles-to-Harmonise-Principles-and-Practice-Nov-2012.pdf) [21 Pebruari 2015]

dalam pemilihan suara Rusia dan Cina melakukan veto, dan tiga anggota tidak tetap Dewan Keamanan yang lain, yaitu Brasil, India, dan Afrika Selatan abstain.<sup>39</sup> Abstainnya Brasil dalam hal tersebut dikarenakan Brasil menganggap bahwa resolusi tersebut akan mengarah pada intervensi pihak asing. Hal ini tidak sesuai dengan konsep *responsibility while protecting* yang dikeluarkan oleh Brasil sebagai pelengkap dari *responsibility to protect* dalam mengatur proses intervensi kemanusiaan agar tidak menyimpang dari prinsip perdamaian. Intervensi yang dilakukan oleh pihak asing memiliki kemungkinan sebagai upaya imperialisme yang dapat menimbulkan protes dari para pengikut anti-imperialisme di berbagai negara.<sup>40</sup>

#### 1.5.4 Diaspora

Pada awalnya istilah diaspora ditujukan untuk kelompok Yahudi yang banyak melakukan migrasi, namun sejak tahun 1960 penggunaan kata diaspora mulai meluas, tidak melekat untuk Yahudi saja. Penyebaran masyarakat Afrika, Armenia, dan Irlandia pun dikenal dengan diaspora. Perkembangan mengenai diaspora selanjutnya terjadi pada 1980 ketika William Safran berargumen bahwa diaspora dapat digunakan untuk mendeskripsikan ekspatriat, pencari suaka politik, dan imigran. Pada tahun 1990, dengan adanya pengaruh pemikiran postmodernisme, pendapat mengenai pengertian diaspora di masa sebelumnya dianggap menghambat kekuatan konsep. Hal ini dikarenakan kaum postmodern menganggap bahwa identitas mengalami deterritorialisasi, konstruksi, dan dekonstruksi secara fleksibel sehingga pengertian mengenai diaspora juga harus bersifat fleksibel. Pada masa selanjutnya, mulai terdapat konsolidasi mengenai

---

<sup>39</sup> Security Council. 2011. *Security Council Fails to Adopt Draft Resolution Condemning Syria's Crackdown on Anti-Government Protestors, Owing to Veto by Russian Federation, China.* <http://www.un.org/press/en/2011/sc10403.doc.htm> [2 Desember 2014]

<sup>40</sup> Stacey Berger. 2012. *Violence in Syria Increases While Brasil Takes a Policy of Silence.* [http://www.opeak.net/index.php?option=com\\_k2&view=item&id=12006:violence-in-syria-increases-while-Brasil-takes-a-policy-of-silence](http://www.opeak.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=12006:violence-in-syria-increases-while-Brasil-takes-a-policy-of-silence) [2 Desember 2014]

pengertian diaspora. Pendapat postmodernisme diakui, akan tetapi tidak sepenuhnya dibenarkan. Peneliti pada masa ini menekankan lebih menekankan inti dari diaspora, yaitu adanya kaitan yang erat antara pelaku diaspora dengan tanah air, dimana kebiasaan masyarakat di tanah air, tetap melekat di tempat tinggal mereka yang baru.<sup>41</sup>

Dengan demikian, terdapat tiga kriteria dalam diaspora, yaitu penyebaran ke luar batas wilayah negara, pemikiran yang berorientasi terhadap tanah air, dan adanya batas antara mereka dengan penduduk negara tujuan. Penyebaran masyarakat dapat disebabkan oleh tekanan dari tempat asal yang membuat mereka terpaksa melakukan perpindahan melewati batas negara. Kriteria kedua dari diaspora adalah pola pikir yang berdasarkan tanah air dalam menentukan nilai-nilai, identitas, dan loyalitas. Kriteria ketiga adalah adanya sekat antara pelaku diaspora dengan budaya di tempat mereka yang baru, baik secara sengaja ataupun merupakan bagian dari diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat di tempat yang baru.<sup>42</sup>

Diaspora memiliki dampak yang besar terhadap kegiatan perekonomian, yaitu dalam hal perdagangan, investasi, dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada bidang perdagangan terdapat hubungan antara keberadaan diaspora dengan peningkatan nilai perdagangan karena anggota diaspora menciptakan koneksi antara produsen dan konsumen di negara asal dan tujuan. Sedangkan kaitan antara diaspora dengan investasi adalah adanya pertumbuhan investasi baik di negara asal ataupun negara tujuan. Selain itu, diaspora dapat digunakan sebagai sarana untuk bertukar ilmu dan kemampuan antara negara asal dengan negara tujuan. Masyarakat yang menjadi bagian dari diaspora dapat mengaplikasikan keahlian yang mereka miliki di negara tujuan dan menyalurkan

---

<sup>41</sup> Robin Cohen. 2008. *Global Diasporas: An Introduction Second Edition*. Oxon: Routledge. Hal 1-2.

<sup>42</sup> Rogers Brubaker. 2005. The 'diaspora' diaspora. *Ethnic and Racial Studies Vol. 28 No. 1*. [http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/brubaker/Publications/29\\_Diaspora\\_diaspora\\_ERS.pdf](http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/brubaker/Publications/29_Diaspora_diaspora_ERS.pdf) [12 Oktober 2015] hal. 2-6

segala hal yang mereka pelajari di negara yang baru ke negara asal mereka.<sup>43</sup> Keberadaan diaspora membuat pekerja migran tetap memiliki ikatan emosional dengan tempat asal mereka.

Brasil merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan diaspora beberapa kelompok, yaitu Korea, Jepang, Afrika, dan Arab (Suriah dan Lebanon). Penduduk Suriah pertama kali datang ke Brasil pada 1876 dan mereka dikenal dengan sebutan *turco* yang berarti orang yang berasal dari Turki karena pada saat itu wilayah Suriah dikuasai oleh Turki. Akan tetapi, mereka lebih memilih untuk disebut sebagai *sírio* karena mereka mendatangi Brasil untuk melarikan diri dari kesultanan Turki.

*Sírio* datang ke Brasil untuk mencari pekerjaan dengan melakukan perdagangan tekstil keliling. Pada saat itu kegiatan berdagang keliling tidak dikenal di Brasil, namun kegiatan ini memudahkan pelanggan yang ingin berbelanja barang sehingga kelompok *sírio* disenangi penduduk lokal dan mereka mendapatkan pendapatan yang banyak. Peningkatan pendapatan mereka membuat mereka mengembangkan kegiatan yang mereka miliki melalui perkumpulan pengusaha. Mereka mendirikan perkumpulan pertama yang bernama *The Esporte Clube Sírio* pada 1917. Melalui perkumpulan tersebut usaha perdagangan mereka semakin maju dengan adanya pertukaran informasi antar pengusaha.<sup>44</sup>

## 1.6 Argumen Utama

Mengacu pada pertanyaan dan kerangka konseptual, maka argumen utama dalam penelitian ini adalah alasan Brasil dalam menerima pengungsi Suriah adalah karena Brasil memiliki dedikasi untuk melindungi keamanan manusia.

---

<sup>43</sup> Kathleen Newland dan Sonia Plaza. 2013. *What We Know About Diasporas and Economic Development*. <http://www.migrationpolicy.org/research/what-we-know-about-diasporas-and-economic-development> [12 Oktober 2015]

<sup>44</sup> Montie Brian Pitts, Jr. 2006. *Forging Ethnic Identity Through Faith: Religion and The Syrian-Lebanese Community in Sao Paulo*. <http://etd.library.vanderbilt.edu/available/etd-07262006-113823/unrestricted/thesis.pdf> [19 Maret 2015]

Konflik di Suriah telah menimbulkan banyak pengungsi yang mencari perlindungan ke negara lain termasuk Brasil. Cara untuk mengatasi konflik tersebut, tindakan yang paling tepat adalah melalui cara-cara damai dalam rangka menghindari kerugian perang yang sangat besar. Hal ini sesuai dengan konsep *Responsibility to Protect* yang menyebutkan bahwa keamanan penduduk yang menjadi korban konflik menjadi tanggung jawab dunia internasional ketika negara asal para penduduk tersebut gagal melaksanakan tugasnya. Brasil sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan juga pihak yang meratifikasi Konvensi UNHCR 1951 memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk Suriah yang mencari perlindungan ke Brasil.

### **1.7 Metode Penelitian**

Metode merupakan teknik atau cara yang digunakan mengungkap hubungan antar konsep dengan data-data. Metode penelitian harus sesuai dengan formulasi dan jawaban dalam penelitian yang akan ditulis.<sup>45</sup> Hasil dari penelitian akan ditentukan oleh metode penelitian yang digunakan sehingga sangat penting untuk menggunakan metode penelitian yang benar. Jika metode penelitian yang digunakan salah, maka penelitian tersebut sifatnya tidak valid.

#### **1.7.1 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian kepustakaan penelitian dilakukan secara tidak langsung. Pada metode penelitian kepustakaan, sumber yang diambil tidak hanya melalui buku saja, tetapi juga termasuk jurnal, surat kabar, artikel, majalah, dan berbagai data dan informasi baik cetak dan elektronik yang dapat mendukung penulisan penelitian.

---

<sup>45</sup> Audie Klotz dan Deepa Prakash. *Op. Cit.* hal. 12

Adapun sumber dan media yang digunakan penulis dalam pengumpulan data antara lain:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Ruang Baca FISIP Universitas Jember
3. Buku-buku Koleksi Pribadi
4. Jurnal ilmiah, Artikel, Majalah, dan media cetak lainnya
5. Internet

### **1.7.2 Teknik Analisis Data**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian. Metode berpikir deduktif digunakan untuk menganalisis data dan menjawab permasalahan. Dalam metode berpikir deduktif, kerangka konseptual telah ditetapkan terlebih dahulu dan data-data yang terkumpul harus menyesuaikan dengan konsep yang telah ditetapkan.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini data-data yang ada akan dikelompokkan menyesuaikan dengan permasalahan yang ada dan kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori dan konsep yang digunakan.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman dan penulisan, maka penelitian ini dibagi ke dalam lima bab. Setiap bab terdiri dari subbab yang saling berhubungan. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Johann Mouton. *Op. Cit.* hal. 103.

**BAB 1: Pendahuluan**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB 2: Penerapan *Human Security* di Brasil**

Bab ini akan membahas bagaimana pemahaman Brasil mengenai *Human Security*, konsep *Responsibility while Protecting* yang diajukan Brasil ke Sekretaris Jenderal PBB untuk menangani konflik sipil, dan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Brasil dalam proses penanganan dan menetapkan peraturan ketika menerima pengungsi Suriah.

**BAB 3: Hubungan Brasil dengan Negara Suriah**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hubungan Brasil dengan Suriah. Hubungan yang dianalisis adalah hubungan yang bersifat politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai kepentingan Brasil di Timur Tengah.

**BAB 4: Faktor yang Mendorong Brasil untuk Memberikan Perlindungan kepada Pengungsi Suriah**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendorong yang membuat Brasil bersedia untuk menampung pengungsi Suriah di Negara mereka, yaitu mengenai komitmen mereka terhadap keamanan manusia, Konvensi UNHCR 1951 dan tanggung jawab Brasil sebagai bagian dari masyarakat internasional seperti yang dijelaskan dalam *responsibility to protect*.

**BAB 5: Kesimpulan**

Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian yang telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya.

## BAB 2. PENERAPAN *HUMAN SECURITY* DI BRASIL

### 2.1 *Human Security* Menurut Brasil

Permasalahan mengenai *human security* di Brasil dimulai dengan adanya kesenjangan antar masyarakat. Brasil mengalami periode industrialisasi pada 1930-1980, akan tetapi hal tersebut tidak dapat meningkatkan pendapatan penduduk, terutama di daerah pertanian. Perekonomian Brasil memang mengalami perubahan, namun pemegang kekuasaan tidak berubah sehingga distribusi pendapatan terpusat pada kelompok elit.<sup>47</sup> Kesenjangan merupakan masalah utama di Brasil karena membuat banyak masyarakat Brasil yang tidak mampu untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak, dan merupakan penyebab adanya tindakan kriminalitas.<sup>48</sup>

Untuk mengatasi permasalahan mengenai *human security* yang terjadi di wilayah domestik, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan, salah satunya adalah *bolsa familia*. Program ini adalah pemberian bantuan tunai oleh pemerintah Brasil kepada masyarakat miskin yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003.<sup>49</sup> Brasil berhasil mengentaskan 28 juta masyarakat Brasil dari kemiskinan melalui program ini pada tahun 2012. Pemerintah juga mengeluarkan program *Brazil Sem Miséria (Brazil Without Misery)* yang merupakan program kelanjutan dari *bolsa familia* yang menargetkan kesehatan, pendidikan, dan perbaikan

---

<sup>47</sup> Alexandre de Freitas Barbosa. 2012. *The Real Brazil: The Inequality Behind The Statistic*. <http://www.christianaid.org.uk/images/real-brazil-full-report.pdf> [17 Maret 2015]

<sup>48</sup> Ilona Szabó de Carvalho dan Raphael M.C. Corrêa. 2007. *Brazilian Perspectives on Human Security. Policy: Issues And Actors Vol. 20 No. 8*. Johannesburg: Centre for Policy Studies. Hal. 9

<sup>49</sup> Fábio Veras Soares, dkk. 2010. *Evaluating The Impact Of Brazil's Bolsa Família: Cash Transfer Programs In Comparative Perspective*. [http://lasa-2.univ.pitt.edu/LARR/prot/fulltext/vol45no2/Soar-Riba-Osor\\_173-190\\_45-2.pdf](http://lasa-2.univ.pitt.edu/LARR/prot/fulltext/vol45no2/Soar-Riba-Osor_173-190_45-2.pdf) [3 Februari 2015]

insfrakstruktur pada Juni 2011. Melalui program ini pemerintah berharap dapat mengurangi kemiskinan sebesar 320 ribu penduduk pada akhir tahun 2011.<sup>50</sup>

Upaya Brasil dalam melindungi *human security* juga didukung oleh pihak dari organisasi non-pemerintah (*non-governmental organizations/NGO*). Jumlah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan terus bertambah setiap tahun. Menurut penelitian yang dilakukan *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística*, sebuah badan pencatatan statistik pemerintah, Brasil memiliki 338 ribu NGO pada tahun 2005 dan pada tahun 2012, jumlahnya meningkat menjadi 400 ribu NGO yang 74 persen diantaranya merupakan organisasi non-profit yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan.<sup>51</sup> NGO memiliki peran penting dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan NGO dapat menjadi penghubung antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sehingga ketika terdapat penduduk yang tidak terjangkau program pemerintah, NGO dapat memberikan bantuan ataupun menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.

Salah satu NGO di Brasil yang bergerak di bidang kemanusiaan adalah *Viva Rio* yang berpusat di salah satu kota terbesar di Brasil, Rio de Janeiro. Proyek *Viva Rio* berfokus pada kampanye anti kekerasan bersenjata, *Security Sector Reform* dan mengadvokasi kasus kekerasan yang terjadi di kota Rio de Janeiro. *Viva Rio* beranggapan bahwa kekerasan merupakan ancaman yang utama bagi *human security* karena ketika kekerasan muncul maka pembangunan akan sulit dicapai dan kemiskinan akan meningkat.<sup>52</sup> Untuk mengatasi permasalahan mengenai pemuda, *Viva Rio* memiliki program bantuan pendidikan dan pengawasan yang dilakukan bersama dengan pemerintah, sedangkan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kekerasan senjata, *Viva Rio* melakukan

---

<sup>50</sup> Alison O'Connell. 2013. *Brazilian Society: The Year Ahead*. <http://www.pulsamerica.co.uk/2013/01/06/what-does-2013-hold-in-store-for-poverty-and-social-inequality-in-brazil/> [3 Pebruari 2015]

<sup>51</sup> Leonardo Letelier. 2012. *Journey into Brazil's Social Sector*. [http://www.ssireview.org/articles/entry/journey\\_into\\_brazils\\_social\\_sector](http://www.ssireview.org/articles/entry/journey_into_brazils_social_sector) [16 Pebruari 2015]

<sup>52</sup> Ilona Szabó de Carvalho dan Raphael M.C. Corrêa. *Op. Cit.* hal. 16

advokasi dan kampanye.<sup>53</sup> Viva Rio bekerja sama dengan 70 lembaga lain, baik dari pemerintah, PBB, dan NGO dalam melaksanakan program mereka.<sup>54</sup>

Selain aktif berusaha mengatasi permasalahan *human security* di dalam negeri, pemerintah Brasil juga berusaha berperan dalam memperjuangkan *human security* di kancah internasional, yaitu dalam upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan. Permasalahan tersebut memerlukan upaya dari masyarakat internasional dengan cara mentransformasi struktur kebijakan dan mengubah sistem produksi.<sup>55</sup> Brasil menganggap bahwa kelaparan dan kemiskinan adalah masalah krusial karena kelaparan merendahkan martabat manusia, melanggar hak asasi dasar manusia, yaitu hak untuk hidup, dan angka kematian yang disebabkan oleh kelaparan jumlahnya sangat tinggi.<sup>56</sup>

Brasil berusaha mengatasi kelaparan dan kemiskinan melalui Bank Pembangunan Nasional Brasil (BNDES/*O Banco Nacional Do Desenvolvimento*) yang meminjamkan dana bagi negara yang berusaha mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan dengan total tiga kali lebih besar dari pinjaman yang dikeluarkan Bank Dunia pada tahun 2011.<sup>57</sup> Selain melalui BNDES, Brasil menjalin kerja sama dengan India dan Afrika Selatan dengan membentuk *India, Brazil, and South Africa (IBSA) Fund* yang berusaha mengentaskan kelaparan dan kemiskinan di negara berkembang lainnya.<sup>58</sup> *IBSA Fund* merupakan program yang dibuat oleh *IBSA Dialogue Forum* pada tahun 2004 yang fokus dalam membantu negara miskin dan negara yang terlibat dalam konflik militer. Proyek-

<sup>53</sup> Evaluation Team of Viva Rio. 2005. *Evaluation of Viva Rio Projects "Security and development: Actions at local and regional levels" funded by DFID & "Human Security Partnerships with the Third Sector: Learning from and Multiplying Local Experiences" funded by UNDP* <http://erc.undp.org/evaluationadmin/downloaddocument.html?docid=3789> [18 Pebruari 2015]

<sup>54</sup> Situs resmi Viva Rio. Tanpa Tahun. <http://vivario.org.br/en/partners/> [18 Pebruari 2015]

<sup>55</sup> Ministry Of External Relations. 2008. *Brazilian Foreign Policy Handbook*. Brasilia: Ministry of External Relations (Bureau of Diplomatic Planning). Hal. 289

<sup>56</sup> *Ibid.* hal. 291

<sup>57</sup> Harold Trinkunas. 2015. *Brazil's Global Ambitions*. <http://www.brookings.edu/research/articles/2015/02/04-brazil-global-ambitions-trinkunas> [15 Pebruari 2015]

<sup>58</sup> Ministry Of External Relations. *Op. Cit.* hal. 290

proyek yang dikerjakan oleh IBSA *Fund* merupakan upaya untuk mewujudkan *Millenium Development Goals* (MDGs), yaitu memerangi kemiskinan dan kelaparan, pemenuhan pendidikan dasar secara universal, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, pelestarian lingkungan berkelanjutan, dan kerja sama global demi pembangunan.<sup>59</sup> Setiap anggota IBSA menyumbangkan satu juta dolar Amerika dalam program ini yang nantinya akan dikelola oleh Unit Khusus untuk Kerja sama Selatan-Selatan dalam PBB yang akan melaksanakan proyek di lapangan. IBSA *Fund* telah mengerjakan proyek di berbagai negara, di antaranya: Burundi, Cape Verde, Guinea-Bissau, Haiti, Sierra Leone, Palestina, Kamboja, Guyana, Laos, dan Vietnam. IBSA *Fund* telah menerima berbagai penghargaan internasional, yaitu *the South-South Cooperation Award for Partnership* oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada 2006, *Millennium Development Goals Awards* yang diberikan oleh *NGO Millennium Development Goals Awards Committee* pada 2010, dan *South-South and Triangular Cooperation Champions Award* oleh *United Nations Office for South-South Cooperation* (UNOSSC) untuk kontribusi IBSA dalam kerja sama Selatan-Selatan.<sup>60</sup>

Brasil juga bekerja sama dengan Organisasi Pangan Dunia (*Food and Agriculture Organizations/FAO*) melalui penyaluran dana sejak 60 tahun terakhir.<sup>61</sup> Perusahaan penelitian pertanian Brasil (EMBRAPA) menjalin kerja sama dengan *FAO's South-South Cooperation* pada tahun 2013 yang bertujuan untuk mencapai keamanan pangan melalui produksi pertanian berkelanjutan. Melalui kerja sama tersebut EMBRAPA akan mengirimkan ahli pertanian mereka

<sup>59</sup> Situs resmi PBB. Tanpa Tahun. Millenium Development Goals. <http://www.un.org/millenniumgoals/> [30 April 2015]

<sup>60</sup> Situs resmi Kementerian Luar Negeri Brasil. Tanpa Tahun. *India – Brazil – South Africa (IBSA) Dialogue Forum*. [http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com\\_content&view=article&id=7495:india-brazil-south-africa-ibsa-dialogue-forum&catid=144&lang=en-GB&Itemid=434](http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7495:india-brazil-south-africa-ibsa-dialogue-forum&catid=144&lang=en-GB&Itemid=434) [30 April 2015]

<sup>61</sup> Ministry Of External Relations. *Op. Cit.* hal. 294

ke FAO untuk memperluas pengetahuan dan transfer teknologi dalam hal pertanian, keamanan pangan, dan peraturan yang tepat dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA).<sup>62</sup> Brasil juga menyumbangkan dana senilai 150 ribu dolar Amerika kepada *Multilateral Trust Fund of the International Year of Family Farming* (Dana Kepercayaan Internasional Tahun Pertanian Keluarga), sebuah program yang dikelola oleh FAO pada tahun 2014.<sup>63</sup>

Brasil berusaha mengutamakan keadilan, inklusi, dan lembaga universal yang melibatkan semua negara dalam masalah kebijakan politik luar negeri, tanpa mengabaikan pengembangan militer, meskipun dana belanja militer tidak besar.<sup>64</sup> Hal ini dikarenakan Brasil beranggapan bahwa keamanan harus berdasarkan pada kerja sama internasional dari pada pandangan eksklusif yang berpusat pada diri sendiri.<sup>65</sup> Brasil mendukung konsep *responsibility to protect* karena dalam konsep tersebut menyebutkan mengenai tindakan preventif dan keikutsertaan pihak internasional dalam usaha mengurangi konflik, namun Brasil tidak setuju dengan PBB mengenai prinsip intervensi kemanusiaan yang ada dalam *responsibility to protect*. Hal ini sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang dibuat oleh pemerintah Brasil, meskipun sikap Brasil yang lebih mengedepankan *soft power* kurang dapat diterima oleh pihak internasional. Pihak internasional beranggapan bahwa kurangnya pengembangan militer Brasil akan berdampak pada kemampuan Brasil dalam keikutsertaannya mengatasi konflik internasional.<sup>66</sup>

Kebijakan luar negeri Brasil mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak pemerintahan Presiden Lula da Silva. Brasil berusaha menerapkan peraturan yang lebih tegas dalam hal perekonomian dan pembangunan sosial agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan dapat mengentaskan kemiskinan dan

<sup>62</sup> Situs resmi FAO. 2013. *FAO's South-South Cooperation To Benefit From Brazilian Expertise*. <http://www.fao.org/news/story/en/item/170670/icode/> [30 April 2015]

<sup>63</sup> Situs resmi FAO. 2014. *FAO Receives Brazilian Contribution To Support Family Farming*. <http://www.fao.org/partnerships/news-article/en/c/254039/> [15 Pebruari 2015]

<sup>64</sup> Harold Trinkunas. *Loc. Cit.*

<sup>65</sup> Ministry Of External Relations. *Op. Cit.* hal. 313

<sup>66</sup> Harold Trinkunas. *Loc. Cit.*

kesenjangan. Pemerintah Brasil berusaha menjunjung kedaulatan dan kepentingan nasional sebagai alat untuk memperkuat keberadaan Brasil di kancah internasional. Peningkatan ekspor merupakan salah satu agenda pemerintah untuk pembangun perekonomian dan mengurangi bantuan dari pihak asing. Pemerintah juga berusaha untuk lebih terlibat dalam kegiatan regional dan global untuk melakukan kegiatan ekonomi dan terlibat dalam perkembangan sosial, serta berupaya untuk menciptakan peraturan internasional yang adil.<sup>67</sup>

Brasil membuka 150 kantor perwakilan diplomatik pada tahun 2002. Jumlah kantor perwakilan diplomatik Brasil adalah sebanyak 230 pada 2010 dengan rincian penambahan baru 52 kantor kedutaan, enam perwakilan di Organisasi Internasional, 22 konsulat jenderal dan satu kantor diplomatik di Palestina. Brasil juga menambah jumlah diplomat mereka. Brasil memiliki 1000 diplomat pada 2005 yang bertambah menjadi 1400 diplomat pada 2010. Penambahan ini sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Brasil yang berupaya untuk melakukan ekspansi yang lebih luas.<sup>68</sup>

Akan tetapi, tetap ada perbedaan dalam perumusan kebijakan politik luar negeri antara Presiden Lula da Silva dengan Presiden Rousef, yaitu dalam menjalin hubungan dengan Amerika Serikat dan pandangan mengenai *human security*. Presiden Rousef memiliki pemikiran yang lebih terbuka mengenai kerja sama dengan Amerika Serikat. Presiden Rousef menjalin kerja sama dengan Presiden Barrack Obama dalam berbagai bidang seperti, pendidikan, sosial, perdagangan dan investasi, masalah energi dan lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, demokrasi, serta keamanan manusia. Sedangkan dalam bidang *human security*, pemerintahan Presiden Rousef sangat mendukung konsep diplomasi preventif dan menolak intervensi militer oleh negara besar dalam zona

<sup>67</sup> Alcides Costa Vaz. 2004. *Brazilian Foreign Policy under Lula: Change or Continuity?. FES Briefing Paper April 2004*. Sao Paulo: Friedrich-Ebert-Stiftung. Hal. 1-2.

<sup>68</sup> Celso Amorim. 2010. *Brazilian Foreign Policy Under President Lula (2003-2010): An Overview*. [http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292010000300013&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292010000300013&script=sci_arttext) [30 April 2015]

konflik dan mendukung penghapusan pengembangan nuklir oleh negara.<sup>69</sup> Presiden Rousseff terus berusaha mempromosikan *responsibility while protecting* yang melengkapi konsep *responsibility to protect* dengan menentang intervensi militer. Penggunaan instrumen militer untuk mempromosikan HAM bukanlah hal yang tepat karena militer identik dengan kekerasan bersenjata.<sup>70</sup>

Brasil merupakan pihak yang kritis dalam menanggapi hukum internasional yang diterapkan oleh negara maju, terutama yang berkaitan dengan intervensi pihak internasional terhadap konflik sipil yang dituangkan dalam konsep *responsibility to protect*. Komitmen Brasil dalam prinsip non-intervensi diterapkan pada saat DK PBB mengadakan pemungutan suara untuk mengintervensi Libya. Keputusan Brasil untuk abstain dalam forum dipandang secara negatif oleh Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. Brasil berasumsi bahwa intervensi pihak internasional terhadap konflik di dalam negeri dapat berpotensi untuk menimbulkan kolonialisme.<sup>71</sup>

Pemerintah Brasil menyatakan bahwa Brasil menjunjung prinsip non-intervensi, tetapi tidak mengesampingkan permasalahan yang ada. Presiden Dilma Rousseff mengatakan bahwa Brasil tidak akan abstain dalam forum yang membahas mengenai *human security*, tetapi Brasil membatasi pendapatnya hanya dalam perihal yang berkaitan dengan kesejahteraan, misalnya mengenai topik yang berkaitan dengan perjuangan hak perempuan. Brasil menginginkan adanya pemahaman dalam masyarakat internasional mengenai kedaulatan negara sebagai tanggung jawab internasional. Intervensi internasional cenderung meningkatkan kerugian perang karena pihak pengintervensi harus mengeluarkan berbagai kebutuhan untuk mengatasi konflik. Jika pihak internasional menghargai prinsip

---

<sup>69</sup>Diego Santos Vieira de Jesus. 2014. The Benign Multipolarity: Brazilian Foreign Policy Under Dilma Rousseff. *Journal of International Relations and Foreign Policy* Vol. 2, No. 1. [http://aripd.org/journals/jirfp/Vol\\_2\\_No\\_1\\_March\\_2014/2.pdf](http://aripd.org/journals/jirfp/Vol_2_No_1_March_2014/2.pdf) [30 April 2015]

<sup>70</sup>Thijs van Lindert dan Lars van Troost. 2014. *Shifting Power and Human Rights Diplomacy: Brazil*. [https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/rising\\_power\\_brazil.pdf](https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/rising_power_brazil.pdf) [15 Juni 2015]

<sup>71</sup>Harold Trinkunas. *Loc. Cit.*

kedaulatan negara lain, maka biaya dan korban perang dapat dikurangi. Brasil sebagai negara demokrasi menjunjung tinggi HAM, oleh karena itu meskipun terjadi konflik, Brasil mengutamakan keselamatan masyarakat sipil.<sup>72</sup>

## 2.2 Responsibility While Protecting

Pengimplementasian *responsibility to protect* kepada Libya pada tahun 2011, tidak menyelesaikan konflik, namun dijadikan sebagai alat oleh pihak internasional untuk melakukan intervensi dan mencampuri urusan politik domestik Libya.<sup>73</sup> Perlindungan terhadap keselamatan masyarakat sipil juga tidak terlaksana karena intervensi kemanusiaan memperburuk situasi di wilayah konflik. Setelah Presiden Libya, Muamar Khadafi, terbunuh, demokrasi tidak dapat diterapkan di Libya, dan perang antara pemerintah dengan kelompok *Islamist* kembali terjadi.<sup>74</sup> Kelompok *Islamist* yang kalah dalam pemilihan di parlemen menganggap bahwa pemerintah masih dalam pengaruh Presiden Khadafi yang terbunuh pada tahun 2011 sehingga menurut Kelompok *Islamist* pemerintahan tidaklah sah. Pada akhirnya Kelompok *Islamist* menguasai Tripoli, ibu kota Libya, sehingga pemerintah harus memindahkan pusat pemerintahan di wilayah timur Libya.<sup>75</sup>

Penggunaan kekerasan dalam perang dilakukan oleh pihak militer yang diatur secara politik, maka intervensi militer memiliki tujuan politik.<sup>76</sup> Dalam konsep *peace-keeping* yang dibuat oleh PBB disebutkan bahwa dunia internasional tidak boleh memasukkan penggunaan militer, kecuali untuk

<sup>72</sup> Thorsten Benner. 2013. *Brasil as A Norm Entrepreneur: the Responsibility While Protecting Initiative*. Berlin: Global Public Policy Institute [GPPi]. Hal. 3

<sup>73</sup> Eduarda Passarelli Hamann, dan Robert Muggah. 2013. *Implementing the Responsibility to Protect: New Directions For International Peace and Security?*. Brasilia: Igarape Institute. Hal. 32.

<sup>74</sup> Erin Banco. 2014. *Three Years After Gadhafi's Death, Libya Slides Into Civil War As Death Toll Rises In Benghazi*. <http://www.ibtimes.com/three-years-after-gadhafis-death-libya-slides-civil-war-death-toll-rises-benghazi-1707824> [16 Februari 2015]

<sup>75</sup> Chris Stephen. 2014. *War In Libya - The Guardian Briefing*. <http://www.theguardian.com/world/2014/aug/29/-sp-briefing-war-in-libya> [18 Februari 2015]

<sup>76</sup> Eduarda Passarelli Hamann, dan Robert Muggah. *Op. Cit.* hal. 33

membela diri. PBB juga menyampaikan bahwa *peace-keeping* memiliki tiga prinsip, yaitu: persetujuan pihak-pihak tertentu, tidak memihak, dan tidak menggunakan kekerasan kecuali untuk perlindungan diri dan perlindungan mandat.<sup>77</sup> Brasil beranggapan bahwa dalam *responsibility to protect*, penyelesaian konflik harus mengutamakan cara-cara damai, seperti diplomasi. Tanggung jawab dunia internasional dalam melindungi masyarakat korban konflik harus dilakukan tanpa kekerasan, oleh karena itu ide *humanitarian intervention* menyimpang dari konsep *peace-keeping* karena ketika dunia internasional mengimplementasikan intervensi, maka akan terjadi perang.

Menurut pendapat Brasil, pengimplementasian intervensi kemanusiaan akan mengancam kedaulatan negara sehingga diperlukan adanya prosedur tambahan dalam *responsibility to protect*, terutama untuk mengatur tentang intervensi militer. Pada 9 November 2011, Brasil mengajukan konsep *Responsibility while Protecting* untuk melengkapi konsep *responsibility to protect* kepada Sekretaris-Jenderal PBB.<sup>78</sup> Poin-poin yang ditulis Brasil dalam *responsibility while protecting* adalah:

- Pencegahan merupakan kebijakan yang terbaik. Penekanan dalam diplomasi preventif akan mengurangi resiko dalam konflik militer dan adanya korban jiwa.
- Komunitas internasional harus berusaha keras dalam mengupayakan cara-cara damai untuk melindungi rakyat dari ancaman kekerasan. Hal ini sesuai dengan prinsip dan tujuan Piagam PBB dan 2005 *World Summit Outcome*.
- Penggunaan militer, termasuk dalam *responsibility to protect*, harus mendapatkan izin dari Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Piagam PBB Bab VII atau seizin Majelis Umum menurut Resolusi 377 (V).

---

<sup>77</sup> *Ibid.* hal. 34

<sup>78</sup> *Ibid.*

- Pengesahan penggunaan militer harus dibatasi dalam hal hukum, operasional, dan elemen temporal, dan ruang lingkup tindakan militer harus disertai surat dan mandat dari Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB, serta disesuaikan dengan hukum internasional.
- Penggunaan militer harus menimbulkan kekerasan dan ketidakstabilan seminimal mungkin dan tidak dalam situasi apapun tindak militer mengakibatkan kerugian lebih dari yang diizinkan.
- Ketika militer digunakan, tindakannya harus bijaksana, proporsional, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh Dewan Keamanan.
- Dewan Keamanan harus memastikan akuntabilitas pihak yang diberi izin untuk menggunakan militer.<sup>79</sup>

Melalui *responsibility while protecting*, Brasil mencoba untuk memahami makna dari kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara. Kedaulatan negara akan dilanggar ketika ada intervensi militer. Oleh karena itu cara-cara damai untuk menyelesaikan konflik adalah kebijakan yang paling baik. Selain itu *responsibility while protecting* mencerminkan kebijakan luar negeri Brasil di era abad ke-20 yang mengutamakan aspek non-intervensi.<sup>80</sup>

Dalam kasus Suriah, Dewan Keamanan telah mengajukan draft resolusi agar pemerintah Suriah menghentikan kekerasannya pada Oktober 2011, tetapi dalam pemilihan suara Rusia dan Cina melakukan veto, dan tiga anggota tidak tetap Dewan Keamanan yang lain, yaitu Brasil, India, dan Afrika Selatan abstain.<sup>81</sup> Abstainnya Brasil dalam hal tersebut dikarenakan Brasil menganggap bahwa resolusi tersebut akan mengarah pada intervensi pihak asing. Hal ini tidak sesuai dengan konsep *responsibility while protecting* yang dikeluarkan oleh Brasil. Intervensi yang dilakukan oleh pihak asing memiliki kemungkinan sebagai

---

<sup>79</sup>Thorsten Benner. *Op. Cit.* hal. 1

<sup>80</sup>*Ibid.* hal. 2

<sup>81</sup>Security Council. *Loc. Cit.*

upaya imperialisme yang dapat menimbulkan protes dari para pengikut anti-imperialisme di berbagai negara.<sup>82</sup>

### 2.3 Kebijakan Pemerintah Brasil dalam Mengatur Pengungsi

Salah satu permasalahan yang muncul ketika terjadi perang sipil adalah para pengungsi yang menjadi korban konflik. Mereka berusaha mencari perlindungan ke negara lain karena negara asal mereka tidak mampu untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam upaya perlindungan terhadap pengungsi terdapat beberapa pendekatan mengenai kebijakan dalam upaya perlindungan terhadap pengungsi. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan pengungsi dan imigrasi yang berbeda, namun berhubungan. Pendekatan kedua adalah perlindungan pengungsi yang dikelompokkan pada urusan imigrasi. Pendekatan yang ketiga adalah pencarian suaka sebagai kontrol terhadap imigrasi. Penggolongan tersebut berdasarkan pada fokus keamanan negara, kepentingan nasional dalam hal keselamatan dan isu keamanan, dan hubungannya dengan kebijakan imigrasi dalam rangka menyertakan masalah sosial dan keamanan manusia.<sup>83</sup>

Brasil telah membuat komitmen internasional untuk memberi bantuan perlindungan kepada pengungsi sebagaimana mereka melindungi warga negara Brasil sendiri. Kebijakan pemerintah Brasil dalam menangani pengungsi dapat dilihat dari pendekatan pertama. Brasil memiliki kebijakan mengenai orang asing, tenaga kerja migran, dan pengungsi yang berbeda, namun berkaitan satu sama lain. Brasil memiliki kebijakan *resettlement* (perpindahan), perlindungan sementara, dan juga hukum yang mengatur mengenai Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Brasil.

---

<sup>82</sup> Rodger Shanahan. *Loc. Cit.*

<sup>83</sup> Edward Newman dan Joanne van Selm. 2003. *Refugees And Forced Displacement: International Security, Human Vulnerability, And The State*. Tokyo: United Nations University Press. Hal. 67.

Brasil meratifikasi Konvensi UNHCR 1951 pada tahun 1961, dan kemudian meratifikasi Protokol Mengenai Status Pengungsi tahun 1967 pada tahun 1972, sedangkan UU Nasional mengenai Pengungsi (*National Refugee Act, Law 9. 474*) dikeluarkan pada 1997. Penentuan status pengungsi melibatkan tiga pihak, yaitu UNHCR, pemerintah, dan masyarakat sipil. Pihak pemerintah diwakili oleh Kementerian Keadilan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Olahraga, serta Kepolisian Federal, sedangkan dari pihak masyarakat sipil diwakili oleh organisasi non-pemerintah. Keterlibatan tiga pihak tersebut merupakan kebijakan yang tepat karena menjamin prosedur perlindungan pengungsi yang demokratis dan efektif.<sup>84</sup>

Perlindungan terhadap pengungsi di Brasil diatur oleh UNHCR sebagai organisasi di bawah PBB yang memiliki kewenangan untuk melindungi pengungsi. UNHCR di Brasil bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat, yaitu: *Antônio Vieira Association (ASAV)*, *Cáritas Arquidiocesana of Manaus (CAM)*, *Cáritas Arquidiocesana of Rio de Janeiro (CARJ)*, *Cáritas Arquidiocesana of São Paulo (CASP)*, *Center for the Defense of Human Rights in Guarulhos (CDDH)*, dan *Migration and Human Rights Institute (MHRI)*. Selain itu pemerintah Brasil memiliki Komite Nasional untuk Pengungsi (*Comitê Nacional para os Refugiados/CONARE*) yang merupakan badan di bawah pimpinan Kementerian Keadilan yang bekerja untuk menentukan persyaratan pengungsi, mempromosikan kebijakan publik yang berkaitan dengan pengungsi, dan mengevaluasi kegiatan penempatan dan membuat aturan resmi mengenai kerangka kerja suaka pada tahun 1998.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Liliana Lyra Jubilut dan Silvia Menicucci de Oliveira Selmi Apolinário. 2008. Refugee Status Determination in Brazil: A Tripartite Enterprise. *Refugee Volume 25, No 2*. <http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/refuge/article/viewFile/26029/24062> hal. 29-31 [10 Maret 2015]

<sup>85</sup>UNHCR. 2012. *Direitos E Deveres De Solicitantes De Refúgio E Refugiados* <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/portugues/Pub>

Brasil menerapkan pasal 1 yang tercantum dalam Konvensi UNHCR 1951 yang disempurnakan oleh Protokol Mengenai Status Pengungsi tahun 1967 mengenai pengertian dari pengungsi. Pada awalnya definisi bagi pengungsi dalam Konvensi UNHCR 1951 hanya diperuntukkan bagi pengungsi asal Eropa akibat terjadinya Perang Dunia II. Protokol Mengenai Status Pengungsi tahun 1967 mengembangkan ruang lingkup dan menghapus batasan geografis dan batasan waktu sehingga pengertian dari pengungsi menjadi bersifat universal menyesuaikan dengan permasalahan pengungsi yang telah menyebar di seluruh dunia.<sup>86</sup> Pengungsi menurut Brasil adalah mereka, baik laki-laki, perempuan, manula, pemuda, dan anak-anak, yang dipaksa untuk meninggalkan negara asal mereka karena adanya perang bersenjata, penganiayaan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia secara masal.

Pasal dua dalam Konvensi UNHCR 1951 mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pengungsi kepada negara yang menerima keberadaan mereka. Tugas dari para pengungsi yang menempati wilayah Brasil adalah menghormati Konstitusi dan menaati hukum yang berlaku di Brasil. Ketika mereka melakukan tindak kriminal, mereka akan mendapatkan hukuman yang sama seperti masyarakat Brasil pada umumnya. Mereka tidak diizinkan untuk mengikuti segala hal yang berkaitan dengan politik, sesuai dengan pasal 107 Undang-undang 6.815/80. Selain itu pengungsi tidak dapat meninggalkan wilayah teritorial Brasil tanpa izin dari CONARE. Pengungsi tetap dapat meninggalkan Brasil dengan cara mengajukan paspor untuk Warga Negara Asing kepada kepolisian federal. Paspor ini hanya berlaku untuk satu kali perjalanan dan periode yang terbatas. Jika tidak menaati peraturan yang ada, maka mereka akan kehilangan status sebagai pengungsi.

---

[licacoes/2012/Direitos\\_e\\_Deberes\\_dos\\_Solicitantes\\_de\\_Refugio\\_e\\_Refugiados\\_no\\_Brasil\\_-\\_2012](#) hal. 21 [24 Februari 2015]

<sup>86</sup> Haya Madanat. 2012. *1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol*. <http://blog.hopesforwomen.org/2012/11/15/1951-refugee-convention-and-the-1967-protocol-by-haya-madanat/> [12 Maret 2015]

Brasil menyatakan meskipun pengungsi berada dalam situasi yang tidak biasa, integritas dan martabat mereka harus tetap dihormati sesuai dengan prinsip HAM yang tertuang dalam konstitusi Brasil. Pasal tiga Konvensi UNHCR 1951 menyebutkan apabila negara penerima tidak boleh melakukan segala bentuk diskriminasi terhadap pengungsi. Prinsip non-diskriminasi oleh pemerintah dan juga masyarakat sipil merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh para pengungsi di Brasil.

Brasil menjamin kebebasan para pengungsi untuk menjalankan ibadah mereka, sesuai dengan instruksi pada pasal empat dalam Konvensi UNHCR1951. Masyarakat dapat beribadah secara bebas di Brasil karena hal tersebut dijamin oleh konstitusi. Pemerintah menyatakan bahwa mereka akan memberikan hukuman penjara bagi siapa saja yang bertindak rasis dan menyinggung agama tertentu. Di samping itu, pemerintah menjamin kebebasan kelompok beragama untuk beribadah dan menerima anggota baru. Pemerintah juga tidak melarang sekolah-sekolah untuk mengajarkan pendidikan agama, namun hal tersebut harus dikonsultasikan dengan orang tua siswa terlebih dahulu.<sup>87</sup>

Kebijakan mengenai pengungsi di Brasil mengatur seseorang yang tinggal di Brasil untuk sementara waktu, melindungi hak mereka untuk bekerja, dan memberi akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan secara gratis. Hal ini sesuai dengan Konvensi UNHCR 1951 pasal 17-19 tentang pekerjaan, pasal 22 tentang pendidikan umum, dan pasal 24 mengenai peraturan perburuhan dan keamanan sosial. Brasil memiliki program yang disebut *Local Integration*, yaitu program kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk memfasilitasi pengungsi dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lowongan kerja. Program ini diumumkan oleh Brasil

---

<sup>87</sup>United States Department of State (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor). 2012. *International Religious Freedom Report*. [http://www.justice.gov/eoir/vll/country/DOS\\_IRF/2012/Brazil.pdf](http://www.justice.gov/eoir/vll/country/DOS_IRF/2012/Brazil.pdf) [14 Maret 2015]

dalam rangka memperingati 30 tahun *Cartagena Declaration on Refugees of 1984* (perjanjian Amerika Latin, Meksiko, dan Panama untuk menunjukkan komitmen terhadap perlindungan pengungsi sesuai dengan Konvensi UNHCR 1951) pada 2014.<sup>88</sup> Untuk mendapatkan tempat tinggal, pengungsi akan dibantu oleh UNHCR dan NGO yang akan menyediakan tempat, membayar sewa, dan memberi bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama dua belas bulan.<sup>89</sup>

Jika seseorang ingin meminta suaka di Brasil, maka orang tersebut harus menghubungi kantor polisi federal atau otoritas imigrasi di perbatasan dan meminta permintaan perlindungan secara resmi kepada pemerintah Brasil. Permintaan suaka juga dapat dilakukan ketika seseorang telah berada di wilayah teritorial Brasil. Ketika berada di kantor polisi federal pemohon akan mengisi formulir aplikasi (*Declaration Term/Termo de Declaração*) yang berisi pertanyaan mengenai keterangan identitas seseorang (nama, kebangsaan, nama orang tua, tanggal lahir) dan menjalani wawancara mengenai alasan utama mereka meninggalkan negara asal untuk mencari perlindungan di Brasil.<sup>90</sup> Permintaan suaka tersebut ditujukan untuk individu Komite Nasional Pengungsi (CONARE) yang kemudian akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah status pengungsi seseorang dapat dikabulkan atau tidak yang prosesnya berlangsung selama enam bulan. Ketika proses ini sedang berlangsung pengungsi diizinkan untuk berpindah tempat tinggal, sesuai dengan pasal 26 Konvensi UNHCR 1951 yang mengatur mengenai kebebasan pengungsi untuk tinggal sesuai dengan keinginan mereka, namun mereka harus menginformasikan kepada CONARE mengenai tempat tinggal mereka yang baru.

---

<sup>88</sup> ACNUR. 2014. *A Framework for Cooperation and Regional Solidarity to Strengthen the International Protection of Refugees, Displaced and Stateless Persons in Latin America and the Caribbean*. <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9864.pdf?view=1> [16 Maret 2015]

<sup>89</sup> Liliana Lyra Jubilit dan Silvia Menicucci de Oliveira Selmi Apolinário. *Op. Cit.* hal. 13

<sup>90</sup> *Ibid.* hal. 31

Setelah menerima aplikasi suaka CONARE akan mengeluarkan deklarasi mengenai penerbitan protokol sementara (*Provisional Protocol/Protocolo Provisório*) oleh kepolisian federal. Protokol tersebut sangatlah penting karena akan menjadi dokumen identitas bagi pencari suaka sampai permohonannya diproses oleh CONARE. Kebijakan mengenai kelengkapan identitas telah diatur oleh UNHCR pada pasal 27 Konvensi 1951, bahwa negara penerima wajib menyediakan keterangan identitas bagi seluruh pengungsi yang berada di wilayahnya. Melalui protokol tersebut pencari suaka dapat meminta nomor pajak (*Brazilian Tax Number/Cadastro de Pessoa Física – CPF*) dan izin kerja sementara (*Carteira de Trabalho*). Protokol tersebut dapat berlaku selama enam bulan dan harus diperbarui oleh kepolisian federal sampai pencari suaka mendapatkan putusan dari CONARE. Fungsi dari nomor pajak adalah agar pengungsi dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, serta membuka akun bank dan akses keuangan yang lain.

Pasal 25 Konvensi UNHCR 1951 mengatur mengenai pendampingan administrasi untuk membantu pengungsi dalam memasuki wilayah negara tertentu. Dalam pasal ini disebutkan bahwa negara penerima pengungsi harus menyediakan pendamping untuk mengurus dokumen yang diminta oleh pemerintah dan pemerintah tidak boleh meminta biaya yang memberatkan mereka dalam berusaha mendapatkan status pengungsi. Brasil menyediakan penerjemah bagi mereka yang tidak menguasai bahasa Portugis dan Inggris sebagai upaya pendampingan bagi para pengungsi<sup>91</sup> dan menggratiskan permohonan status pengungsi.<sup>92</sup> Petugas kedutaan yang bekerja di sekitar wilayah konflik juga memperlakukan pengungsi dengan baik, mereka tidak meminta bayaran untuk

---

<sup>91</sup> UNHCR. 2012. *Op. Cit.* hal. 24-25.

<sup>92</sup> Liliana Lyra Jubilot dan Silvia Menicucci de Oliveira Selmi Apolinário. *Op. Cit.* hal. 33

melengkapi dokumen dan menyediakan dokumen perjalanan.<sup>93</sup> Hal ini juga sesuai dengan pasal 28 Konvensi UNHCR 1951 bahwa negara harus mempermudah pencari suaka dalam mengurus dokumen perjalanan mereka.

Keputusan dari CONARE dapat berupa keputusan yang positif dan negatif. Jika keputusannya bersifat positif, maka kepolisian federal akan mengeluarkan nomor registrasi (*National Registration of Foreigners/Registro Nacional de Estrangeiro* – RNE) sebagai izin tinggal. Sedangkan ketika keputusan CONARE bersifat negatif atau permintaan suaka tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding kepada Kementerian Keadilan. Banding paling lambat dilakukan lima belas hari setelah keputusan CONARE dikeluarkan. Apabila permintaan suaka tidak dikabulkan oleh Kementerian Keadilan, maka pemohon akan dilimpahkan pada Undang-undang 6.815/80 yang mengatur tentang warga asing yang berada di Brasil.

Ketika permintaan suaka seseorang ditolak, maka orang tersebut mengikuti aturan mengenai WNA dan jika sesuai mencari regulasi migrasi sesuai dengan Undang-undang migrasi dan tenaga kerja Brasil. Pengungsi dapat memiliki izin tinggal permanen di Brasil setelah menempati Brasil selama empat tahun. Pemberian visa permanen tidak menghilangkan status mereka sebagai pengungsi. Brasil tidak akan menolak dan mendeportasi para pengungsi yang mencari perlindungan ke wilayah mereka karena terikat dengan aturan internasional. Berdasarkan pasal 33 Konvensi UNHCR 1951 dan Undang-undang Pengungsi Brasil terdapat prinsip *non-refoulement* yang menyebutkan bahwa pencari suaka dan pengungsi tidak dapat secara paksa dikembalikan ke wilayah asal mereka dimana kehidupan dan kebebasan mereka terancam, kecuali mereka melakukan pelanggaran hukum berat. Brasil tidak menerima pencari suaka yang melakukan

---

<sup>93</sup> Jonathan Watts. 2015. *A Long Way From Home: Syrians Find Unlikely Refuge In Brazil*. <http://www.theguardian.com/world/2015/mar/11/syrians-refuge-brazil-latin-america-war-refugees> [16 Maret 2015]

pelanggaran atas kemanusiaan, kejahatan perang, terlibat dalam tindakan terorisme, dan melakukan jual-beli narkoba.

Brasil tidak memiliki kebijakan resmi mengenai implementasi pasal 28 Konvensi UNHCR 1951 yang mengatur tentang pengecualian untuk mereka yang memiliki kondisi mirip dengan pengungsi, tetapi CONARE mengajukan Resolusi Normatif 13 (*Normative Resolution 13*) pada 23 Maret 2007 yang mengatur mengenai situasi khusus kepada Dewan Imigrasi Nasional. Berdasarkan resolusi tersebut, permintaan status pengungsi yang tidak dapat memenuhi persyaratan resmi yang disebutkan dalam Undang-undang Nasional Pengungsi 9.474/1997 dapat dievaluasi oleh Dewan Imigrasi Nasional dalam rangka untuk memberikan status pengungsi permanen berdasarkan kondisi kemanusiaan.

Kebijakan Brasil menyatakan bahwa anak di bawah umur harus memiliki pendamping, sedangkan UNHCR mengatakan bahwa setiap anak, baik memiliki wali atau tidak, harus diurus permohonannya sebagai pengungsi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Brasil mempekerjakan pegawai yang berfungsi sebagai wali mereka sehingga proses permohonan status pengungsi mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak menjadi korban pelanggaran ketika mereka berusaha mendapat hak-hak yang seharusnya diberikan. Permasalahan yang muncul dari kebijakan ini adalah jumlah pegawai pendamping yang terkadang tidak sesuai dengan jumlah pengungsi anak-anak yang ada. Pada akhirnya mereka harus menunggu ketersediaan pegawai wali dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan.<sup>94</sup>

Sedangkan hak yang dapat diperoleh oleh para pengungsi yang tinggal di Brasil, pertama adalah permohonan untuk memberikan status pengungsi kepada keluarga (kerabat dan keturunan) dan anggota keluarga yang lain yang berada di wilayah Brasil. Kedua, menerima dokumen yang diperlukan sebagai pengungsi

---

<sup>94</sup> Liliana Lyra Jubilut dan Silvia Menicucci de Oliveira Selmi Apolinário. *Op. Cit.* hal. 36-37

(nomor registrasi, nomor pajak, izin kerja, dan paspor). Ketiga, pengungsi dapat memohon izin tinggal permanen setelah menetap di Brasil selama empat tahun atau apabila pengungsi memiliki kerabat kewarganegaraan Brasil dan memiliki keturunan yang lahir di wilayah Brasil.<sup>95</sup> Pasal 12 Konvensi UNHCR 1951 menyebutkan mengenai hak para pengungsi untuk mendapatkan akses yang bebas dan pendampingan dalam pengadilan dari negara penerima. Aturan mengenai akses ke pengadilan yang menyangkut pelanggaran dan ancaman terhadap hak pengungsi, tidak tertulis dalam Undang-undang Nasional Pengungsi, namun diatur oleh Konstitusi Federal. Akibat dari permasalahan ini adalah lemahnya yurisprudensi bagi pengungsi sehingga kasus yang berkaitan dengan pengungsi akan dilimpahkan kembali ke CONARE oleh hakim federal.<sup>96</sup> Hal ini tidak berarti pemerintah tidak bertanggung jawab mengenai keamanan pengungsi di wilayah Brasil, namun memiliki pengertian bahwa pemerintah mengembalikan kasus yang tidak sanggup mereka atasi kepada pihak yang lebih ahli.

Dalam BAB II pasal 35 Konvensi UNHCR 1951 menyebutkan bahwa negara harus bekerja sama dengan pihak PBB dalam hal ini UNHCR dan organisasi lainnya yang melibatkan diri dalam mengatur pengungsi. Pemerintah juga harus membantu UNHCR dalam menyediakan data dan informasi (mengenai kondisi pengungsi, implementasi dari Konvensi UNHCR 1951, dan peraturan pemerintah) sebagai laporan ke PBB. Brasil sudah memenuhi pasal ini dengan melakukan kerja sama dengan UNHCR, CONARE, dan berbagai NGO lokal lainnya yang membantu menyediakan fasilitas bagi para pengungsi yang ada di Brasil.

---

<sup>95</sup> UNHCR. 2012. *Op. Cit.* hal. 22-30.

<sup>96</sup> Liliana Lyra Jubilut dan Silvia Menicucci de Oliveira Selmi Apolinário. *Op. Cit.* hal. 34

#### 2.4 Resettlement Pengungsi Suriah di Brasil

Pengungsi di Brasil dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan negara asal, jenis kelamin, dan lokasi geografi mereka. Hal ini terjadi di kota besar seperti São Paulo dan Rio de Janeiro dimana kebanyakan pengungsi tinggal. Program *resettlement* di Brasil merupakan program yang memiliki pengarahannya darurat dan proyek khusus bagi wanita. Strategi *resettlement* di Brasil bersifat terdesentralisasi berdasarkan kotamadya masing-masing yang bekerja sama dengan UNHCR.<sup>97</sup>

Brasil dan UNHCR menandatangani *Macro Agreement for the Resettlement of Refugees in Brazil* pada tahun 1999 yang menyebutkan bahwa proses *resettlement* di Brasil dilakukan oleh tiga pihak, yaitu pemerintah, masyarakat sipil, dan UNHCR. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam membuat persyaratan dokumen dan layanan publik bagi pengungsi, baik di level nasional dan federal.<sup>98</sup> *Resettlement* pengungsi pertama kali dilakukan oleh Brasil pada tahun 2002, ketika menerima 23 penduduk Afganistan yang diberi tempat tinggal di Rio Grande do Sul. Akan tetapi, terdapat kesenjangan antara pengungsi Afganistan dengan penduduk Brasil karena masih belum memiliki pengalaman yang cukup mengenai proses *resettlement* yang membuat 14 orang pengungsi tersebut pindah ke negara lain. Pemerintah dan UNHCR berusaha memperbaiki proses *resettlement* yang ada dengan cara belajar dari pengalaman internasional dan pelatihan bagi pejabat dan relawan.<sup>99</sup>

UNHCR mencatat terdapat lebih dari tiga juta warga Suriah yang berstatus sebagai pengungsi sampai akhir tahun 2014.<sup>100</sup> Mereka tersebar di berbagai

<sup>97</sup>UNHCR Global Appeal. 2007. *Latin America (Mexico Plan of Action)*. <http://www.unhcr.org/455443b30.pdf> [8 Juni 2015]

<sup>98</sup>UNHCR. 2013. *Country Chapters-UNHCR Resettlement Handbook*. <http://www.refworld.org/pdfid/52a077620.pdf> [4 Juni 2015]

<sup>99</sup>Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto dan Renato Zerbini Ribeiro Leão. 2010. *Brazil And The Spirit Of Cartagena*. <http://www.fmreview.org/disability-and-displacement/luiz-paulo-teles-ferreira-barreto-and-renato-zerbini-ribeiro-leao> [4 Juni 2015]

<sup>100</sup>Laman resmi UNHCR. <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php> [26 Februari 2015]

negara yang salah satunya adalah Brasil yang telah menerima pengungsi Suriah sejak tahun 2011 ketika konflik pertama kali terjadi.<sup>101</sup> Kementerian Keadilan mencatat terdapat sekitar 8.300 pengungsi Suriah yang mencari perlindungan ke Brasil pada tahun 2014.<sup>102</sup>

Brasil memberikan bantuan berupa visa kemanusiaan bagi penduduk Suriah yang berupaya untuk mencari perlindungan di wilayah mereka sejak September 2013. Pencari suaka dapat mengajukan permohonan visa kemanusiaan kepada otoritas konsulat jenderal terdekat di tempat tinggal mereka. CONARE menyatakan bahwa kedutaan Brasil di negara-negara tetangga Suriah akan bertanggung jawab mengenai visa perjalanan warga Suriah yang ingin pergi ke Brasil. Brasil hanya memberikan visa ini untuk jangka waktu dua tahun setelah pengungsi secara resmi meminta permohonan kepada Brasil dan visa ini hanya dapat diperpanjang untuk dua tahun berikutnya, setelah itu pengungsi Suriah dapat mengajukan izin tinggal permanen kepada pemerintah Brasil.<sup>103</sup>

Visa kemanusiaan ini juga akan diberikan kepada anggota keluarga mereka yang tinggalnya terpisah di negara-negara tetangga Suriah. Visa Kemanusiaan merupakan hasil dari Resolusi Normatif 17 (*The Normative Resolution 17*) yang dibuat oleh CONARE. Brasil merupakan negara pertama di regional Amerika yang mengeluarkan kebijakan ini. Melalui visa tersebut, penduduk Suriah dapat dengan mudah masuk dan tinggal di Brasil sambil mengurus perpindahan (*resettlement*) mereka.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> Fox News Latino. 2013. *Syrian Refugees Flock To Latin America As World Ponders Taking Action Against Assad*. <http://latino.foxnews.com/latino/news/2013/09/06/syrian-refugees-flock-to-latin-america-as-worlds-ponders-taking-action-against/> [26 Februari 2015]

<sup>102</sup> Joshua Barajas. 2015. *Syrians Now Largest Refugee Group In Brazil*. <http://www.pbs.org/newshour/rundown/syrians-now-largest-refugee-group-brazil/> [17 Maret 2015]

<sup>103</sup> Consulate General Of Brazil In Beirut. 2013. *Humanitarian Visa - Basic Information*. <http://www.cgbrasil.org/Templates/InsideTemplate.aspx?PostingId=465> [13 Maret 2015]

<sup>104</sup> UNHCR. 2013. *UN Refugee Agency Welcomes Brazil Announcement Of Humanitarian Visas For Syrians*. <http://www.unhcr.org/524555689.html> [27 Februari 2015]

Ketika para pengungsi telah sampai di wilayah Brasil, mereka akan dibantu oleh NGO untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. NGO akan mengidentifikasi latar belakang budaya mereka dan mencari fasilitas perumahan. Program tersebut didanai oleh UNHCR dan berlaku untuk 12 bulan. Setelah membantu mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak, NGO akan membantu pengungsi dalam pelatihan bahasa dan pelatihan kerja. Pemerintah Brasil juga memiliki program khusus bagi pengungsi yang mengalami cacat fisik dan mental, sesuai dengan amanat Undang-undang Pengungsi 1997.<sup>105</sup>



Gambar 2.1 Pengungsi Suriah Mempelajari Bahasa Portugis

(sumber: AFP. 2015. *Fleeing War, Syrian Refugees Seek New Life In Brazil*. <http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-2992814/Fleeing-war-Syrian-refugees-seek-new-life-Brazil.html> [5 Oktober 2015])

<sup>105</sup> UNHCR (The Government of Brazil). 2011. *Country Chapters-UNHCR Resettlement Handbook*. <http://www.refugeelaidinformation.org/sites/srlan/files/fileuploads/Brazil-Resettlement.pdf> [13 Juni 2015]

### BAB 3. HUBUNGAN BRASIL DENGAN SURIAH

#### 3.1 Kedatangan Penduduk Suriah ke Brasil

Hubungan Brasil dengan Suriah pertama kali dimulai pada tahun 1876 ketika pemimpin Brasil, Kaisar Pedro II mengunjungi negara-negara Timur Tengah, yaitu Suriah, Lebanon, dan Palestina dengan tujuan mengajak rakyat negara tersebut untuk tinggal dan bekerja di Brasil. Brasil membuka industri penyadapan karet dalam jumlah besar pada saat itu dan mereka membutuhkan pekerja dengan jumlah yang banyak. Kesempatan kerja tersebut terbuka bagi para pekerja yang terlatih dan tidak terlatih. Selain itu, Brasil tidak mengizinkan adanya perbudakan, berbeda dengan kebanyakan negara yang lainnya sehingga para pendatang bebas melakukan pekerjaan yang mereka inginkan, termasuk berdagang.<sup>106</sup>

Brasil membuat kebijakan bebas masuk bagi semua orang yang ingin mencari pekerjaan, kecuali bagi golongan kulit hitam dan gipsi pada 1890. Pada faktanya Konstitusi 1891 menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi tidak diperbolehkan, namun pada praktiknya warga Brasil melakukan tindakan rasial. Mereka menganggap bahwa imigran asal Eropa-lah yang dapat membangun negara mereka. Hal ini dikarenakan Brasil ingin membangun negara dengan sistem demokrasi, dalam perihal tersebut Eropa adalah model yang paling baik.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Eliane Fersan. 2010. *Syro-Lebanese Migration (1880-Present): "Push" and "Pull" Factors*. <http://www.mei.edu/content/syro-lebanese-migration-1880-present-%E2%80%9Cpush%E2%80%9D-and-%E2%80%9Cpull%E2%80%9D-factors> [4 Februari 2015]

<sup>107</sup> Julio Bittencourt Francisco. 2015. Syrian And Lebanese Immigrants And The Expulsion Of Foreigners In The Beginning Of 20th Century. *International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) Volume 1, Issue 4*. <http://ijhcschiefeditor.wix.com/ijhcs#!volume1-issue4/ck4r> [30 Maret 2014] hal. 4

Tindakan diskriminasi tersebut tidak menghalangi imigran asal Suriah untuk datang ke Brasil. Imigran dari Suriah datang pertama kali di wilayah utara dan timur Brasil pada akhir abad ke-18.<sup>108</sup> Jumlah imigran asal Suriah yang datang ke Brasil adalah sebanyak 107,135 orang pada periode 1884-1939.<sup>109</sup> Mereka datang dengan membawa paspor Turki dan disebut *turcos* (orang Turki) karena pada saat itu bangsa Turki menguasai wilayah Suriah.<sup>110</sup> Mereka baru dikenal sebagai orang dari Suriah ketika Perang Dunia I berakhir yang pada saat itu Kesultanan Utsmani runtuh dan Perancis yang pada saat itu menjajah Timur Tengah mendirikan negara Suriah dan Lebanon.<sup>111</sup>

Selain adanya undangan dari Brasil, faktor pendorong migrasi rakyat Suriah adalah terjadinya perang sipil antara penduduk muslim dengan penduduk Kristen.<sup>112</sup> Suriah merupakan bagian dari *The Great Syria* bersama dengan Lebanon dan berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1800-an. Kesultanan Turki Utsmani memberikan kebijakan otonomi kepada penduduk di wilayah Gunung Lebanon yang terbagi menjadi mayoritas penduduk Kristen, dan minoritas golongan *Druze* dan muslim. Kesultanan Turki mulai merasa terancam dengan kaum Kristen ketika jumlah penduduk Kristen meningkat dan terjadi intervensi oleh bangsa Eropa pada 1840. Kesultanan Turki dibantu oleh penduduk *Druze* melakukan pembunuhan massal pada 10.000 warga Kristen yang membuat masyarakat Kristen merasa tidak aman sehingga mereka memilih untuk meninggalkan wilayah Suriah. Selain dikarenakan takut kepada Kesultanan Turki, migrasi penduduk Kristen ke Brasil dipicu oleh kedatangan misionari protestan

---

<sup>108</sup> Maha Karim. 2010. *Syria and Brazil - Mutual History Paves Way to the Future*. <http://www.english.globalarabnetwork.com/201006226309/Economics/syria-and-brazil-mutual-history-paves-way-to-the-future.html> [4 Februari 2015]

<sup>109</sup> Montie Bryan Pitts Jr. 2006. *Op. Cit.* hal. 3.

<sup>110</sup> Thalia Rahme. 2014. *A Syrian in Brazil: An Interview With Global Voices Contributor Rami Alhames*. <http://globalvoicesonline.org/2014/08/17/a-syrian-in-brazil-an-interview-with-global-voices-contributor-rami-alhames/> [6 Februari 2015]

<sup>111</sup> Montie Bryan Pitts Jr. *Op. Cit.* hal. 9

<sup>112</sup> Salam Kawakibi. 2010. *The Migration of Syrian Christians*. <http://www.mei.edu/content/migration-syrian-christians> [8 Februari 2015]

dari Eropa pada tahun 1830 yang mengajarkan tentang dunia barat sehingga banyak penduduk Kristen Suriah yang tertarik dengan benua Amerika ketika mendengar tentang adanya peluang ekonomi.<sup>113</sup>

Kedatangan imigran Suriah ke Brasil meningkat setelah terjadi Perang Dunia I. Kesultanan Turki mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pemuda Kristen untuk mengikuti pelatihan militer, namun mereka mengalami penyiksaan oleh pemimpin beragama Islam di kamp militer sehingga pada akhirnya berusaha melarikan diri ke luar negeri. Kebanyakan dari mereka melarikan diri ke Brasil karena mereka mengetahui ada kerabat mereka yang tinggal di sana. Ketika Perang Dunia I berakhir dan negara Eropa sedang melakukan perbaikan negara pascaperang, masyarakat Suriah berharap mereka mendapatkan kehidupan dan perlakuan lebih baik daripada kesultanan Turki. Banyak dari mereka yang berusaha mencari pekerjaan di Lebanon, namun Lebanon yang saat itu berada di bawah kekuasaan Perancis, mengalami krisis ekonomi karena keterlibatan Perancis dalam Perang Dunia I. Krisis yang dialami Lebanon mendorong para migran untuk mencari tempat baru yang aman, terutama untuk bekerja. Mereka memilih untuk pergi ke Brasil karena banyak warga keturunan Suriah yang sudah menetap di sana.

Tidak semua imigran Suriah menjadikan Brasil sebagai tujuan perjalanan mereka. Banyak penduduk Suriah yang datang ke Brasil karena mereka gagal memasuki wilayah Amerika Serikat akibat dari masalah kesehatan. Di sisi lain, banyak awak kapal laut yang berusaha menghindari biaya perjalanan dari Amerika Serikat ke Timur Tengah dengan sengaja menurunkan mereka ke wilayah Brasil. Mereka juga menjual tiket kapal laut ke Amerika Selatan tanpa sepengetahuan calon penumpang dengan mengatakan bahwa mereka akan mengantar penumpang ke Amerika Serikat. Banyak imigran Suriah yang sampai

---

<sup>113</sup> Montie Bryan Pitts Jr. *Op. Cit.* hal. 7

ke Brasil, menduga bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari Amerika Serikat. Pada akhirnya Brasil menjadi tujuan perpindahan mereka setelah mereka meraih banyak keuntungan dan mereka mulai mengundang kerabat mereka yang ada di Suriah untuk datang ke Brasil.<sup>114</sup>

Adanya jaringan komunikasi antara masyarakat Suriah di Brasil dan kerabat mereka yang ada di Suriah sendiri membangun informasi yang mana orang-orang di Suriah mengetahui adanya peluang ekonomi di Brasil. Skema ini menjamin adanya pemenuhan tenaga kerja sehingga pendatang akan secara pasti mendapatkan pekerjaan. Pendatang baru dari Suriah akan mengambil barang dari kerabat mereka untuk dijual secara keliling sampai pada akhirnya mereka sanggup untuk membuka gerai mereka sendiri. Peningkatan perdagangan dan ekonomi mereka selanjutnya, terus menarik minat warga Suriah lainnya untuk datang ke Brasil.<sup>115</sup>

Kebanyakan imigran Suriah bekerja sebagai pedagang keliling, menjual perhiasan dan tekstil setelah sampai di Brasil. Berdagang merupakan hal yang baru di Brasil pada saat itu sehingga tidak mengancam mata pencaharian penduduk asli Brasil sebagai petani, dengan demikian para imigran diterima dengan baik oleh penduduk asli Brasil. Mereka berjualan berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya karena tidak memiliki modal yang cukup untuk membangun tempat berjualan secara permanen, selain itu berdagang keliling dapat menghasilkan keuntungan dengan lebih cepat daripada bertani dan bekerja di pabrik. Imigran Suriah juga terkenal ramah dalam berdagang, ketika konsumen mereka tidak dapat membayar lunas secara langsung, mereka memberikan kredit kepada konsumen. Akan tetapi, setelah mereka memiliki modal yang cukup, mereka akan membangun pertokoan dengan bangunan permanen. Selain berdagang keliling, beberapa migran Suriah bekerja pada bidang industri

---

<sup>114</sup> *Ibid.* hal. 14.

<sup>115</sup> Julio Bittencourt Francisco. *Op. Cit.* hal. 3

transportasi, seperti sopir bus dan membuka Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), juga membuka usaha di bidang komunikasi, yaitu menerbitkan surat kabar.<sup>116</sup>

Imigran asal Suriah membuat surat kabar menggunakan bahasa Arab yang pertama kali diterbitkan di São Paulo pada tahun 1885. Mereka berhasil memproduksi sebanyak 394 jurnal, majalah, dan surat kabar pada periode 1885-1940. Berita yang ditulis dalam surat kabar berfokus pada isu-isu yang terjadi di Timur Tengah, terutama di mengenai dominasi Turki atas Suriah dan Lebanon. Setelah Turki runtuh, mereka menulis berita mengenai upaya westernisasi Suriah di bawah protektorat Perancis.<sup>117</sup> Pada akhirnya isu yang ditulis mulai berkembang ke arah kehidupan imigran Suriah di Brasil. Beberapa pihak dari pemerintahan Brasil menganggap bahwa keberadaan surat kabar berbahasa arab merupakan tanda bahwa wilayah mereka dipenuhi oleh kebudayaan asing.

Ketika bisnis yang dikelola oleh para imigran semakin berkembang dan menghasilkan keuntungan yang besar, beberapa dari para imigran berusaha bergabung dengan perkumpulan para pengusaha asli Brasil, namun tidak diterima dengan baik. Elit Brasil lebih menyukai orang-orang dari Eropa, terutama Balkan, karena mereka ingin membangun Brasil untuk menjadi seperti Eropa yang makmur dan demokratis. Setelah ditolak oleh elit-elit Brasil, imigran Suriah berusaha mendirikan perkumpulan mereka sendiri. Perkumpulan yang mereka bentuk bernama *The Esporte Clube Sírio* yang terbentuk pada 1917. Mereka juga membentuk perkumpulan yang diberi nama dengan nama-nama kota di Suriah, seperti *Club Homs* yang berdiri pada 1921 dan *Clube Aleppo*. Selain mendirikan organisasi, mereka juga mendirikan tempat ibadah mereka sendiri karena mereka tidak diterima untuk beribadah di gereja orang Brasil asli.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Montie Bryan Pitts Jr. *Op. Cit.* hal. 10.

<sup>117</sup> Julio Bittencourt Francisco. *Op. Cit.* hal. 8

<sup>118</sup> Montie Bryan Pitts Jr. *Loc. Cit.*

Jumlah imigran Suriah yang datang ke Brasil mengalami penurunan pada tahun 1930, ketika Brasil melakukan kebijakan pembatasan jumlah imigran. Pemerintah Brasil membuat aturan ini karena adanya kedatangan pekerja asing dalam jumlah besar mulai mengancam kestabilan sosial dan ekonomi domestik. Para pekerja yang datang kebanyakan tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik sehingga merugikan pemerintah Brasil yang memberikan subsidi pada pekerja asing. Selain merugikan perekonomian pemerintah, kedatangan pekerja yang tidak memiliki kemampuan memadai menimbulkan kriminalitas dan konflik dengan penduduk asli sehingga pada akhirnya penduduk Brasil yang tidak setuju dengan kedatangan para pekerja tersebut, melakukan protes agar pemerintah mengubah kebijakan imigrasi.<sup>119</sup>

Pemerintah kembali memberikan izin untuk kedatangan imigran pada akhir tahun 1940, ketika Perang Dunia II telah berakhir. Kedatangan imigran Suriah meningkat ketika terjadi perang Yom Kippur antara Israel dan Suriah pada tahun 1973.<sup>120</sup> Konflik militer, terorisme, pengrusakan infrastruktur, dan penurunan kesempatan kerja dan pendidikan menjadi alasan utama bagi para imigran untuk meninggalkan Suriah. Pada migrasi periode ini, jumlah imigran Suriah yang mendatangi Brasil tidak sebanyak pada periode pertama, ketika migrasi baru dilakukan. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk pindah ke negara di sekitar Teluk Persia yang pada saat itu sedang melaksanakan penambangan minyak besar-besaran. Fakta lainnya mengenai imigrasi yang dilakukan setelah Perang Dunia II adalah kebanyakan imigran merupakan kaum muslim dari golongan Sunni dan Siah, berbeda dengan migrasi tahun 1930-an yang didominasi oleh kaum kristen. Imigran yang mendatangi

---

<sup>119</sup> Blanca Sánchez-Alonso. 2010. *Making Sense Of Immigration Policy: Argentina, 1870-1930*. [http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/9737/wp\\_10\\_14.pdf;jsessionid=2DDB0C4228A3B1A57501EAED5EC244E9?sequence=1](http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/9737/wp_10_14.pdf;jsessionid=2DDB0C4228A3B1A57501EAED5EC244E9?sequence=1) [24 Maret 2015] hal. 5.

<sup>120</sup> Elliot M. Repko. 2007. The Israeli-Syrian Conflict: Prospects for a Resolution. *The Journal of International Policy Solutions Volume 7*. <http://irps.ucsd.edu/assets/012/6361.pdf> [24 Maret 2015] hal. 26

Brasil pada tahun 1980-an kebanyakan memilih bekerja sebagai pedagang keliling, sama seperti pendahulu mereka. Mereka menjual handuk dan sapu tangan kepada lingkungan kelas pekerja dan warga miskin di São Paulo.<sup>121</sup>

Migrasi orang-orang Suriah ke Brasil terus berlanjut ketika terjadi konflik antara pemerintah dengan rakyat sipil di Suriah pada tahun 2011. Pada waktu itu, penduduk Suriah yang datang ke Brasil memiliki status sebagai pengungsi.<sup>122</sup> Mereka memilih Brasil sebagai negara tujuan pengungsian karena Brasil memiliki komunitas rakyat Suriah dalam jumlah besar, selain itu kondisi pengungsian di Lebanon, Irak, Yordania, Turki, dan Mesir semakin memprihatinkan. Para pengungsi yang berjumlah 2,9 juta orang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Negara-negara tersebut pun telah menyampaikan bahwa mereka tidak sanggup menerima pengungsi dari Suriah yang jumlahnya semakin banyak karena para pengungsi yang datang menyebabkan krisis ekonomi dan politik di negara mereka.<sup>123</sup>

### 3.2 Hubungan Politik Brasil dengan Suriah

Brasil memiliki perkembangan ekonomi yang bagus dalam kurun sepuluh tahun terakhir. Selama pemerintahan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), Brasil mampu mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan mendapatkan surplus perdagangan.<sup>124</sup> Brasil sebagai negara penghasil etanol terbesar di dunia memiliki peran yang penting dalam bidang energi. Selain mengubah kebijakan dalam negeri, Presiden Lula da

---

<sup>121</sup> Montie Bryan Pitts Jr. *Op. Cit.* hal. 28.

<sup>122</sup> Karin Fusaro dan Luiz Fernando Godinho. 2013. *Hands Across The Water: Brazil's Large Syrian Community Absorbs Refugees*. <http://reliefweb.int/report/brazil/hands-across-water-brazils-large-syrian-community-absorbs-refugees> [6 Pebruari 2015]

<sup>123</sup> Shiva Pedram. 2014. *Syrian Refugee Crisis Threatens Stability in the Middle East*. <https://www.americanprogress.org/issues/security/news/2014/08/12/95595/syrian-refugee-crisis-threatens-stability-in-the-middle-east/> [8 Pebruari 2015]

<sup>124</sup> Aldo Musacchio. 2008. *Brazil under Lula: Off the Yellow BRIC Road*. [https://is.muni.cz/el/1423/podzim2010/MVZ454/um/Brazil\\_under\\_Lula.pdf](https://is.muni.cz/el/1423/podzim2010/MVZ454/um/Brazil_under_Lula.pdf) [5 April 2015]

Silva juga menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih aktif. Brasil terus meningkatkan upaya diplomasi, baik dalam ranah regional dan internasional.

Brasil memiliki inisiatif untuk membentuk sebuah institusi besar mengenai perdagangan bebas yang mencakup seluruh wilayah Amerika Latin sehingga terbentuklah Perserikatan Bangsa Amerika Latin/*Unión de Naciones Suramericanas* (UNASUR) pada 23 Mei 2008.<sup>125</sup> Selain itu, di luar regional Amerika Latin, Brasil berusaha membangun hubungan dengan India, Cina, dan Afrika Selatan. Brasil juga berusaha terlibat dengan perpolitikan yang berlangsung di Timur Tengah.<sup>126</sup> Presiden Lula merupakan pemimpin dari Amerika Selatan pertama yang menghadiri pertemuan Liga Arab dan telah melakukan kunjungan negara ke Suriah, Lebanon, Uni Emirat Arab, Mesir, Arab Saudi, Yordania, dan Iran.

Presiden Luiz Inacio Lula da Silva melakukan kunjungan negara ke Suriah pada tahun 2003. Brasil dan Suriah berdiskusi mengenai konflik Israel dengan negara-negara Arab pada kunjungan ketika itu. Suriah meminta dukungan Brasil dalam upayanya untuk meminta Israel mengembalikan Dataran Tinggi Golan yang direbut oleh Israel pada Perang Enam Hari di tahun 1967.<sup>127</sup> Suriah mencoba merebut kembali melalui serangan militer pada 1974, namun upaya mereka gagal. Setelah gagal dalam cara militer, Suriah berusaha memperjuangkan Dataran Tinggi Golan dengan cara damai, yaitu melalui mediasi dan meminta dukungan dari negara lain, seperti Turki dan Brasil.<sup>128</sup>

---

<sup>125</sup> Petr Kašpar. 2011. *The logic of UNASUR: Its Origins and Institutionalization*. [http://projekter.aau.dk/projekter/files/53154638/The\\_LOGIC\\_OF\\_UNASUR.pdf](http://projekter.aau.dk/projekter/files/53154638/The_LOGIC_OF_UNASUR.pdf) [6 April 2015]

<sup>126</sup> Giselle Datz and Joel Peters. 2013. Brazil and the Israeli–Palestinian Conflict in the New Century: Between Ambition, Idealism, and Pragmatism. *Israel Journal of Foreign Affairs VII*: 2. <http://www.israelcfr.com/documents/7-2/7-2-5-GiselleDatz-and-JoelPeters.pdf> [9 April 2015] hal. 44.

<sup>127</sup> BBC News. 2003. *Lula Backs Syria on Disputed Land*. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3286463.stm> [12 April 2015]

<sup>128</sup> The Guardian. 2008. *Timeline: Israel, Syria and the Golan Heights*. <http://www.theguardian.com/world/2008/may/21/golan.background> [12 April 2015]

Suriah meminta bantuan Brasil untuk menyampaikan pada Israel bahwa Suriah ingin melakukan pertemuan dengan perwakilan Israel untuk membicarakan mengenai Dataran Tinggi Golan. Turki juga bersedia menjadi mediator untuk Suriah dan Israel. Ketika Menteri Luar Negeri Brasil menyampaikan niat Suriah, Israel sudah menanggapi dengan positif mengenai gagasan Suriah untuk melakukan dialog, akan tetapi dialog tersebut tidak tercapai karena Israel melakukan serangan kepada 13 kapal aktivis pendukung Palestina yang akan memberikan bantuan logistik ke Gaza pada 2010.<sup>129</sup>

Presiden Suriah, Bashar al-Assad, mendatangi Brasil untuk pertama kalinya pada Juni 2010 sebagai kunjungan balasan dan dalam rangka memperkuat hubungan Suriah dengan Brasil yang memiliki penduduk keturunan Suriah dalam jumlah besar, berkisar antara tiga sampai empat juta orang.<sup>130</sup> Dalam pertemuan tersebut, Presiden Suriah meminta bantuan Brasil untuk membantu mencapai perdamaian di Timur Tengah yang sedang berkonflik dengan Israel. Presiden Suriah berharap Brasil dapat membantu negara-negara Arab untuk berdamai dengan Israel yang sedang berusaha menguasai Gaza.<sup>131</sup> Konflik antara negara Arab dan Israel telah berlangsung sejak tahun 1880 ketika masyarakat Yahudi mendatangi wilayah Palestina setelah kembali dari migrasi mereka di Eropa Timur. Pada saat itu mereka mempunyai tujuan untuk merebut kembali tanah Israel dan menciptakan pemerintahan sendiri.<sup>132</sup> Negara-negara Arab tidak setuju dengan sikap yang dilakukan Israel, oleh karena itu mereka melakukan perlawanan dengan cara anarkis.

<sup>129</sup> Celso Amorim. 2011. Brazil and the Middle East: Reflections on Lula's South-South Cooperation. *Cairo Review* 2. <http://www.aucegypt.edu/GAPP/CairoReview/Lists/Articles/Attachments/64/Brazil%20and%20the%20Middle%20East.pdf> [12 April 2015] hal. 57.

<sup>130</sup> Zee News. 2010. *Syria's President Begins Latin America Tour*. [http://zeenews.india.com/news/world/syrias-president-begins-latin-america-tour\\_636484.html](http://zeenews.india.com/news/world/syrias-president-begins-latin-america-tour_636484.html) [9 Pebruari 2015]

<sup>131</sup> Reuters. 2010. *Syria Wants Brazil To Help Negotiate Mideast Peace*. <http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/syria-wants-brazil-to-help-negotiate-mideast-peace-1.298642> [29 Maret 2015]

<sup>132</sup> Benny Morris. 2008. *1948: A History of the First Arab-Israeli War*. New Haven: Yale University Press. Hal. 1-3.

PBB melibatkan diri dengan mengeluarkan resolusi pada November 1947 yang isinya adalah pembagian wilayah bagi Israel dan negara Arab. Hasil dari resolusi ini adalah bahwa daerah Palestina diserahkan kepada Israel, wilayah Gaza untuk Mesir, dan Tepi Barat merupakan bagian dari Yordania.<sup>133</sup> Israel merebut daerah Gaza dan Gurun Sinai dari Mesir, serta Dataran Tinggi Golan dari Suriah. Masyarakat Palestina yang tinggal di wilayah Gaza menolak keberadaan militer Israel. Rakyat Palestina mengalami pelanggaran hak politik dan HAM, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan media, dan kebebasan untuk berkumpul. Israel melarang rakyat Palestina untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan nasionalisme, termasuk melarang masyarakat untuk memasak makanan khas Palestina. Israel melakukan kekerasan dalam menegakkan aturan di Gaza. Komunitas internasional sudah melakukan berbagai peringatan kepada Israel, namun peringatan tersebut diabaikan.<sup>134</sup>

Secara spesifik, Brasil berusaha melibatkan diri sebagai mediator dalam upaya untuk mencapai perdamaian antara Israel dengan Palestina. Brasil menyelenggarakan berbagai kunjungan negara pada pemerintahan Presiden Lula, termasuk kunjungan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Presiden Israel Shimon Peres. Presiden Peres merupakan pemimpin Israel pertama yang melakukan kunjungan ke Brasil pada 2009. Kunjungannya adalah bertujuan untuk mendiskusikan mengenai pengembangan nuklir Iran dan membahas potensi kerja sama ekonomi dan politik antara Brasil dengan Israel.<sup>135</sup> Brasil dan Israel memiliki perjanjian kerja sama dalam bidang keamanan yang mana pengusaha asal Israel menguasai ekspor teknologi keamanan ke Brasil. Pemerintah Brasil menyebutkan apabila impor Brasil kepada Israel pada tahun 2013 jumlahnya

---

<sup>133</sup> *Ibid.* hal. 396.

<sup>134</sup> Joel Beinin dan Lisa Hajjar. 2014. *Primer on Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict*. [http://www.merip.org/sites/default/files/Primer\\_on\\_Palestine-Israel%28MERIP\\_February2014%29final.pdf](http://www.merip.org/sites/default/files/Primer_on_Palestine-Israel%28MERIP_February2014%29final.pdf) [4 April 2015] hal. 7

<sup>135</sup> Taylor Barnes. 2009. *Why is Israel's Shimon Peres in Brazil and Argentina? Iran*. <http://www.csmonitor.com/World/Global-News/2009/1110/why-is-israels-shimon-peres-in-brazil-and-argentina-iran> [10 April 2015]

mencapai satu milyar dolar yang meliputi *drones*, sistem radar dan anti-misil, peralatan untuk patroli perbatasan, dan berbagai alat elektronik untuk keamanan lainnya.<sup>136</sup> Selain menjalin kerja sama di bidang keamanan, Brasil berusaha mencapai kerja sama di bidang ekonomi, yaitu dengan mengajukan wacana mengenai perdagangan bebas antara Israel dengan *Mercado Común del Sur/Southern Common Market* (Mercosur), sebuah organisasi regional yang beranggotakan Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela.<sup>137</sup>

Untuk menyeimbangkan hubungan antara Israel dengan Palestina, Brasil membuka perwakilan diplomat di wilayah Palestina, yaitu Ramallah dan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat pada Desember 2010. Pengakuan resmi Brasil terhadap Palestina merupakan permintaan dari Presiden Abbas kepada Presiden Lula pada 24 November 2010. Brasil menganggap dengan memberikan pengakuan kepada Palestina, maka upaya perdamaian yang berusaha untuk dicapai antara Israel dengan Palestina. Selain itu, sudah ada lebih dari seratus negara di dunia yang memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai negara berdaulat, ketika Brasil melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan negara lain, maka Brasil melakukan tindakan yang benar. Brasil mendukung upaya rakyat Palestina untuk membangun negara aman, bersatu, demokratis, dan stabil secara ekonomi yang dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel.<sup>138</sup>

Selain berdiskusi mengenai perang Arab-Israel, pertemuan antara pemimpin Brasil dan Suriah di kota Brasilia pada 2010 juga membahas mengenai pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran. Presiden Assad memuji Brasil atas keberhasilannya bersama dengan Turki dalam menjalin perjanjian dengan Iran

---

<sup>136</sup> Alvirte Singh Ningthoujam. 2014. *FIFA World Cup 2014: A Gateway to Israel-Brazil Defence Ties*. <http://isssp.in/tag/israel-brazil-military-cooperation/> [10 April 2015]

<sup>137</sup> Giselle Datz and Joel Peters. *Loc. Cit*

<sup>138</sup> Merco Press. 2010. *Brazil Recognized The State Of Palestine Based On Borders Before 1967*. <http://en.mercopress.com/2010/12/04/brazil-recognized-the-state-of-palestine-based-on-borders-before-1967> [10 April 2015]

untuk melakukan kesepakatan dengan *Vienna Group* (Rusia, Amerika Serikat, Perancis, dan *International Atomic Energy Agency/IAEA*) dan mengembangkan nuklir untuk kegiatan yang damai dan bermanfaat bagi manusia.<sup>139</sup> Presiden Assad berpendapat perjanjian yang dilakukan dapat menjadi solusi bagi pengayaan uranium Iran dan stabilitas politik di Timur Tengah.<sup>140</sup>

Presiden Suriah juga menemui Ketua Majelis Rendah Brasil, Michel Temer, dan Ketua Majelis Tinggi Brasil, Jose Sarney. Dalam pertemuan tersebut mereka membahas mengenai komunitas keturunan Suriah yang bertempat tinggal di Brasil. Presiden Assad berpendapat bahwa anggota parlemen Suriah dan Brasil harus saling melakukan kunjungan kerja untuk mempererat hubungan kedua negara. Presiden Assad juga terkesan dengan adanya partai politik dalam parlemen Brasil yang mewakili komunitas Suriah di Brasil (*Brazil-Syria Group*). Adanya komunitas keturunan Suriah di Brasil akan meningkatkan kerja sama antara kedua negara, terlebih lagi komunitas Suriah di Brasil memiliki citra yang positif.<sup>141</sup> Warga Brasil keturunan Suriah mulai melakukan kegiatan politik pada akhir tahun 1940 ketika terjadi re-demokratisasi di Brasil sehingga banyak memunculkan partai politik baru. Warga keturunan Suriah berusaha meraih posisi baik di tingkat negara bagian dan federal. Jumlah mereka terus meningkat setiap tahun yang mana 5 orang terpilih sebagai anggota parlemen federal pada pemilihan 1946 dan 1950, 14 orang pada 1954, 20 orang pada 1958, dan 23 orang pada 1962. Brasil memiliki 50 delegasi (10% dari jumlah kursi) keturunan Suriah dalam tingkat federal pada 1994.<sup>142</sup>

---

<sup>139</sup> Julian Borger. 2010. *Text of The Iran-Brazil-Turkey Deal*. <http://www.theguardian.com/world/julian-borger-global-security-blog/2010/may/17/iran-brazil-turkey-nuclear> [15 April 2015]

<sup>140</sup> DPA dan Haaretz Service. *Syria Slam Israel over Gaza Flotilla, Blockade*. <http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/brazil-syria-slam-israel-over-gaza-flotilla-blockade-1.299260> [15 April 2015]

<sup>141</sup> SNS.SY. 2010. *Assad Meets Brazilian Senate, House Speakers and Syrian Community*. <http://sns.sy/sns/?path=news/read/16439> [15 April 2015]

<sup>142</sup> Montie Bryan Pitts Jr. *Op. Cit.* hal. 27.

Pertemuan Brasil dan Suriah selanjutnya dilakukan pada Pebruari 2011 ketika Carlos Martins Ceglia, Direktur dari Divisi Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Brasil, bertemu dengan Fayssal Mikdad, Wakil Menteri Luar Negeri Suriah yang membahas mengenai sudut pandang Suriah dalam konflik dalam negeri dan keinginan Brasil untuk menjalin hubungan bilateral dengan Suriah. Suriah berpendapat bahwa dalam konflik yang terjadi di negara mereka, pemerintah hanya berusaha untuk mencapai kepentingan nasional dan menampung apresiasi rakyat. Sedangkan mengenai kerja sama, Brasil dan Suriah berharap melalui hubungan bilateral, negara di Amerika Selatan dan Timur Tengah dapat membangun kerja sama komprehensif agar kedua negara dapat berpacu dengan perubahan politik dan ekonomi dunia.<sup>143</sup> Menanggapi konflik sipil di Suriah, Ceglia mengatakan bahwa Brasil tidak akan ikut campur karena hal itu merupakan urusan dalam negeri.<sup>144</sup>

### 3.3 Hubungan Ekonomi Brasil dengan Suriah

Suriah membeli biji kopi, gula, kertas, dan besi batangan dari Brasil, sedangkan Brasil mengimpor minyak dan rempah-rempah (jinten, adas manis, dan wijen) dari Suriah. Neraca perdagangan Brasil menunjukkan adanya defisit sejumlah 70 juta dolar Amerika dalam perdagangannya dengan Suriah, sebaliknya Suriah mengalami surplus sebesar 6,2 juta dolar Amerika pada 2002.<sup>145</sup> Dalam rangka untuk meningkatkan nilai ekspor ke Suriah, Presiden Da Silva melakukan kunjungan ke Suriah bersama dengan empat Gubernur dan empat puluh

---

<sup>143</sup> ANBA. 2011. *Brazil Promotes Visit To Syria*. [http://www2.anba.com.br/noticia\\_diplomacia.kmf?cod=11525091&indice=70](http://www2.anba.com.br/noticia_diplomacia.kmf?cod=11525091&indice=70) [9 Pebruari 2015]

<sup>144</sup> Moqawama.org. 2011. *Syria: Million Man Rally Support Reforms, Friends Reject Foreign Intervention, More Terrorists Arrested*. <http://www.english.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=15554&cid=540#.VS3YBixyH60> [15 April 2015]

<sup>145</sup> Agencies. 2003. *Brazil's President in Syrian Talks*. <http://www.arabnews.com/node/241092> [30 April 2015]

pengusaha Brasil pada tahun 2003.<sup>146</sup> Pengusaha Suriah dan Brasil menghadiri seminar ekonomi yang bertujuan agar mereka dapat melihat peluang bisnis yang ada dan memotivasi mereka untuk melakukan investasi di negara berkembang.<sup>147</sup>

Gula merupakan produk ekspor Brasil yang utama di Suriah. Suriah membeli gula dari Brasil senilai 678 juta dolar Amerika pada periode Januari-Juni 2006. Brasil dan Suriah juga melakukan kerja sama dalam membangun pabrik gula di kota Homs, Suriah, pada tahun 2006. Pembangunan pabrik tersebut didukung oleh Crystalsev, sebuah perusahaan Brasil, *Cargill Africa*, Nagib Assaf, seorang pengusaha Suriah, serta sebuah perusahaan keuangan dari Suriah. Dalam proyek ini Crystalsev menguasai saham sebanyak 10%, sedangkan *Cargill* memiliki saham sebanyak 40%.<sup>148</sup>

Presiden Assad melakukan kunjungan negara ke Brasil pada Juni 2010 dengan agenda mempererat hubungan diplomatik, kerja sama teknologi, upaya perluasan perdagangan (terutama gula), dan mencari investasi. Brasil dan Amerika Latin pada umumnya merupakan negara tujuan utama Presiden Assad untuk menjalin kerja sama demi membangun kembali perekonomian Suriah setelah produksi minyak menurun dan terjadi kekeringan berkepanjangan yang membuat petani mengalami gagal panen. Amerika Latin merupakan partner kerja sama yang tepat setelah usaha kerja sama Suriah dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa gagal untuk diwujudkan karena keterlibatan Suriah dengan kelompok Hizbullah dari Palestina yang dianggap teroris oleh Amerika Serikat.<sup>149</sup> Presiden Assad berupaya untuk mendapatkan investasi senilai 44 milyar dolar Amerika dari Brasil untuk pembangunan infrastruktur di Suriah. Suriah yakin bahwa kerja sama

---

<sup>146</sup> Gretchen Small. 2003. *Brazil's Global Diplomacy Builds Bridges, But to What?*. [http://www.larouchepub.com/eiw/public/2003/eirv30n50-20031226/eirv30n50-20031226\\_044-brazils\\_global\\_diplomacy\\_builds.pdf](http://www.larouchepub.com/eiw/public/2003/eirv30n50-20031226/eirv30n50-20031226_044-brazils_global_diplomacy_builds.pdf) [30 April 2015]

<sup>147</sup> Agencies. *Loc. Cit.*

<sup>148</sup> ANBA. 2006. *Brazilian Sugar Company Builds Refinery in Syria*. <http://www.brazzil.com/38-2006/july-2006/6875-brazilian-sugar-company-builds-refinery-in-syria> [27 April 2015]

<sup>149</sup> Angela Ramirez. 2010. *Implications of Syrian President Bashar Al-Assad's Latin American Tour*. <http://csis.org/blog/implications-syrian-president-bashar-al-assad%E2%80%99s-latin-american-tour> [1 Mei 2015]

ekonomi dengan Brasil akan berjalan dengan lancar karena Brasil merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk keturunan Suriah yang cukup besar, terlebih lagi para ekspatriat tersebut memiliki bisnis yang cukup sukses.<sup>150</sup>

Kedutaan Brasil di Damaskus mengadakan forum ekonomi pada November 2010 di kota Damaskus, Suriah dan kemudian membentuk Dewan Bisnis Suriah-Brasil (*Syrian-Brazilian Business Council*) pada November 2010 di kota Damaskus, Suriah. Dewan tersebut diikuti oleh 70 pengusaha Brasil yang berasal dari berbagai bidang, termasuk industri konstruksi dan makanan. Tujuan dari pembentukan dewan ini adalah untuk mempererat kerja sama ekonomi bilateral dan perdagangan, serta meningkatkan kesempatan untuk berinvestasi, baik di Suriah dan Brasil.

Fokus dalam forum ini adalah reformasi ekonomi Suriah yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir dan upaya mereka dalam meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara di seluruh dunia dan memperluas ranah investasi. Melalui forum tersebut pemerintah Suriah menjelaskan mengenai fasilitas yang diberikan kepada pebisnis dan kebijakan-kebijakan yang ada serta penciptaan lingkungan bisnis di Suriah yang sesuai untuk investasi.<sup>151</sup> Reformasi ekonomi dari sosialis menjadi liberalis merupakan salah satu program Presiden Bashar al-Assad ketika menjabat sebagai presiden menggantikan ayahnya.<sup>152</sup>

Forum tersebut juga dihadiri oleh pejabat penting dari jajaran kementerian Suriah dan Brasil. Melalui forum tersebut Wakil Menteri Ekonomi Suriah, Abdullah al-Dardari, mengajak para pengusaha Brasil berkeliling Suriah untuk menunjukkan wilayah mana saja yang sesuai untuk melakukan investasi.

---

<sup>150</sup> Damascus (Reuters). 2010. *Syria's Assad Seeks Investment in Latin America*. <http://www.alarabiya.net/articles/2010/06/25/112260.html> [1 Mei 2015]

<sup>151</sup> Amal Hasson. 2010. *Syria, Brazil Launch Business Council to Encourage Economic, Trade Cooperation*. <http://www.english.globalarabnetwork.com/201011308249/Economics/syria-brazil-launch-business-council-to-encourage-economic-trade-cooperation.html> [12 April 2015]

<sup>152</sup> Agencies. 2011. *Profile: Bashar al-Assad (Syrian President Has Ruled For More Than 10 Years)*. <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2007/07/200852518514154964.html> [1 Mei 2015]

Pemerintah Suriah akan mempermudah pengusaha Brasil yang ingin melakukan investasi di Suriah dengan cara mempermudah pengurusan visa bagi para pengusaha. Dengan diadakannya kegiatan tersebut diharapkan dapat terjalin kerja sama dalam bidang insfrakstruktur, jaringan listrik, dan saluran pipa gas dan minyak antara Brasil dan Suriah. Wakil Menteri Ekonomi mengatakan bahwa Suriah mengagumi keberhasilan Brasil dalam membuat kebijakan ekonomi dan sosial sehingga mampu mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, serta mencapai kesejahteraan melalui hubungan ekonomi yang beragam. Suriah berharap dapat meraih pertumbuhan ekonomi sama seperti Brasil oleh karena itu Suriah menginginkan untuk dapat segera menandatangani kerja sama perdagangan bebas antara Suriah dengan Mercosur. Menanggapi hal ini, Menteri Pembangunan, Industri, dan Perdagangan Brasil, Miguel Horge Filho, mengatakan bahwa kerja sama antara Suriah dengan Mercosur dapat dilaksanakan setidaknya enam bulan kemudian. Dalam kesempatan tersebut Suriah juga mempresentasikan rencana pembangunan lima tahun dengan investasi sebesar 45 milyar dolar Amerika.

Menteri Filho menyampaikan bahwa kerja sama antara kedua negara akan mampu meningkatkan volume perdagangan menjadi lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai perdagangan Brasil ke Suriah sebesar 240% atau sebanyak 313 juta dolar Amerika pada periode 2002-2008. Ekspor Brasil ke Suriah mengalami peningkatan sebesar 84,2% dibandingkan tahun sebelumnya pada 2010. Demikian pula dengan Suriah yang mengalami peningkatan ekspor ke Brasil sebesar 27,8% atau sejumlah 4,4 juta dolar Amerika pada periode yang sama.<sup>153</sup>

---

<sup>153</sup> Amal Hasson. *Loc. Cit.*

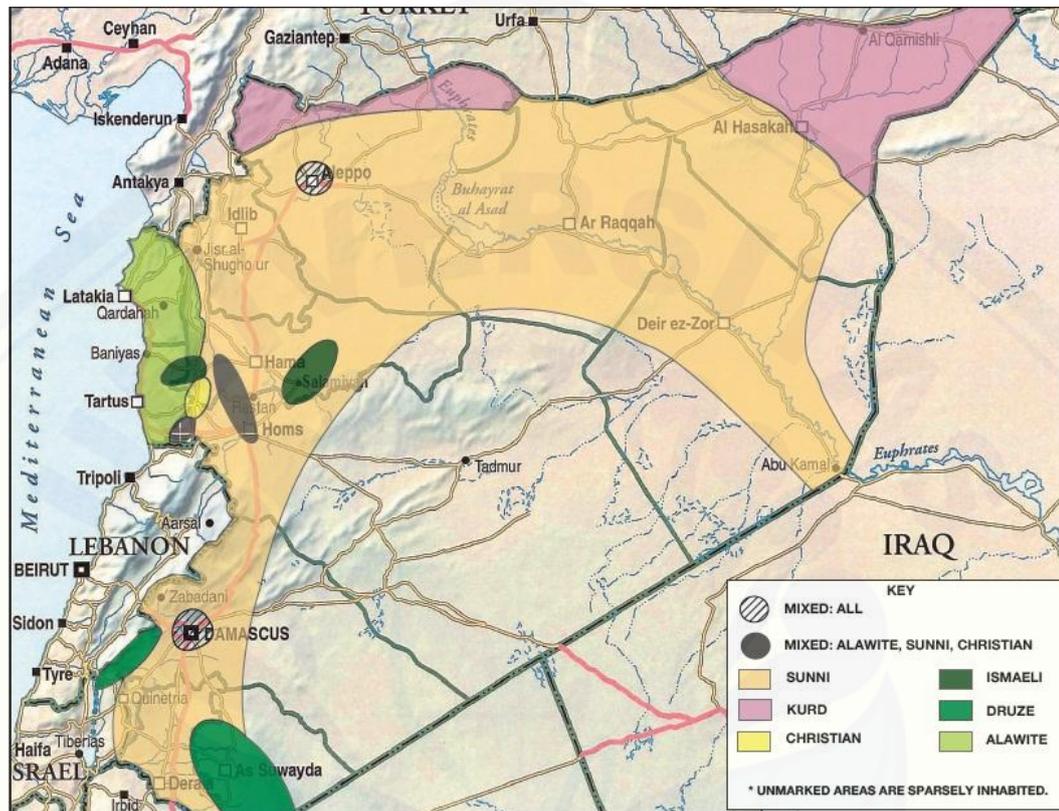
## **BAB 4. FAKTOR YANG MENDORONG BRASIL UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PENGUNSI SURIAH**

### **4.1 Permasalahan Keamanan Manusia Pengungsi Suriah dan Dedikasi Brasil terhadap Keamanan Manusia**

Sama seperti perang yang terjadi di Libya dan *Arab Spring* di Mesir dan Tunisia, para demonstran di Suriah menginginkan adanya perubahan rezim di negara mereka. Sistem pemerintahan di Suriah memiliki karakter kesultanan dimana terdapat monopoli pada pemerintahan dan setiap proses politik oleh satu pihak. Sejak Bashar al-Assad dilantik sebagai presiden pada tahun 2000, masyarakat mengharapkan adanya reformasi politik dan ekonomi. Meskipun pemerintahan Presiden Bashar mulai melakukan perubahan sistem politik yang ditandai dengan pembebasan beberapa tahanan politik, masyarakat masih tidak merasa puas dengan sistem pemerintahan yang ada.

Suriah merupakan negara yang terdiri dari beberapa golongan agama, yaitu golongan minoritas Syiah, Alawite, Kristen, dan mayoritas Sunni. Pada masa penjajahan Perancis di tahun 1963, golongan Alawite yang mendirikan partai politik (Partai Ba'ath) berhasil melakukan kudeta sehingga mereka memiliki kekuasaan politik. Kelompok Kristen dan Sunni yang terlibat dalam kegiatan bisnis memiliki hubungan yang dekat dengan Partai Ba'ath. Terdapat kesenjangan antar golongan di Suriah dimana golongan Alawite memiliki hak istimewa, sedangkan golongan Kurd dan Sunni mayoritas mengalami diskriminasi. Reformasi ekonomi dan politik yang dilakukan oleh rezim Presiden Bashar dengan melakukan liberalisasi membuat golongan Sunni merasa terdeskriminasi

karena subsidi bagi mereka menjadi semakin berkurang.<sup>154</sup> Diskriminasi tersebut pada akhirnya berkembang menjadi konflik sipil.



Gambar 4.1 Penyebaran Wilayah Golongan Agama di Suriah  
(sumber: Joseph Holliday. 2011. *The Struggle for Syria in 2011*.  
*Middle East Security Report 2*. Washington DC: Institute for  
The Study of War)

Konflik sipil di Suriah berawal dengan adanya protes dari masyarakat kepada pemerintah pada 26 Januari 2011 dan berubah menjadi konflik serius pada 18 Maret 2011. Demonstrasi dimulai di kota Dera'a, sebuah kota agraris yang terletak di perbatasan Suriah-Yordania dan memiliki mayoritas penduduk Sunni. Protestor merusak kantor cabang Partai Ba'ath (partai Presiden Assad) dan

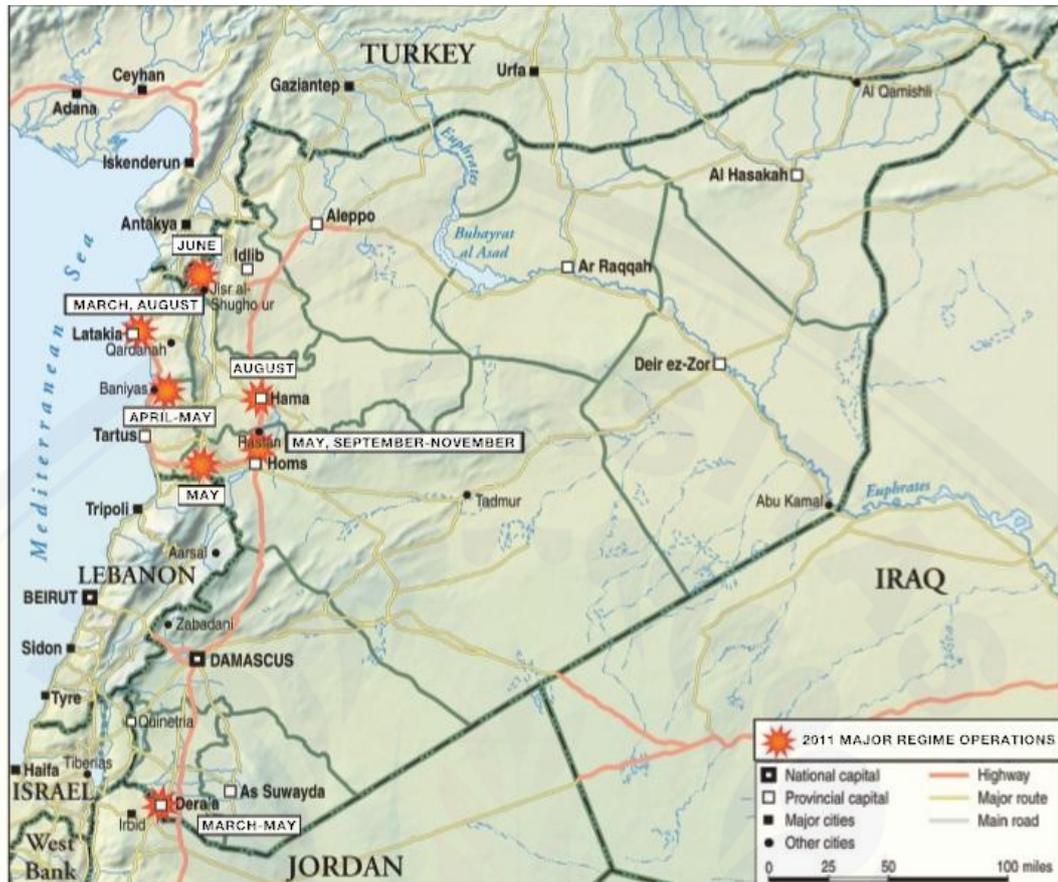
<sup>154</sup> Christopher Phillips. *Op. Cit.* hal. 37-40

beberapa bangunan pemerintah pada 18 Maret 2011 setelah mereka selesai melakukan ibadah salat Jumat. Pemerintah Suriah merespon tindakan ini dengan cara agresif, yaitu mengirimkan tentara militer dengan harapan protes dapat berakhir dengan cepat dan tidak menyebar ke kota lain. Akibat bentrokan antara militer dengan masyarakat sipil, 15 orang meninggal dunia.

Upaya pemerintah dengan menggunakan pihak militer ternyata gagal untuk meredakan protes karena demonstrasi terjadi di hampir seluruh kota besar di Suriah. Seminggu setelah bentrok di Dera'a, yaitu pada tanggal 25 Maret 2015, protes terjadi di Latakia. Pada bulan April, konflik mulai terjadi di Banias (10 April 2015) dan Homs (17 April 2015). Pada bulan Mei, konflik terjadi di Damaskus, Banias (6 Mei 2015), dan Tell Kalakh (14 Mei 2015). Pada bulan Juni terjadi konflik di kota Jisr al-Shughour yang mana pemerintah melaporkan 120 tentara tewas.<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> Joseph Holliday. *Op. Cit.* hal. 12-13



Gambar 4.2 *Timeline* Penyebaran Konflik di Suriah

(sumber: Joseph Holliday. 2011. *The Struggle for Syria in 2011*.

*Middle East Security Report 2*. Washington DC: Institute for  
The Study of War)

Media internasional juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya konflik Suriah. Media internasional merupakan pembentuk opini negara sehingga beberapa dari pemerintah menganggap bahwa keterlibatan militer untuk melawan masyarakat sipil membuat konflik tersebut sebagai konflik sipil. Mereka menganggap perlu adanya campur tangan dari pihak internasional untuk mengatasi konflik yang terjadi, sedangkan beberapa pihak yang lain menganggap

bahwa konflik sipil yang bersifat sektarian sehingga tidak perlu adanya keterlibatan dari masyarakat internasional.<sup>156</sup>

Konflik ini telah menyebabkan lebih dari 200.000 korban jiwa dari tahun 2011 sampai 2014. Dari jumlah tersebut, 130.000 orang merupakan pejuang anti-pemerintah, 63.074 masyarakat sipil, dan 10.377 adalah anak-anak.<sup>157</sup> Selain itu terdapat 3.948.393 penduduk Suriah menjadi pengungsi di seluruh dunia, terutama di Mesir, Irak, Yordania, Turki, dan Afrika bagian Utara. Lebih dari separuh dari mereka adalah wanita dan anak-anak.<sup>158</sup> Mereka berada di bawah pengawasan UNHCR dan pemerintah negara tujuan.

Para pengungsi tersebut mengalami berbagai macam pelanggaran *human security* yang menyebabkan mereka menderita. Keamanan mereka semakin terancam ketika negara-negara yang menjadi tujuan utama mereka dalam mencari perlindungan memberikan batasan bagi mereka dalam mengakses sarana dan prasarana yang ada. Mereka kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan, terutama pengungsi dengan penyakit yang kronis dan membutuhkan perawatan medis memadai, seperti, diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 terdapat satu juta pengungsi yang membutuhkan pelayanan kesehatan, tetapi mereka menghadapi masalah dari sistem. Negara tujuan tidak dapat menyediakan dana untuk kesehatan dalam jumlah besar yang sanggup mencakupi jumlah pengungsi yang ada. Selain itu jumlah pengungsi yang memasuki wilayah negara tujuan jumlahnya semakin

---

<sup>156</sup> Maya Bhardwaj. 2012. Development of Conflict in Arab Spring Libya and Syria: From Revolution to Civil War. *Washington University International Review*. Vol. 1. [http://pages.wustl.edu/files/pages/imce/migration/wuir\\_spring\\_2012.pdf#page=76](http://pages.wustl.edu/files/pages/imce/migration/wuir_spring_2012.pdf#page=76) hal. 84-87 [24 Juni 2015]

<sup>157</sup> AFP. 2014. *Syria Death Toll Now Exceeds 200,000: Monitor*. <http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/12/02/Syria-death-toll-now-exceeds-200-000-monitor-.html> [24 Juni 2015]

<sup>158</sup> UNHCR. 2015. *Syria Regional Refugee Response*. <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php> [24 Juni 2015]

banyak, membuat akses untuk pelayanan kesehatan menjadi semakin terbatas.<sup>159</sup> Kemiskinan dan kondisi penampungan yang tidak bersih membuat pengungsi berisiko tinggi untuk terkena alergi, asma, dan bronkitis akut.<sup>160</sup>

Akibat harus meninggalkan Suriah secara paksa, para pengungsi tersebut mendapat ancaman dari kelompok lain karena kondisi mereka yang lemah. Mereka mengalami diskriminasi dan tidak adanya perlindungan resmi dari pemerintah negara tujuan. *Human Rights Watch* mencatat terdapat 11 serangan kekerasan dengan menggunakan pistol dan senjata tajam yang ditujukan oleh pengungsi oleh sekelompok penduduk Lebanon pada bulan Agustus-September 2014.<sup>161</sup> Anak-anak juga mengalami ancaman personal dalam hal perburuhan. Pengungsi anak-anak Suriah di Yordania memiliki risiko tinggi mengalami kekerasan dan eksploitasi. Lima belas persen pengungsi anak-anak terlibat dalam perburuhan yang kebanyakan bekerja di bidang pertanian.<sup>162</sup>

---

<sup>159</sup> UN News Centre. 2013. *Syrian Refugees Straining Health Services In Region, UN Warns In New Report*. <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44761#.VYtdJaPDVcC> [25 Juni 2015]

<sup>160</sup> Benedetta Berti. 2015. *The Syrian Refugee Crisis: Regional And Human Security Implications. Strategic Assessment*. Vol. 17 No. 4. Hal. 45 [http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/adkan17\\_4ENG\\_7\\_Berti.pdf](http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/adkan17_4ENG_7_Berti.pdf) [25 Juni 2015]

<sup>161</sup> Human Rights Watch. 2014. *Lebanon: Rising Violence Targets Syrian Refugees*. <http://www.hrw.org/news/2014/09/30/lebanon-rising-violence-targets-syrian-refugees> [25 Juni 2015]

<sup>162</sup> UN Women. 2013. *Inter-Agency Assessment: Gender-Based Violence And Child Protection Among Syrian Refugees In Jordan, With A Focus On Early Marriage*. Amman: Peace and Security UN Women. Hal. 3



Gambar 4.3 Data Pengungsi Suriah sampai Agustus 2015

(sumber: Vox. 2015. *The Syrian Refugee Crisis, Explained In One Map.*

<http://www.vox.com/2015/9/27/9394959/syria-refugee-map>

[5 Oktober 2015])

Terdapat 1.114.000 pengungsi Suriah yang mendatangi wilayah Lebanon sampai akhir Agustus 2015 yang mana 1.113.941 diantaranya telah teregistrasi atau sedang memproses registrasi oleh UNHCR. Kedatangan mereka telah

mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi penduduk Lebanon. Sejak kedatangan pengungsi pada tahun 2011, jumlah pengangguran di Lebanon terus mengalami peningkatan dari 8,1% pada tahun 2010 menjadi 10,6% pada 2012. Lebanon juga mengalami krisis keuangan sebesar 2,7 milyar dolar Amerika pada periode 2012-2014. Perlindungan sosial terus mengalami penurunan kualitas dan tidak dapat mencapai sasaran dengan benar karena kapasitas yang dimiliki pemerintah kurang memadai. Kementerian Sosial Lebanon mengalami kesulitan karena permintaan pelayanan kesehatan dan sosial dari pengungsi Suriah mengalami peningkatan 40%.<sup>163</sup>

Yordania tidak termasuk dalam negara yang meratifikasi Konvensi UNHCR 1951 dan Protokol 1967<sup>164</sup>, namun sampai bulan Agustus 2015 terdapat 629.200 pengungsi Suriah di wilayah Yordania. Jumlah pengungsi tersebut setara dengan 10% populasi di Yordania dan mereka sangat mempengaruhi perekonomian dan kehidupan masyarakat lokal. Perekonomian Yordania merupakan salah satu yang terkecil di Timur Tengah. Yordania mengimpor 90% sumber energinya, termasuk air dan gandum. Tingginya harga minyak dan bahan makanan yang dibeli dari Mesir, pertumbuhan investasi yang lambat, dan kedatangan pengungsi Suriah yang terus bertambah memberi dampak negatif terhadap perekonomian Suriah.<sup>165</sup> Akibat dari krisis ekonomi tersebut, Yordania memperketat persyaratan terhadap pengungsi Suriah yang akan memasuki wilayahnya.<sup>166</sup> Krisis yang melanda Yordania membuat mereka menghentikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi Suriah sejak November 2014.<sup>167</sup>

<sup>163</sup> UNHCR. 2013. *Countries Hosting Syrian Refugees: Solidarity And Burden-Sharing*. <http://www.unhcr.org/525fe3e59.html> [27 Mei 2015] hal. 2-8.

<sup>164</sup> UNHCR. 2015. *UNHCR Global Appeal 2015 Update: Jordan*. <http://www.unhcr.org/5461e6070.html> [31 Mei 2015] hal. 1

<sup>165</sup> UNHCR. 2013. *Countries Hosting Syrian Refugees: Solidarity And Burden-Sharing*. <http://www.unhcr.org/525fe3e59.html> [27 Mei 2015] hal. 10

<sup>166</sup> Luigi Achill. 2015. *Syrian Refugees in Jordan: A Reality Check*. [http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/34904/MPC\\_2015-02\\_PB.pdf?sequence=1](http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/34904/MPC_2015-02_PB.pdf?sequence=1) [31 Mei 2015] hal. 7

<sup>167</sup> Timea Fauszt. 2015. *Syria Crisis: Health Threats For Refugees Living On The Fringe*. <http://www.rescue.org/blog/syria-crisis-health-threats-refugees-living-fringe> [25 Juni 2015]

Pengungsi Suriah yang mencari perlindungan di Yordania memiliki harta benda yang sedikit dan 34% dari mereka adalah wanita yang memiliki anak-anak. Para wanita tersebut memiliki kemampuan yang kurang untuk masuk dalam pasar kerja Yordania. Kondisi tersebut membuat mereka kesulitan mendapatkan akses makanan. Krisis ekonomi dan fakta bahwa Yordania mengimpor sebagian besar sumber pangan mereka membuat mereka kesulitan untuk memberikan perlindungan pada pengungsi Suriah.<sup>168</sup>

Turki merupakan negara yang menerima pengungsi Suriah dengan jumlah paling banyak, yaitu 1.939.000. Mereka terkonsentrasi di wilayah selatan Turki. Pemerintah Turki menyediakan 21 kamp pengungsian untuk menampung mereka dan mengeluarkan dana sebesar dua milyar dolar Amerika. Konflik dan kedatangan pengungsi Suriah memiliki dampak yang buruk bagi perekonomian dan tunjangan sosial bagi masyarakat Turki. Turki merupakan salah satu investor terbesar di Suriah dengan jumlah investasi sebesar 260 juta dolar Amerika pada 2011.

Irak masih dalam pemulihan setelah invasi Amerika Serikat dan konflik saudara, namun beban Irak semakin bertambah dengan kedatangan pengungsi dari Suriah. Sebanyak 248.503 pengungsi tercatat oleh UNHCR mendatangi wilayah Suriah sampai Agustus 2015. Pemerintah Irak memiliki tantangan yang sulit karena harus memastikan bahwa proses perdamaian dan pembangunan yang selama ini sedang berlangsung dapat dicapai dengan baik tanpa ada pengaruh dari pengungsi Suriah, meskipun kedatangan mereka mempengaruhi perekonomian Irak, terutama di wilayah Kurdistan yang jumlah penganggurannya meningkat dan harga barang menjadi semakin mahal.

---

<sup>168</sup> WFP. 2015. *Syrian refugees and food insecurity in Iraq, Jordan and Turkey: Secondary Literature and Data Desk Review*. Hal. 34  
[https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC8QFjAB&url=https%3A%2F%2Fdata.unhcr.org%2Fsyrianrefugees%2Fdownload.php%3Fid%3D2762&ei=wGCLVdiUKtDjuQTopo\\_YDw&usg=AFQjCNETJc4Llc8PTSoAqsOe8szXULjzvQ&bv=m=96782255,bs.1,d.c2E&cad=rja](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC8QFjAB&url=https%3A%2F%2Fdata.unhcr.org%2Fsyrianrefugees%2Fdownload.php%3Fid%3D2762&ei=wGCLVdiUKtDjuQTopo_YDw&usg=AFQjCNETJc4Llc8PTSoAqsOe8szXULjzvQ&bv=m=96782255,bs.1,d.c2E&cad=rja) [25 Juni 2015]

Mesir memproyeksikan sebanyak 100.000 orang pengungsi akan mendapat perlindungan dari mereka pada tahun 2013, namun pada faktanya ada sebanyak 132.376 yang berada di Mesir pada 2015. Ketersediaan pangan merupakan masalah utama bagi pengungsi Suriah di Mesir karena harga pangan semakin tinggi dengan persediaan yang terbatas sementara itu, pendapatan mereka tetap. UNHCR, pemerintah, *United Nation Children's Fund* (UNICEF), dan organisasi *World Food Programme* (WFP) terus berusaha untuk mencari jalan keluar mengenai pangan dengan memberi bantuan di wilayah termiskin.<sup>169</sup>

Selain mencari perlindungan di negara yang berbatasan dengan Suriah, terdapat banyak pengungsi yang berusaha mencari perlindungan ke negara-negara Eropa, terutama Jerman, Perancis, dan Inggris. Keberadaan mereka menimbulkan krisis pengungsi yang parah, terutama Yunani, Austria, dan Hungaria. Dalam periode Januari-Agustus 2015, sebanyak 350.000 pengungsi berusaha memasuki wilayah Eropa. Kebanyakan dari mereka masuk secara ilegal melalui Turki lalu menyebrang ke pulau-pulau kecil di Yunani dan setelah itu menempuh perjalanan darat ke Jerman melalui Makedonia, Serbia, dan Hungaria. Beberapa rela untuk menempuh perjalanan yang lebih sulit dengan perahu dari Libya ke Italia. Selama perjalanan tersebut banyak terjadi kekerasan dan mereka harus membayar mahal kepada pemilik perahu.

Uni Eropa memiliki masalah dalam penyamaan aturan tentang pengungsi. Setiap negara anggota memiliki kebijakan sendiri dan penerimaan pengungsi semakin sulit dilakukan karena adanya krisis ekonomi. Jerman merupakan negara Uni Eropa yang paling banyak menerima pengungsi, yaitu 800.000 orang pada 2015. Sementara Perancis dan Inggris yang termasuk ke dalam negara besar di Eropa, masing-masing hanya menerima 24.000 dan 20.000 pengungsi. Sedangkan

---

<sup>169</sup> UNHCR. 2013. *Countries Hosting Syrian Refugees: Solidarity And Burden-Sharing*. <http://www.unhcr.org/525fe3e59.html> [27 Mei 2015] hal. 13-23

Yunani dan Italia yang sedang mengalami krisis ekonomi menerima 100.000 pengungsi.<sup>170</sup>



Gambar 4.4 Rute Perjalanan Pengungsi Suriah ke Eropa

(sumber: BBC. 2015. *Why Is EU Struggling With Migrants And Asylum?*.

<http://www.bbc.com/news/world-europe-24583286> [5 Oktober 2015])

Krisis pengungsi Suriah menjadi perhatian pihak internasional akibat banyaknya pelanggaran kemanusiaan yang terjadi. Ketika negara Eropa bermasalah dalam harmonisasi penerimaan pengungsi, Brasil menerima seluruh pengungsi yang berusaha meminta perlindungan ke wilayah mereka. Presiden

<sup>170</sup> BBC. 2015. *Why Is EU Struggling With Migrants And Asylum?*. <http://www.bbc.com/news/world-europe-24583286> [5 Oktober 2015]

Dilma Rousseff mengatakan bahwa Brasil ingin mengembalikan kembali kehidupan mereka seperti sebelum konflik terjadi dan bersedia memberikan pekerjaan dan tempat tinggal bagi mereka.<sup>171</sup>

Perlindungan Brasil terhadap pengungsi terus mengalami peningkatan setiap tahun, hal ini dapat diukur dari meningkatnya jumlah pengungsi yang diterima oleh pemerintah. Secara keseluruhan, Brasil menerima 1.138 pengungsi pada tahun 2011, 2.008 pengungsi pada 2012,<sup>172</sup> dan bertambah menjadi 5.200 pengungsi pada 2013.<sup>173</sup> Kesiapan suatu negara untuk menerima pengungsi berbanding lurus dengan komitmennya terhadap keadilan dan norma-norma kemanusiaan. Adanya pemberian bantuan dana untuk luar negeri, pengakuan terhadap pengungsi (*recognition rate*), dan pengeluaran dana sosial domestik merupakan suatu indikator bahwa negara memiliki komitmen terhadap kemanusiaan.<sup>174</sup>

Dalam ranah domestik, pemerintah melaksanakan program *bolsa familia* yang telah dilakukan sejak tahun 2003. *Bolsa familia* merupakan bantuan dana tunai untuk masyarakat tidak mampu untuk mengurangi kesenjangan yang merupakan masalah utama di Brasil. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan program *Brazil Sem Miséria (Brazil Without Misery)*, sebuah program lanjutan dari *bolsa familia* yang berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perbaikan infrastruktur pada tahun 2011. Melalui program-program tersebut,

<sup>171</sup> AFP. 2015. *Latin American Nations Offer to Take in Syria Refugees*. <http://www.ticotimes.net/2015/09/08/brazil-welcomes-syrian-refugees-with-open-arms-president-says> [6 Oktober 2015]

<sup>172</sup> UNHCR Brasil. Tanpa Tahun. *Asylum in Brazil: A Statistical Review (2010-2012)*. [http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Asylum\\_in\\_Brazil\\_-\\_A\\_statistical\\_review\\_2010-2012.pdf?view=1](http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Asylum_in_Brazil_-_A_statistical_review_2010-2012.pdf?view=1) [2 Juni 2015]

<sup>173</sup> Marina Estarque dan Karina Gomes. 2014. *Asylum Seekers Continue Search For Support In Brazil*. <http://www.dw.de/asylum-seekers-continue-search-for-support-in-brazil/a-17369877> [2 Juni 2015]

<sup>174</sup> Eiko R. Thielemann. 2006. *Burden Sharing: The International Politics of Refugee Protection*. [http://ccis.ucsd.edu/wp-content/uploads/WP\\_134.pdf](http://ccis.ucsd.edu/wp-content/uploads/WP_134.pdf) [9 Juni 2015]. hal. 12

Brasil mampu untuk mengentaskan 28 juta penduduk dari kemiskinan pada tahun 2012.<sup>175</sup>

Sejak Presiden Lula da Silva menduduki jabatan presiden pada tahun 2003, Brasil berusaha memperkuat kerja sama dengan negara selatan dimana Brasil berperan sebagai pemberi bantuan kerja sama dalam pembangunan. Pemerintah Brasil lebih memilih disebut sebagai partner daripada donor karena Brasil menganggap bahwa kerja sama yang mereka lakukan berbeda dengan kerja sama utara-selatan.<sup>176</sup> Kerja sama utara-selatan memiliki kelemahan yang terletak pada perbedaan *power* kedua negara. Perbedaan budaya membuat adanya persepsi tujuan dan pendapat antara negara utara dan selatan. Prioritas pembangunan lebih sering dibentuk oleh negara utara dan kepentingan negara utara mendominasi kepentingan negara selatan. Pada akhirnya perbedaan tersebut membuat program kerja sama menjadi tidak berkelanjutan karena negara utara menelantarkan proyek yang sedang berlangsung.<sup>177</sup>

Sedangkan kerja sama antar negara selatan tidak mengandung unsur hegemoni politik, sosial, dan ekonomi yang cenderung terdapat dalam kerja sama utara-selatan. Kerja sama tersebut telah mengubah *balance of power* dalam dunia global.<sup>178</sup> Segala bentuk program kerja sama ekonomi, teknologi, dan keuangan dikategorikan sebagai kerja sama internasional (*international cooperation*), bukan bantuan luar negeri (*foreign aid*). Program bantuan luar negeri Brasil tidak hanya terfokus pada pemberian hibah dan hutang, seperti yang didefinisikan oleh *Development Assistance Committee* (DAC) dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), namun juga pada ranah kerja sama

---

<sup>175</sup> Allison O'Connell. *Loc. Cit.*

<sup>176</sup> Cristina Yumie Aoki Inoue dan Alcides Costa Vaz. 2012. Brazil As 'Southern Donor': Beyond Hierarchy And National Interests In Development Cooperation?. *Cambridge Review of International Affairs*, Volume 25, Number 4. London: Routledge. Hal 507-508

<sup>177</sup> Peter Rosseel, dkk. 2007. *Approaches to North-South, South-South and North-South-South Collaboration: A Policy Document*. [https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/229636/1/POLICY\\_PAPER\\_VLIR\\_UWC\\_NS\\_S.pdf](https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/229636/1/POLICY_PAPER_VLIR_UWC_NS_S.pdf) [14 Juni 2015] hal. 13

<sup>178</sup> *Ibid.* hal. 19

ekonomi, bantuan kemanusiaan, partisipasi dalam kegiatan *peacekeeping*, pemberian perlindungan bagi pengungsi, dan kerja sama ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya.

Pemerintah Brasil menyatakan bahwa motivasi utama mereka dalam melakukan *south-south cooperation* adalah solidaritas internasional, meskipun masih ada dorongan dari kepentingan politik dan ekonomi. Promosi multipolaritas, demokrasi, dan perdamaian yang memungkinkan masyarakat Brasil untuk meningkatkan perdagangan dan investasi mereka dalam pasar internasional. Perdagangan dan kerja sama akan membuat negara dapat lebih mengenal satu sama lain sehingga dunia akan menjadi lebih damai. *South-south cooperation* dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk menghindari krisis keuangan dunia dan imbasnya pada negara-negara berkembang.

Bukti dari perubahan kebijakan luar negeri Brasil dalam pemerintahan Presiden Lula da Silva dapat dilihat dari peningkatan total bantuan dana setiap tahun. Pada tahun 2005 total bantuan dana Brasil untuk negara selatan adalah sebesar 158 juta dolar Amerika yang meningkat menjadi 362 juta dolar Amerika pada tahun 2009. Dalam periode 2005-2009, bantuan kemanusiaan meningkat dari 750 ribu dolar Amerika pada 2005 menjadi 43,5 juta dolar Amerika pada tahun 2009.<sup>179</sup> Bentuk kerja sama selatan-selatan Brasil sangat beragam dan memiliki jangkauan yang besar. Contoh kerja sama yang berbentuk multilateral adalah G-77 dan G-20, sedangkan *Brazil, Russia, India, China, South Africa* (BRICS), dan *Mercado Común del Sur* (MERCOSUR) dan *Unión de Naciones Suramericanas* (UNASUR) merupakan upaya integrasi negara Amerika Selatan dalam bidang keuangan, transfer teknologi, pendidikan, dan NGO.<sup>180</sup>

<sup>179</sup> Cristina Yumie Aoki Inoue dan Alcides Costa Vaz. 2012. *Op. Cit.* Hal 508-517

<sup>180</sup> Carlos Milani. 2014. *Brazil's South-South Co-operation Strategies: From Foreign Policy to Public Policy*. <http://www.saiia.org.za/occasional-papers/brazils-south%E2%80%93south-co-operation-strategies-from-foreign-policy-to-public-policy> [14 Juni 2015] hal. 6

Selain itu, kesediaan Brasil untuk menjadi partner bagi negara selatan termotivasi oleh pengalaman Brasil menjadi penerima bantuan dana luar negeri dan keinginan Brasil untuk menentang asumsi tradisional yang menyatakan bahwa hubungan internasional bersifat *zero-sum game* dan merupakan ajang kontestasi kekuatan yang tiada akhir. Presiden Lula da Silva menyatakan bahwa melalui kerja sama selatan-selatan, Brasil berusaha mengedepankan solidaritas dengan negara berkembang dibandingkan dengan keuntungan negara. Upaya kerja sama Brasil tidak memiliki tujuan komersial dan murni berdasarkan kepentingan bersama dan keinginan untuk membantu sama sama lain.<sup>181</sup>

Brasil menjadi fasilitator dalam *UN Human Rights Council* yang memperjuangkan hukuman pelanggaran HAM tidak boleh mempertimbangkan ideologi.<sup>182</sup> Terpilihnya Presiden Rousseff pada Januari 2011 meningkatkan ekspektasi komunitas internasional tentang peran HAM dalam politik luar negeri Brasil. Hal ini tidak terlepas dari sejarah personal Presiden Rousseff yang pernah menjadi tahanan rezim militer. Penurunan angka kemiskinan, kekerasan, dan peningkatan dalam perlindungan wanita serta pendidikan di Brasil menjadi tolok ukur kesuksesan penerapan kebijakan HAM pada ranah dalam negeri dan akan terus berusaha meningkatkan peran dalam menangani masalah HAM di luar negeri.

Presiden Dilma Rouseff melanjutkan program Presiden Lula da Silva dalam menerapkan kebijakan politik luar negeri Brasil. Presiden Rouseff menekankan konsep inklusif multipolarisme. Konsep ini mengakui keberadaan struktur multipolar di dunia yang tetap menjunjung kerja sama multilateral dan mengedepankan pentingnya partisipasi dalam perkembangan ekonomi dan negara

---

<sup>181</sup> Cristina Yumie Aoki Inoue dan Alcides Costa Vaz. 2012. *Op. Cit.* Hal. 527

<sup>182</sup> Adriana Erthal Abdenur dan Danilo Marcondes de Souza Neto. 2013. *Brazil's Development Cooperation With Africa: What Role For Democracy And Human Rights?*. <http://www.surjournal.org/eng/conteudos/pdf/19/02.pdf> [15 Juni 2015]

dalam proses pengambilan keputusan, konsolidasi lembaga negara dalam pemerintahan global, dan demokratisasi dalam sistem internasional.<sup>183</sup>

Dalam bidang *human security*, pemerintahan Presiden Rousseff sangat mendukung konsep diplomasi preventif dan menolak intervensi militer oleh negara besar dalam zona konflik dan mendukung penghapusan pengembangan nuklir oleh negara. Penggunaan instrumen militer untuk mempromosikan HAM bukanlah hal yang tepat karena militer identik dengan kekerasan bersenjata.<sup>184</sup> Presiden Rousseff terus berusaha mempromosikan *responsibility while protecting* yang melengkapinya konsep *responsibility to protect* dengan menentang intervensi militer.

Negara yang menjadi bagian dari berbagai perjanjian dan konvensi mengenai HAM memiliki kecenderungan untuk memberikan suaka.<sup>185</sup> Brasil merupakan negara yang memiliki dedikasi tinggi terhadap penghargaan HAM. Pemerintah telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM, pencegahan *human trafficking* dan perbudakan, serta perlindungan terhadap pengungsi yang menjadi salah satu tujuan utama dalam Program HAM Nasional (*National Program of Human Rights*) pada tahun 1996. Program ini selanjutnya berkembang menjadi Undang-undang Pengungsi 1997 dan berbagai aturan HAM lainnya.

Upaya perlindungan pengungsi di Brasil merupakan yang terbaik di wilayah Amerika Latin karena melibatkan tiga pihak, yaitu: pemerintah yang diwakili oleh CONARE dan berbagai kementerian terkait, masyarakat yang diwakili oleh NGO, dan UNHCR yang memiliki pengaruh besar dalam upaya penempatan pengungsi. Undang-undang yang dimiliki Brasil penuh dengan

---

<sup>183</sup> Diego Santos Vieira de Jesus. 2014. The Benign Multipolarity: Brazilian Foreign Policy Under Dilma Rousseff. *Journal of International Relations and Foreign Policy* Vol. 2, No. 1. [http://aripd.org/journals/jirfp/Vol\\_2\\_No\\_1\\_March\\_2014/2.pdf](http://aripd.org/journals/jirfp/Vol_2_No_1_March_2014/2.pdf) [30 April 2015]

<sup>184</sup> Thijs van Lindert dan Lars van Troost. 2014. *Shifting Power and Human Rights Diplomacy: Brazil*. [https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/rising\\_power\\_brazil.pdf](https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/rising_power_brazil.pdf) [15 Juni 2015]

<sup>185</sup> Mathias Czaika. *Op. Cit.* hal. 16

doktrin mengenai HAM dan menjunjung prinsip *non-refoulement* yang dibuktikan dengan ketika permohonan pengungsi seseorang tidak dikabulkan, maka orang tersebut akan dilimpahkan pada Undang-undang 6815/1980 yang mengatur mengenai WNA.<sup>186</sup>

Komitmen Brasil dalam menjunjung tinggi HAM merupakan refleksi dari prinsip *responsibility to protect*, terutama mengenai aspek *responsibility to react*. Usaha untuk menyingkirkan Presiden Assad dari jabatannya adalah upaya yang tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang dianut oleh Brasil dan hasilnya hanya akan mengarah pada konflik yang kacau balau dan berkepanjangan. Suriah akan mengalami ketidakstabilan politik karena kondisi militer yang lemah dan tidak terorganisasi, oposisi yang tidak tertib, dan perpecahan golongan di antara para demonstran. Penduduk Suriah terdiri dari berbagai golongan, sama seperti Irak dan Libya,<sup>187</sup> yang menyebabkan tingginya potensi terjadi perang saudara setelah konflik sipil berakhir. Dengan demikian perdamaian di Suriah tidak akan dapat tercapai dan keamanan penduduk terus terancam.

Ketika perang antara pemerintah dengan pihak sipil terjadi, Brasil bertindak dengan menerima pengungsi Suriah yang berusaha mencari perlindungan kepada mereka. Cara ini merupakan tindakan yang manusiawi dan dapat mengurangi permasalahan kemanusiaan penduduk Suriah. Brasil memberikan *humanitarian visa* bagi pengungsi yang ingin meninggalkan kamp perlindungan mereka di daerah konflik yang mempermudah pengungsi untuk masuk Brasil sambil menunggu proses *resettlement* mereka.<sup>188</sup> Brasil meyakini

---

<sup>186</sup> Cesar Augusto Silva da Silva. 2013. *Brazil: Human Rights And Environmental Refugees*. [http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-81562013000100008&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-81562013000100008&script=sci_arttext) [3 Juni 2015]

<sup>187</sup> Michael D. Swaine. 2012. *Chinese Views of the Syrian Conflict*. [http://carnegieendowment.org/files/swaine\\_clm\\_39\\_091312\\_2.pdf](http://carnegieendowment.org/files/swaine_clm_39_091312_2.pdf) [8 Juni 2015] hal. 7

<sup>188</sup> UN News Centre. 2013. *UN Welcomes Brazil's Offer Of Humanitarian Visas For Syrians Fleeing Conflict*. <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46079#.VW6mVixyH60> [3 Juni 2015]

bahwa cara ini efektif untuk mencegah kerugian yang telah ditimbulkan akibat konflik.

#### 4.1.1 Komitmen terhadap Konvensi UNHCR 1951 dan Protokol 1967

UNHCR dibentuk oleh Negara-negara Eropa Barat dalam rangka menggantikan posisi *International Refugees Organization* (IRO) yang terbentuk pada 1947 oleh Amerika Serikat. IRO memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah pengungsi dan *internally displace people* korban Perang Dunia II yang mengancam kestabilan ekonomi di Eropa. Tujuan IRO yang kedua adalah untuk menginternasionalkan permasalahan mengenai pengungsi dengan menyebarkan mereka dan juga biaya hidup mereka kepada sejumlah negara di Amerika Utara dan Selatan, Eropa Barat, Australia, dan Afrika. IRO memang berhasil mengatasi masalah pengungsi di Eropa dengan baik, namun mereka tidak mampu mengatasi peningkatan masalah pengungsi di dunia akibat adanya konflik yang terjadi di Palestina, Jepang, Korea, Cina, dan India pada tahun 1940-1950. Amerika Serikat sebagai penyumbang dana IRO tidak bersedia untuk menyelesaikan masalah yang baru terjadi dan memilih fokus untuk membantu Eropa mengatasi krisis ekonomi melalui *Marshall Plan*.

UNHCR diberi mandat untuk beroperasi sampai tahun 1953, akan tetapi UNHCR mendapatkan dukungan dana dari *Ford Foundation* sehingga mampu memberi pengarahan bagi NGO untuk mengintegrasikan para pengungsi di Eropa. Selain itu UNHCR berhasil menangani krisis pengungsi di Jerman Barat pada awal tahun 1953. Melalui prestasi tersebut, Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk menjadikan UNHCR sebagai organisasi permanen yang menangani segala permasalahan pengungsi.<sup>189</sup>

Keterlibatan resmi Brasil dengan UNHCR dimulai pada tahun 1950 ketika Brasil bersama dengan Venezuela merupakan dua perwakilan Amerika Selatan

---

<sup>189</sup> *Ibid.* hal. 20

untuk menjadi bagian dalam Komite Eksekutif UNHCR.<sup>190</sup> Brasil meratifikasi Konvensi UNHCR 1951 pada 16 November 1961 dan kemudian Protokol 1967 pada tahun 1972.<sup>191</sup> Peraturan mengenai pengungsi pada saat itu hanya mengizinkan kedatangan pengungsi dari benua Eropa, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dalam konvensi yang menyatakan bahwa hanya pengungsi asal Eropa saja yang boleh diberi perlindungan oleh negara anggota UNHCR. Hal ini sesuai dengan kebijakan pengungsi pada Perang Dunia I dan II yang mana Brasil hanya memberikan status migran biasa pada pengungsi dari Eropa.<sup>192</sup>

Diktator militer memerintah Brasil pada tahun 1970-an membuat Brasil mengabaikan perlindungan HAM yang dicanangkan PBB. Pemerintah tidak mengimplementasikan hukum internasional tentang pengungsi, meskipun sudah meratifikasinya. Brasil menolak memberikan suaka kepada pengungsi dari wilayah Amerika Latin yang meninggalkan negara mereka karena perang dan melarikan diri dari komunis.<sup>193</sup> Mereka yang datang dengan permohonan pengungsi ditolak dan pemerintah memberi mereka visa wisatawan asing.<sup>194</sup> Pemerintah mendirikan Dewan Imigrasi Nasional Brasil/*Conselho Nacional de Imigração* (CNIg) yang berfungsi untuk mengurus masalah yang berkaitan dengan imigran pada tahun 1981. Aturan pemerintah pada saat itu mengizinkan pengungsi untuk tinggal di wilayah teritorial Brasil untuk jangka waktu 90 hari sampai ada negara lain yang mau menampung mereka. Peraturan tersebut membuat 20.000 pengungsi Argentina, Bolivia, dan Uruguay dipindahkan dari Brasil ke Australia, Kanada, Eropa, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

<sup>190</sup> Heidi Savabi. 2014. The Legal Framework and Institutional Assistance for Refugees in Brazil since the Mid - Twentieth Century: The Impact on Refugee Integration and Assistance. *IMTP-Magazine on Migration Issues*. <http://trendsandperspectives.com/pdf/09.03/Heidi%20Savabi%20Summer%202014%20color1.pdf> [3 Juni 2015] hal.5

<sup>191</sup> UNHCR. 2008. *States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol*. [https://www.unhcr.org/hk/files/useful\\_resources/Important\\_documents/StatesParties\\_to\\_1951\\_Convention\\_as\\_of\\_Oct08.pdf](https://www.unhcr.org/hk/files/useful_resources/Important_documents/StatesParties_to_1951_Convention_as_of_Oct08.pdf) [20 Mei 2015]

<sup>192</sup> José H Fischel de Andrade dan Adriana Marcolini. *Op. Cit.*

<sup>193</sup> Heidi Savabi. *Loc. Cit.*

<sup>194</sup> José H Fischel de Andrade dan Adriana Marcolini. *Op. Cit.*

Brasil mulai melibatkan UNHCR mengeluarkan UU Pengungsi pada tahun 1997 dan membentuk Komite Nasional Pengungsi (CONARE), meskipun pada saat itu UNHCR bekerja dari kantor regional di Buenos Aires, Argentina. Perjanjian mengenai proses *resettlement* domestik antara Brasil dan Argentina dimulai pada tahun 1999. Sebelum itu Brasil telah menandatangani berbagai perjanjian yang mendukung aktivitas UNHCR, yaitu Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Perjanjian Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), dan Konvensi HAM Amerika (*American Convention on Human Rights*) pada 1992, serta Konferensi HAM Dunia ke-2 (*Second World Conference on Human Rights*) yang dilaksanakan di Wina pada 1993. Selain pemerintah, NGO juga ikut aktif dalam upaya perlindungan pengungsi. Pada awal tahun 1990, NGO bekerja sama dengan UNHCR merencanakan kerja sama mengenai program perlindungan, prioritas perlindungan dan strategi, serta memperkuat perlindungan kegiatan UNHCR dan NGO. UNHCR kembali membuka kantor cabang di Brasil pada tahun 2004.<sup>195</sup>

Brasil menerapkan berbagai pasal dalam perjanjian tersebut, yaitu pengertian mengenai pengungsi (pasal 1), hak dan kewajiban pengungsi (pasal 2), aturan non-diskriminasi (pasal 3), kebebasan beragama (pasal 4), hak mendapatkan akses ke pengadilan (pasal 12), aturan tentang ketenagakerjaan (pasal 17 sampai 19), jaminan pendidikan (pasal 22) dan keamanan sosial (pasal 24), kebebasan untuk memilih tempat tinggal (pasal 26), pemberian keterangan identitas (pasal 27), pendampingan dalam pembuatan dokumen perjalanan (pasal 28), prinsip *non-refoulement* (pasal 33), dan kebijakan mengenai keterlibatan UNHCR dan organisasi lainnya dalam penanganan pengungsi (pasal 35).<sup>196</sup> Sebagai negara yang bersedia untuk menerima pengungsi, maka sudah dapat

---

<sup>195</sup> Heidi Savabi. *Op. Cit.* hal. 2-11.

<sup>196</sup> Liliana Lyra Jubilut dan Silvia Menicucci de Oliveira Selmi Apolinário. *Op. Cit.* hal. 13-37

dipastikan bahwa Brasil berusaha menyesuaikan aturan pengungsi yang mereka buat dengan perjanjian dalam UNHCR. Aturan mengenai perlindungan pengungsi di Brasil pada saat ini mengacu pada pasal-pasal yang tertera pada Konvensi UNHCR 1951 Mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967 Mengenai Status Pengungsi.

Dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Suriah, Brasil mengimplimentasikan prinsip-prinsip di atas. Pengungsi dapat mengajukan visa kemanusiaan pada kantor kedutaan atau konsulat jenderal Brasil di negara tetangga Suriah. Sesampainya mereka di Brasil, mereka dapat mengurus status mereka sebagai pengungsi. Mereka akan mendapatkan bantuan dari profesional dalam mempelajari bahasa Portugis dan mencari pekerjaan.<sup>197</sup>

#### **4.2 Solidaritas Brasil dengan Komunitas Negara Anggota BRICS**

Peningkatan bantuan internasional Brasil tidak disebabkan oleh kepentingan ekonomi dan politik, akan tetapi lebih didorong oleh faktor solidaritas internasional dan perubahan kebijakan politik luar negeri yang lebih mengarah kepada kerja sama dengan negara selatan (*south-south cooperation*). Setelah melakukan peningkatan ekonomi, Brasil telah dapat dikategorikan sebagai negara berkembang sehingga memungkinkan Brasil untuk memberikan lebih banyak bantuan luar negeri untuk negara berkembang lainnya. Seiring dengan peningkatan ekonomi tersebut, Brasil mengalami penurunan pemberian program bantuan dana dari negara maju.

Solidaritas dapat diartikan sebagai kepedulian suatu negara terhadap anggota kelompok yang diekspresikan melalui sikap tidak bersedia menerima keuntungan kecuali anggota kelompok yang lain juga ikut menerima atau sikap tidak bersedia menerima keuntungan ketika hal tersebut dapat membahayakan

---

<sup>197</sup> Syria. 2015. *Brazil Opens Arms To Syrian Refugees*. <http://www.syria.com/en/2015/06/brazil-opens-arms-to-syrian-refugees/> [2 September 2015]

eksistensi anggota yang lain. Solidaritas akan muncul apabila negara berkomitmen untuk mematuhi aturan yang telah dibentuk berdasarkan *collective decision-making* atau untuk mencapai kesejahteraan anggota kelompok.<sup>198</sup> Keputusan Brasil untuk menerima pengungsi Suriah dapat dilihat melalui sudut pandang solidaritas Brasil dengan organisasi *Brazil, Russia, India, China, South Africa* (BRICS). BRICS merupakan salah satu organisasi internasional yang memiliki suara lantang dalam mengomentari mengenai bagaimana dunia internasional harus bersikap untuk menangani konflik di Suriah.

Perkumpulan Brasil, Rusia, India, dan Cina (BRIC) secara formal dimulai pada tahun 2009 yang mana pada tanggal 16 Juni empat negara tersebut melakukan pertemuan di Yekaterinburg, Rusia, untuk berdiskusi mengenai pembentukan dunia yang lebih demokratis dan multipolar yang berasaskan hukum internasional, keadilan, saling menghormati, kerja sama, tindakan yang terkoordinasi, dan pembuatan kebijakan kolektif. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010 sehingga terbentuk akronim baru BRICS (*Brazil, Russia, India, China, South Africa*). BRICS dikenal sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi pesat dan memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan makroekonomi dunia. Negara BRICS memiliki kerja sama yang kuat dalam hal perdagangan karena mereka memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar sehingga memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan pasar yang besar.

Perdagangan antar anggota BRICS merupakan hal yang penting karena termasuk memiliki bagian sebesar 8,5% dari keseluruhan perdagangan mereka di dunia pada tahun 2011. Bagi Brasil perdagangan dengan negara Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan menguasai 20% bagian dari nilai ekspornya secara keseluruhan. Cina merupakan pasar utama bagi Brasil, India, Rusia, dan Afrika

---

<sup>198</sup> Eiko R. Thielemann. *Op. Cit.* hal. 14

Selatan.<sup>199</sup> Cina merupakan partner dagang terbesar Brasil yang disusul Amerika Serikat, Argentina, dan Jerman. Prosentase ekspor Brasil ke Cina adalah 41,2%, sedangkan prosentase impornya adalah sebesar 34,2% pada tahun 2012. Ekspor utama Brasil kepada Cina adalah kedelai, minyak kedelai, dan bijih besi. Sedangkan produk yang diimpor oleh Brasil dari Cina adalah barang elektronik dan bahan bakar mineral.<sup>200</sup>

Hubungan Brasil dan Cina dimulai pada tahun 1974 ketika Brasil mengakui Republik Rakyat Cina sebagai perwakilan resmi Cina. Hubungan bilateral Brasil dan Cina dimulai pada 1980 di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dalam program pembuatan satelit luar angkasa Brasil-Cina. Kerja sama tersebut diikuti kerja sama di bidang perdagangan, energi, pertambangan, keuangan, pertanian, dan sebagainya. Sampai tahun 1995 perdagangan Brasil dengan Cina masih rendah, hanya 2,6% prosentase ekspor Brasil yang masuk ke Cina. Hubungan perdagangan Brasil-Cina mulai meningkat pada tahun 2002 dengan peningkatan ekspor Brasil sebesar 4%. Presiden Hu Jintao dan Presiden Lula da Silva saling bertukar kunjungan pada 2004 dan sejak saat itu Brasil memutuskan untuk mendukung Cina bergabung secara penuh ke *World Trade Organization* (WTO).

Hubungan keduanya semakin stabil dengan bergabungnya Cina dalam organisasi internasional di wilayah Amerika Latin. Cina bergabung ke dalam *Organization of American States* (OAS) sebagai pengamat permanen pada Mei 2004 dan bergabung dengan *Inter-American Development Bank* (IDB) Latin Amerika pada 2006.<sup>201</sup> Selain bergabung dalam bidang ekonomi, Cina juga

---

<sup>199</sup> Suresh P. Singh. 2011. *BRICS and The World Order: A Beginner's Guide*. [http://www.elcorreo.eu.org/IMG/pdf/Building\\_Better\\_Global\\_Economic\\_Brics.pdf](http://www.elcorreo.eu.org/IMG/pdf/Building_Better_Global_Economic_Brics.pdf) [1 Juni 2015] hal. 2-17.

<sup>200</sup> Ana Gabriela Verotti Farah. 2013. *Largest Trading Partners of Brazil*. <http://thebrazilbusiness.com/article/largest-trading-partners-of-brazil> [1 Juni 2015]

<sup>201</sup> Niu Haibin. 2010. Emerging global partnership: Brazil and China. [http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292010000300011&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292010000300011&script=sci_arttext) [6 Juni 2015]

melibatkan diri dalam bidang kemanusiaan. Pasukan perdamaian Cina ikut membantu Haiti yang terkena gempa bumi, berada di bawah perintah Jenderal Brasil yang dibantu oleh PBB. Pemerintah Cina menyumbang 2,6 juta dolar Amerika dan mengirimkan 40 petugas paramedis untuk membantu korban di Haiti.<sup>202</sup>

Selain memiliki kerja sama yang erat di bidang ekonomi dan dalam wilayah regional Amerika Selatan, Brasil dengan negara BRICS juga memiliki pandangan yang sama mengenai konflik yang terjadi di Suriah. Pemerintah Brasil menolak adanya intervensi internasional dan memilih untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Suriah yang meminta perlindungan ke wilayah negara mereka. Diplomat Cina untuk PBB menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Suriah harus diselesaikan oleh pemerintah Suriah sendiri. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan tiga kali veto Cina terhadap Resolusi PBB untuk Suriah. Cina bersama dengan Rusia melakukan veto pertama pada Oktober 2011 terhadap Resolusi PBB yang diusulkan oleh Inggris dan Perancis. Veto yang kedua dilakukan pada 4 Februari 2015 mengenai resolusi yang meminta Presiden Suriah untuk turun dari jabatannya. Cina melakukan veto ketiga terhadap Resolusi PBB yang hendak memberikan sanksi ekonomi kepada pemerintah Suriah. Cina berpendapat bahwa resolusi Majelis Umum PBB tidak akan mampu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah.

Pandangan Cina mengenai *responsibility to protect* menekankan bahwa intervensi kemanusiaan harus sejalan dengan prinsip kedaulatan negara. Cina menganggap bahwa ide dari *responsibility to rebuild*, salah satu dari tiga bagian *responsibility to protect*, hanya akan merusak *responsibility to prevent* dan *responsibility to react*. Ide dari *responsibility to protect* berada di antara “mereka

---

<sup>202</sup> Embassy of the People's Republic of China in the United States of America. Tanpa Tahun. *China Announces More Assistance To Haiti*. <http://www.china-embassy.org/eng/xw/t653186.htm> [8 Juni 2015]

yang berusaha mencari kebenaran dengan intervensi secara paksa untuk melindungi masyarakat” dan “mereka yang berusaha menegakkan norma, kedaulatan, dan prinsip non-intervensi”. Cina berpendapat bahwa cara yang tepat untuk melindungi masyarakat sipil adalah dengan menyediakan lingkungan yang aman dengan cara aktif mencegah konflik dan memberikan resolusi efektif untuk setiap konflik yang berlangsung. Menteri Luar Negeri Cina periode 2007-2013, Yang Jiechi, menyatakan bahwa perlu adanya usaha komprehensif secara nasional, regional, dan internasional untuk meraih perdamaian. Pernyataan tersebut menekankan pendapat Cina bahwa harus ada strategi yang terintegrasi dalam komunitas internasional untuk menciptakan negara yang damai.

Dalam kasus Suriah, alasan yang menyebabkan Cina terus-menerus menolak penggunaan militer dan adanya sanksi adalah karena syarat-syarat pengimplementasian intervensi kemanusiaan masih belum terjadi dan masih tidak ada dukungan penuh dari organisasi regional. Contohnya adalah Liga Arab yang belum mencapai keputusan mengenai penyelesaian konflik di Suriah. Negara Teluk memiliki pendapat yang berbeda mengenai pemerintahan Presiden Assad. Iran mendukung pemerintahan Presiden Assad, sementara itu Irak, Lebanon, dan Aljazair ingin Presiden Assad mundur dari jabatannya. Sedangkan negara yang lain, seperti Mesir, memilih untuk bersikap netral.

Alasan lain yang menyebabkan penolakan Cina terhadap intervensi di Suriah berhubungan dengan komitmennya terhadap operasi *peace keeping* PBB dan *peace-building* internasional. Cina berkontribusi 1.782 personel militer dan polisi untuk PBB per Juni 2013. Jumlah tersebut merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan empat anggota DK PBB yang lain. Cina mendahulukan kedaulatan dibandingkan dengan intervensi kemanusiaan, sebuah strategi perdamaian yang bertolak belakang dengan negara-negara Barat. Cina mendukung konsep *responsibility while protecting* yang diajukan oleh Brasil

kepada DK PBB pada November 2011. Kebijakan intervensi yang terbaik adalah ketika penggunaan militer merupakan subyek evaluasi dan melibatkan banyak negara untuk memperbaiki aspek intervensi kemanusiaan dalam *responsibility to protect*.<sup>203</sup>

Pemerintah Cina mengkritik tindakan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) di Libya. Amerika Serikat dan NATO bertindak tanpa adanya dukungan dari PBB dan NATO melewati mandat PBB ketika menggulingkan pemerintahan Libya. Cina khawatir bahwa menerapkan intervensi kemanusiaan di Suriah akan berakhir sama seperti Libya, negara akan melakukan penyalahgunaan mandat PBB demi kepentingan mereka sendiri sehingga pada akhirnya menyebabkan banyak korban jiwa dan krisis kemanusiaan yang lebih parah.<sup>204</sup>

Kedutaan besar Cina di Yordania dan *Jordan Hashemite Charity Organisation* (JHCO) menandatangani kerja sama dalam rangka membantu pengungsi Suriah di wilayah Kerajaan Yordania pada tahun 2013. Cina mendonorkan dana sebesar 2,3 juta dolar Amerika termasuk 124 trailer untuk kamp pengungsian Zaatari.<sup>205</sup> Selanjutnya, Cina menyumbangkan dana sebesar 16 juta dolar Amerika bagi pengungsi Suriah yang mencari perlindungan di wilayah negara yang berbatasan langsung dengan Suriah pada tahun 2014. Bantuan yang diberikan Cina tersebut termasuk salah satu upaya Cina untuk mengurangi dampak krisis ekonomi dan sosial akibat konflik, serta untuk menciptakan kestabilan politik di Timur Tengah.<sup>206</sup> Cina memilih untuk memberikan bantuan

---

<sup>203</sup> Lucie Qian Xia. 2014. *The Syrian Crisis and the Responsibility to Protect: A Chinese Perspective*. [http://www.eu-asiacentre.eu/documents/uploads/pub\\_118\\_lucie\\_qian\\_xia\\_-\\_the\\_syrian\\_crisis\\_and\\_the\\_responsibility\\_to\\_protect\\_-\\_a\\_chinese\\_perspective.pdf](http://www.eu-asiacentre.eu/documents/uploads/pub_118_lucie_qian_xia_-_the_syrian_crisis_and_the_responsibility_to_protect_-_a_chinese_perspective.pdf) [8 Juni 2014] hal. 1-5

<sup>204</sup> Michael D. Swaine. *Op. Cit.* hal. 2-5

<sup>205</sup> Petra. 2013. *China To Provide Aid Worth \$2.3m To Syrian Refugees In Jordan*. <http://www.jordantimes.com/news/local/china-provide-aid-worth-23m-syrian-refugees-jordan#sthash.bY4gmhWk.dpuf> [12 Agustus 2015]

<sup>206</sup> The Associated Press. 2014. *China offers \$16 million in aid for Syria refugees, \$10m to Palestinians*. <http://www.haaretz.com/news/middle-east/1.597129> [7 Juli 2015]

untuk pengungsi karena cara tersebut tidak mencampuri urusan dalam negeri Suriah dan tidak mengandung unsur intervensi militer.

Rusia memiliki pendapat yang sama dengan Cina dalam menghadapi konflik di Suriah. Presiden Putin menyatakan bahwa intervensi kemanusiaan merupakan budaya Amerika Serikat sehingga terdapat kemungkinan bahwa resolusi bagi Suriah membawa kepentingan Amerika Serikat di dalamnya. Penggunaan militer bersifat tidak efektif dan tidak berarti. Konflik terus berlangsung di Afganistan setelah NATO melakukan intervensi, saat ini Libya terbagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kegolongan, dan perang sipil terus terjadi di Irak. Secanggih dan sebaik apapun strategi militer, akan tetap menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu cara terbaik untuk menyelesaikan konflik Suriah adalah dengan dialog sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan komunitas internasional dan membuka peluang kerja sama dalam menyelesaikan isu yang sejenis.<sup>207</sup>

Pemerintah Rusia secara resmi menerima lebih dari 1.200 pengungsi Suriah pada tahun 2013. Kementerian Luar Negeri Rusia menerima surat yang ditulis oleh kelompok Kristen Suriah pada Oktober 2013 yang isinya adalah meminta Rusia memberikan kewarganegaraan ganda bagi mereka. Akan tetapi, pemerintah Rusia tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut dan meminta mereka untuk mengajukan bantuan dalam bentuk bantuan dana kemanusiaan dan pemberian suaka.<sup>208</sup> Rusia memberikan bantuan dana sebesar 2,5 juta dolar Amerika kepada UNHCR untuk menangani konflik di Suriah pada 2012 yang meningkat menjadi 17,8 juta dolar Amerika pada tahun 2013.<sup>209</sup>

---

<sup>207</sup> Vladimir V. Putin. 2013. *A Plea for Caution From Russia*. <http://www.ajanjack.org/wp-content/uploads/2013/08/What-Putin-Has-to-Say-to-Americans-About-Syria-NYTimes.com.pdf> [8 Juni 2015]

<sup>208</sup> Gurcan Ozturk. 2014. *Over 1,000 Syrian Refugees Granted Russian Asylum – Official*. <http://rt.com/politics/russia-syrian-refugees-asylum-631/> [12 Juli 2015]

<sup>209</sup> Hayes Brown. 2013. *Russia And China Provide Practically No Aid To Syrian Refugees*. <http://thinkprogress.org/security/2013/09/03/2562291/russia-china-syria-aid/> [12 Juli 2015]

Afrika Selatan berpendapat bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan intervensi adalah Dewan Keamanan PBB. Konflik Suriah harus dilakukan dengan dialog nasional yang bebas dari campur tangan negara lain dalam perumusan perubahan rezim.<sup>210</sup> NGO kemanusiaan asal Afrika Selatan, *Gift of the Givers*, mengirimkan 47 tenaga medis ke wilayah Darkoush, Suriah yang berbatasan dengan Turki untuk memberikan bantuan dalam segi kesehatan<sup>211</sup> dan membangun Rumah Sakit yang bernama *Ar Rahma* pada tahun 2013<sup>212</sup>. NGO asal Afrika lainnya yang beroperasi di Timur Tengah adalah *Darul Islamic Relief Fund* (DARF) yang membantu pengungsi Suriah di perbatasan Yordania dan Turki. DARF membantu menyediakan suplai makanan, obat-obatan, dan menawarkan adopsi bagi beberapa pengungsi anak-anak Suriah yang berada di wilayah Turki.<sup>213</sup>

India juga memiliki kepedulian terhadap konflik yang terjadi di Suriah. Berbeda dengan Afrika Selatan yang mengirimkan relawan, pemerintah India memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 2,5 juta dolar Amerika pada tahun 2013. Bantuan yang diberikan tidak semuanya berupa uang, tetapi beberapa dalam bentuk obat-obatan dan makanan. Pemberitahuan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri India, E. Ahamed, dalam konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Sekjen PBB, Ban Ki-Moon.<sup>214</sup>

BRICS merupakan organisasi yang penting bagi Brasil untuk mencapai kepentingan nasional yang direncanakan karena prinsip luar negeri BRICS

<sup>210</sup> SouthAfrica.info. 2013. *SA Opposes Military Action In Syria*. <http://www.southafrica.info/news/international/syria-290813.htm#.VaYboSxyH61> [15 Juli 2015]

<sup>211</sup> Sabedigitalnews. 2013. *South African NGO Gift to the Givers' to Offer Humanitarian Relief to War-Torn Syria*. <http://allafrica.com/view/resource/main/main/id/00061135.html> [19 Juli 2015]

<sup>212</sup> Azhar Vadi. 2015. *South African Funded Hospital Attacked in Syria*. <http://www.ciibroadcasting.com/2015/05/05/south-african-funded-hospital-attacked-in-syria/> [19 Juli 2015]

<sup>213</sup> Newsroom. 2014. *Appeal for Syrian Aid*. <http://www.vocfm.co.za/appeal-for-syrian-aid/> [19 Juli 2015]

<sup>214</sup> IANS. 2013. *India Donates \$2,5 mn for Syrian Refugees*. [http://zeenews.india.com/news/world/india-donates-25-mn-for-syrian-refugees\\_825945.html](http://zeenews.india.com/news/world/india-donates-25-mn-for-syrian-refugees_825945.html) [19 Juli 2015]

berbanding lurus satu sama lain, lebih mengutamakan kerja sama dan menggunakan cara damai untuk menyelesaikan konflik. BRICS merupakan instrumen yang mampu menantang kebijakan internasional yang sudah berlangsung lama dan kemudian berusaha memperjuangkan kepentingan anggotanya. Contoh dari keberhasilan BRICS dalam menentang kebijakan internasional yang bersifat tradisional adalah penolakan intervensi kemanusiaan di Suriah.

Menurut Brasil dimensi peraturan internasional harus dibingkai oleh pendekatan multilateralisme, yaitu: ekonomi, perdagangan, keamanan, isu lingkungan, kesehatan, dan HAM. Kesejahteraan akan terbentuk ketika negara melakukan kerja sama yang bersifat multilateral dan kebijakan yang hanya menguntungkan beberapa negara kuat harus diganti. Pendekatan multilateralisme menepis pemikiran tentang stabilitas hegemoni dan keterkaitan antara kebijakan luar negeri dan rezim politik.<sup>215</sup>

Negara BRICS berpendapat bahwa upaya yang tepat untuk menyelesaikan konflik Suriah adalah melalui cara yang diplomatis dan mengutamakan dialog. Cina mengajukan wacana *responsible protection* yang menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB merupakan satu-satunya pihak yang boleh melakukan intervensi kemanusiaan di Suriah dan harus ada mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa cara, proses, dan ruang lingkup perlindungan di Suriah dilakukan dengan tepat. Cara ini merupakan salah satu kontribusi Cina terhadap aturan politik internasional yang baru.

Lima anggota BRICS berusaha menghindari penggunaan intervensi militer di Suriah dengan memberikan bantuan kemanusiaan berupa dana, pemenuhan kebutuhan logistik, dan memberikan perlindungan bagi pengungsi Suriah, seperti

---

<sup>215</sup> Amado Luiz Cervo. 2012. Brazil In The Current World Order. *Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations* Volume 1, Number 2. <http://seer.ufrgs.br/index.php/austral/article/viewFile/30514/20487> [5 Juni 2015] hal. 46-47

yang dilakukan oleh Brasil dan Rusia. Bantuan kemanusiaan merupakan cara yang paling aman untuk menghindari lebih banyak korban dan menghindarkan Suriah dari potensi kolonialisasi yang diakibatkan oleh intervensi. Konsep intervensi militer bertolak belakang dengan asas-asas yang menjadi pondasi BRICS untuk melakukan kerja sama dan membangun dunia yang keadilan dan menghargai satu sama lain.

#### 4.3 Peran Penduduk Keturunan Suriah terhadap Perekonomian Brasil

Penduduk Brasil keturunan Suriah memiliki citra yang baik di masyarakat dan pemerintah Brasil. Mereka sukses dalam kegiatan perdagangan dan memiliki kontribusi besar bagi perekonomian negara. Dengan keuntungan yang didapatkan, mereka dapat membentuk kamar dagang yang membantu pemerintah untuk menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Citra baik penduduk keturunan Suriah tersebut membuat Brasil bersedia untuk menampung pengungsi Suriah yang datang ke negara mereka.

Berdasarkan situs Arabesq terdapat empat juta penduduk keturunan Suriah di Brasil pada 2014.<sup>216</sup> Brasil menerima kedatangan penduduk Suriah pertama kali pada 1876 dalam rangka memenuhi ajakan kaisar Brasil, Pedro II, untuk tinggal dan bekerja di perkebunan karet Brasil.<sup>217</sup> Meskipun kesempatan bekerja yang ditawarkan adalah sebagai pekerja di perkebunan, imigran Suriah lebih memilih untuk berdagang. Mereka menganggap bahwa berdagang merupakan pekerjaan yang lebih ringan daripada menjadi buruh kebun dan lebih cepat menghasilkan uang.<sup>218</sup> Imigran Suriah dan imigran lain yang berasal dari Timur Tengah menguasai 90% usaha perdagangan tekstil di São Paulo pada 1893.

<sup>216</sup>Gabriel Elizondo. 2012. *Brazil's Syrians Divided On Bashar Al-Assad*. <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/11/20121118103753804372.html> [25 Juni 2015]

<sup>217</sup>Eliane Fersan. *Loc. Cit.*

<sup>218</sup>Montie Bryan Pitts Jr. *Op. Cit.* hal. 10.

Walaupun warga keturunan Suriah memiliki peran yang besar dalam sebagai perintis usaha perdagangan, terutama tekstil, pemerintah Brasil tidak terlalu memberikan perhatian kepada mereka. Pemerintah hanya fokus untuk mengembangkan pertanian karena dibandingkan dengan pertanian, perdagangan tidak memiliki sumbangan yang cukup besar bagi pendapatan negara. Pengakuan terhadap kegiatan perdagangan baru dimulai pada tahun 1930 ketika Brasil mengalami masa industrialisasi. Industri tekstil sangat diuntungkan dengan adanya kebijakan tariff yang dikeluarkan sejak tahun 1930 oleh pemerintahan Presiden Getúlio Vargas.<sup>219</sup>

Beberapa pengusaha keturunan Suriah dan Lebanon membentuk kamar dagang dengan dibiayai oleh para pengusaha tekstil pada 1952. Pada masa selanjutnya kamar dagang disebut dikenal dengan nama CCAB<sup>220</sup> dan merupakan anggota dari *General Union of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture for Arab Countries (Union)*, sebuah kamar dagang yang dibentuk oleh negara-negara Arab.<sup>221</sup> Para pengusaha tersebut mendapat apresiasi yang bagus dari pemerintah Brasil karena mereka merupakan partner ekspor bagi pengusaha dari Timur Tengah. Tujuan dari CCAB adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi, budaya, dan pariwisata antara Brasil dengan negara-negara Arab, tidak hanya Suriah.<sup>222</sup>

Keberadaan CCAB membantu pemerintah Brasil dalam melakukan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara di Timur Tengah. Kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh CCAB di Brazil menarik minat diplomat dan pengusaha dari Timur Tengah untuk berkunjung ke Brasil. Perwakilan dari

---

<sup>219</sup> John Tofik Karam. 2007. *Another Arabesque Syrian–Lebanese Ethnicity in Neoliberal Brazil*. Philadelphia: Temple University Press. Hal. 25-28

<sup>220</sup> John Tofik Karam. *Op. Cit.* Hal 23.

<sup>221</sup> Situs resmi UAC. Tanpa Tahun. *General Union of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture for Arab Countries (A Profile)*. [http://www.uac.org.lb/includes/FCKeditor/upload/File/about\\_us\\_en.pdf](http://www.uac.org.lb/includes/FCKeditor/upload/File/about_us_en.pdf) [17 April 2015]

<sup>222</sup> Situs resmi CCAB. Tanpa Tahun. *Who We Are / About The Chamber: Bringing Cultures Together. Building Opportunities*. <http://www.ccab.org.br/arabe-brasil/en/about-us.fss> [17 April 2015]

Lebanon, Yordania, Mesir, dan Suriah mendatangi Brasil untuk berdiskusi dengan CCAB pada 1966. CCAB juga melakukan kerja sama dengan kedutaan Libya, Irak, Aljazair, Mesir, Arab Saudi, dan Maroko pada 1975. CCAB membantu Brasil untuk melakukan ekspor ke Timur Tengah ketika terjadi krisis minyak pada 1973. Brasil mengekspor makanan kemasan (seperti makanan beku), mineral besi, gula, serat aluminium, dan biji kopi pada tahun 1990 yang menghasilkan sepertiga dari total ekspor Brasil ke Timur Tengah. Semua perdagangan tersebut sertifikasinya dilakukan oleh CCAB.<sup>223</sup>

Selain bertujuan untuk membantu para pengusaha Brasil dan Timur Tengah untuk menjalin kerja sama, CCAB juga menentukan regulasi yang mengatur kerja sama tersebut. CCAB merupakan lembaga resmi yang bertugas untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang dikemudian dikirim ke kedutaan negara Arab di Brasil dan membuat dokumen ekspor ke negara-negara Timur Tengah yang bertujuan untuk menjamin kualitas produk yang akan diekspor. Selain membuat dokumen kelengkapan ekspor bagi pengusaha Brasil, CCAB menganalisa dokumen impor yang dikirim dari Timur Tengah. CCAB harus dapat menentukan bahwa semua kegiatan ekspor dan impor berjalan sesuai aturan yang berlaku dan dengan hukum internasional.<sup>224</sup>

CCAB memiliki peran yang penting dalam membangun hubungan ekonomi dan politik antara Brasil dengan Timur Tengah. Lebih dari itu, hubungan antara Brasil dengan Timur Tengah merupakan salah satu wujud kerja sama selatan-selatan yang diterapkan oleh Brasil. Meskipun demikian, Negara-negara Timur Tengah tidak menjadi bagian dari partner dagang utama Brasil karena hubungan dagang kedua pihak nilainya kecil dibandingkan dengan 7 partner dagang Brasil yang lain.

---

<sup>223</sup> John Tofik Karam. *Op. Cit.* hal. 31-32

<sup>224</sup> Situs resmi CCAB. Tanpa Tahun. *Certification Of Documents: Safety And Security For Arab Importers And Brazilian Exporters.* <http://www.ccab.org.br/arabe-brasil/en/home/services/certification.fss> [17 April 2015]

Nilai perdagangan Brasil dengan negara Suriah hanya sebesar 52,1 juta dolar Amerika pada tahun 201<sup>225</sup>. Nilai tersebut sangat kecil apabila dibandingkan dengan Cina yang memiliki nilai ekspor sebesar 46,1 milyar dolar Amerika, Amerika Serikat (25,2 milyar dolar), Argentina (19,3 milyar dolar), Belanda (16,3 milyar dolar), Jepang (8,58 milyar dolar), Jerman (8,09 milyar dolar), Chile (4,85 milyar dolar), Arab Saudi (3,37 milyar dolar), dan Uni Emirat Arab (2, 57 milyar dolar). Berdasarkan nilai ekspor tersebut negara Timur Tengah merupakan partner dagang Brasil dengan nilai terendah.

---

<sup>225</sup> Aarti Nagraj. 2013. *Trade Between Arab Region, Brazil Hits \$26bn In 2012*. <http://gulfbusiness.com/2013/03/trade-between-arab-region-brazil-hits-26bn-in-2012/#.VdxzyCxyH60> [24 Agustus 2015]

Tabel 4.1 Prosentase dan Nilai Ekspor Brasil tahun 2013

No.	Negara	Ekspor 2013	
		Prosentase	Nilai
1.	Cina	19%	\$46,1 M*
2.	Amerika Serikat	10%	\$25,2 M
3.	Argentina	7,8%	\$19,3 M
4.	Belanda	6,6%	\$16,3 M
5.	Jepang	3,5%	\$8,58 M
6.	Jerman	3,3%	\$8,09 M
7.	Chile	2,0%	\$4,85 M
8.	Arab Saudi	1,4%	\$3,37 M
9.	UEA	1,0%	\$2,57 M
10.	Suriah	0,021%	\$52,1 Jt**

\*M: Miliar

\*\*Jt: Juta

(sumber: OEC. 2013. *Where does Brazil export to? (2013)*)

[http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree\\_map/hs92/export/bra/show/all/2013/](http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/bra/show/all/2013/)

[9 Oktober 2015])

Data di atas membuktikan bahwa tindakan Brasil dalam menerima pengungsi Suriah tidak dipicu oleh keuntungan ekonomi. Akan tetapi tindakan Brasil cenderung dipicu oleh faktor yang berkaitan dengan kemanusiaan. Hubungan Arab dengan Brasil menunjukkan wujud kerja sama selatan-selatan yang diterapkan oleh Brasil dalam rangka mempromosikan perdamaian. Kegiatan ekonomi antara Suriah dengan Brasil memang terwujud, akan tetapi nilainya lebih rendah dibandingkan dengan perdagangan Brasil dengan negara-negara lainnya.

## BAB 5. KESIMPULAN

Konflik antara pemerintah dengan masyarakat sipil di Suriah telah mengancam keamanan politik, ekonomi, personal, komunitas, pangan, dan kesehatan rakyatnya. Pada akhirnya mereka terpaksa melarikan diri dari wilayah Suriah untuk menjadi pengungsi di berbagai negara, salah satunya adalah Brasil. Kesiapan Brasil untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi Suriah berbanding lurus dengan komitmen Brasil dalam menerapkan norma-norma yang berkaitan dengan HAM.

Dedikasi Brasil terhadap keamanan manusia juga terlihat dalam komitmennya pada Konvensi UNHCR 1951 dan Protokol 1967. Konvensi dan Protokol tersebut merupakan acuan utama Brasil dalam membuat Undang-undang Pengungsi. UNHCR bekerja sama dengan CONARE dan masyarakat Brasil merupakan pihak-pihak penting dalam proses *resettlement* pengungsi. Melalui tiga pihak tersebut Brasil memiliki peraturan pengungsi terbaik di kawasan Amerika Latin.

Pemberian perlindungan kepada pengungsi Suriah juga dipicu oleh keinginan Brasil untuk mempererat solidaritas internasional yang dilakukan melalui kerja sama dengan negara Rusia, Cina, India, dan Afrika Selatan yang bersama dengan Brasil membentuk organisasi BRICS. Hubungan BRICS berdasarkan asas demokrasi, multipolarisme dan perdamaian dunia. Dalam kasus konflik Suriah, BRICS tidak setuju dengan rencana intervensi kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik karena dapat menimbulkan biaya yang besar dan melanggar konsep kedaulatan negara. Mereka meyakini bahwa upaya damai merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik Suriah, dibandingkan dengan intervensi yang cenderung mengarah pada imperialisme dan potensi

penyalahgunaan kewenangan demi mencapai kepentingan nasional pihak pengintervensi.

Masyarakat Brasil keturunan Suriah memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah untuk menerima pengungsi Suriah. Penduduk keturunan Suriah mendirikan kamar dagang yang menjadi jembatan hubungan Brasil dengan negara di wilayah Timur Tengah. Volume perdagangan antara Brasil dengan Timur Tengah memang tidak terlalu banyak, akan tetapi tetap penting untuk menjaga konsep hubungan selatan-selatan yang diterapkan oleh Brasil.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, keputusan Brasil untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi Suriah lebih disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan dedikasi Brasil untuk nilai-nilai kemanusiaan. Konsep yang paling tepat untuk digunakan dalam menganalisa mengenai keputusan Brasil dalam menganalisa pengungsi Suriah adalah pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh perspektif idealisme jika dibandingkan dengan apa yang diyakini oleh kalangan realisme. Hal ini menunjukkan bahwa idealisme masih relevan untuk digunakan dalam menjelaskan perilaku negara. Terbukti dengan masih ada negara yang peduli terhadap isu-isu kemanusiaan dan menjunjung penghargaan terhadap kedaulatan negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Benner, Thorsten. 2013. *Brasil as A Norm Entrepreneur: the Responsibility While Protecting Initiative*. Berlin: Global Public Policy Institute [GPPi].
- Burchill, Scott dan Andrew Linklater. 1996. *Theories of International Relations*. London: Macmillan Press Ltd.
- Cohen, Robin. 2008. *Global Diasporas: An Introduction Second Edition*. Oxon: Routledge
- Hamann, Eduarda Passarelli dan Robert Muggah. 2013. *Implementing the Responsibility to Protect: New Directions For International Peace and Security?*. Brasilia: Igarape Institute.
- ICISS. 2001. *The Responsibility to Protect*. Ottawa: International Development Research Centre.
- Karam, John Tofik. 2007. *Another Arabesque Syrian–Lebanese Ethnicity in Neoliberal Brazil*. Philadelphia: Temple University Press.
- Klotz, Audie dan Deepa Prakash. 2008. *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*. New York: Palgrave Macmillan.
- Ministry Of External Relations. 2008. *Brazilian Foreign Policy Handbook*. Brasilia: Ministry of External Relations (Bureau of Diplomatic Planning).
- Morris, Benny. 2008. *1948: A History of the First Arab-Israeli War*. New Haven: Yale University Press.
- Mouton, Johann. 1990. *The Methodology of the Social Sciences*. Pretoria: HSRC Publishers.
- Newman, Edward dan Joanne van Selm. 2003. *Refugees And Forced Displacement: International Security, Human Vulnerability, And The State*. Tokyo: United Nations University Press.
- Potocky-Tripodi, Miriam. 2002. *Best Practice For Social Work with Refugees and Immigrants*. New York: Columbia University Press.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

**Jurnal**

- Amorim Celso. 2011. Brazil and the Middle East: Reflections on Lula's South-South Cooperation. *Cairo Review* 2. <http://www.aucegypt.edu/GAPP/CairoReview/Lists/Articles/Attachments/64/Brazil%20and%20the%20Middle%20East.pdf> [12 April 2015]
- Berti, Benedetta. 2015. The Syrian Refugee Crisis: Regional And Human Security Implications. *Strategic Assessment*. Vol. 17 No. 4. Hal. 45 [http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/adkan17\\_4ENG\\_7\\_Berti.pdf](http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/adkan17_4ENG_7_Berti.pdf) [25Juni 2015]

- Bhardwaj, Maya. 2012. Development of Conflict in Arab Spring Libya and Syria: From Revolution to Civil War. *Washington University International Review*. Vol. 1. [http://pages.wustl.edu/files/pages/imce/migration/wuir\\_spring\\_2012.pdf#page=76](http://pages.wustl.edu/files/pages/imce/migration/wuir_spring_2012.pdf#page=76) [24 Juni 2015]
- Brubaker, Rogers. 2005. The 'diaspora' diaspora. *Ethnic and Racial Studies* Vol. 28 No. 1. [http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/brubaker/Publications/29\\_Diaspora\\_diaspora\\_ERS.pdf](http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/brubaker/Publications/29_Diaspora_diaspora_ERS.pdf) [12 Oktober 2015]
- Cervo, Amado Luiz. 2012. Brazil In The Current World Order. *Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations*. Volume 1, Number 2. <http://seer.ufrgs.br/index.php/austral/article/viewFile/30514/20487> [5 Juni 2015]
- Datz, Giselle and Joel Peters. 2013. Brazil and the Israeli–Palestinian Conflict in the New Century: Between Ambition, Idealism, and Pragmatism. *Israel Journal of Foreign Affairs VII: 2*. <http://www.israelcfr.com/documents/7-2/7-2-5-GiselleDatz-and-JoelPeters.pdf> [9 April 2015]
- De Carvalho, Szabó dan Raphael M.C. Corrêa. 2007. Brazilian Perspectives on Human Security. *Policy: Issues And Actors*. Vol. 20 No. 8. Johannesburg: Centre for Policy Studies.
- De Jesus, Diego Santos Vieira. 2014. The Benign Multipolarity: Brazilian Foreign Policy Under Dilma Rousseff. *Journal of International Relations and Foreign Policy* Vol. 2, No. 1. [http://aripd.org/journals/jirfp/Vol\\_2\\_No\\_1\\_March\\_2014/2.pdf](http://aripd.org/journals/jirfp/Vol_2_No_1_March_2014/2.pdf) [15 April 2015]
- Francisco, Julio Bittencourt. 2015. Syrian And Lebanese Immigrants And The Expulsion Of Foreigners In The Beginning Of 20th Century. *International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)*. Volume 1, Issue 4. <http://ijhcschiefeditor.wix.com/ijhcs#!volume1-issue4/ck4r> [30 Maret 2014]
- Holliday, Joseph. 2011. The Struggle for Syria in 2011. *Middle East Security Report 2*. Washington DC: Institute for The Study of War
- Inoue, Cristina Yumie Aoki dan Alcides Costa Vaz. 2012. Brazil As 'Southern Donor': Beyond Hierarchy And National Interests In Development Cooperation?. *Cambridge Review of International Affairs*. Volume 25, Number 4. London: Routledge.
- Jubilut, Liliana Lyra dan Silvia Menicucci de Oliveira Selmi Apolinário. 2008. Refugee Status Determination in Brazil: A Tripartite Enterprise. *Refuge* .Volume 25, No. 2. <http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/refuge/article/viewFile/26029/24062> [10 Maret 2015]
- Nogueira, Maria Beatriz dan Carla Christina Marques. 2008. Brasil: Ten Years of Refugee Protection. *Forced Migration Review 30*. Oxford: Forced Migration Review
- Repko, Elliot M. 2007. The Israeli-Syrian Conflict: Prospects for a Resolution. *The Journal of International Policy Solutions* Volume 7. <http://irps.ucsd.edu/assets/012/6361.pdf> [24 Maret 2015]

UN Women. 2013. *Inter-Agency Assessment: Gender-Based Violence And Child Protection Among Syrian Refugees In Jordan, With A Focus On Early Marriage*. Amman: Peace and Security UN Women.

Vaz, Alcides Costa. 2004. *Brazilian Foreign Policy under Lula: Change or Continuity?*. *FES Briefing Paper April 2004*. Sao Paulo: Friedrich-Ebert-Stiftung.

### Internet

Abdenur, Adriana Erthal dan Danilo Marcondes de Souza Neto. 2013. *Brazil's Development Cooperation With Africa: What Role For Democracy And Human Rights?*. <http://www.surjournal.org/eng/conteudos/pdf/19/02.pdf> [15 Juni 2015]

Achill, Luigi. 2015. *Syrian Refugees in Jordan: A Reality Check*. [http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/34904/MPC\\_2015-02\\_PB.pdf?sequence=1](http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/34904/MPC_2015-02_PB.pdf?sequence=1) [31 Mei 2015]

ACNUR. 2014. *A Framework for Cooperation and Regional Solidarity to Strengthen the International Protection of Refugees, Displaced and Stateless Persons in Latin America and the Caribbean*. <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9864.pdf?view=1> [16 Maret 2015]

AFP. 2014. *Syria Death Toll Now Exceeds 200,000: Monitor*. <http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/12/02/Syria-death-toll-now-exceeds-200-000-monitor-.html> [24 Juni 2015]

AFP. 2015. *Latin American Nations Offer to Take in Syria Refugees*. <http://www.ticotimes.net/2015/09/08/brazil-welcomes-syrian-refugees-with-open-arms-president-says> [6 Oktober 2015]

Agence France-Presse. 2014. *Lebanon Sharply Limits Syrian Refugee Entry*. <http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/10/18/Lebanon-sharply-limits-Syrian-refugee-entry-.html> [16 Desember 2014]

Agencies. 2003. *Brazil's President in Syrian Talks*. <http://www.arabnews.com/node/241092> [30 April 2015]

\_\_\_\_\_. 2011. *Profile: Bashar al-Assad (Syrian President Has Ruled For More Than 10 Years)*. <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2007/07/200852518514154964.html> [1 Mei 2015]

Amorim, Celso. 2010. *Brazilian Foreign Policy Under President Lula (2003-2010): An Overview*. [http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292010000300013&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292010000300013&script=sci_arttext) [30 April 2015]

ANBA. 2006. *Brazilian Sugar Company Builds Refinery in Syria*. <http://www.brazzil.com/38-2006/july-2006/6875-brazilian-sugar-company-builds-refinery-in-syria> [9 Februari 2015]

\_\_\_\_\_. 2011. *Brazil Promotes Visit To Syria*. [http://www2.anba.com.br/noticia\\_diplomacia.kmf?cod=11525091&indice=70](http://www2.anba.com.br/noticia_diplomacia.kmf?cod=11525091&indice=70) [9 Februari 2015]

- Banco, Erin. 2014. *Three Years After Gadhafi's Death, Libya Slides Into Civil War As Death Toll Rises In Benghazi*. <http://www.ibtimes.com/three-years-after-gadhafis-death-libya-slides-civil-war-death-toll-rises-benghazi-1707824> [16 Februari 2015]
- Barajas, Joshua. 2015. *Syrians Now Largest Refugee Group In Brazil*. <http://www.pbs.org/newshour/rundown/syrians-now-largest-refugee-group-brazil/> [17 Maret 2015]
- Barbosa, Alexandre de Freitas. 2012. *The Real Brazil: The Inequality Behind The Statistic*. <http://www.christianaid.org.uk/images/real-brazil-full-report.pdf> [17 Maret 2015]
- Barnes, Taylor. 2009. *Why is Israel's Shimon Peres in Brazil and Argentina? Iran*. <http://www.csmonitor.com/World/Global-News/2009/1110/why-is-israels-shimon-peres-in-brazil-and-argentina-iran> [10 April 2015]
- Barreto, Luiz Paulo Teles Ferreira dan Renato Zerbini Ribeiro Leão. 2010. *Brazil And The Spirit Of Cartagena*. <http://www.fmreview.org/disability-and-displacement/luiz-paulo-teles-ferreira-barreto-and-renato-zerbini-ribeiro-leao> [4 Juni 2015]
- BBC News. 2003. *Lula Backs Syria on Disputed Land*. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3286463.stm> [12 April 2015]
- . 2013. *Viewpoints: Impact of Syrian Refugees on Host Countries*. <http://m.bbc.com/news/world-23813975> [2 Desember 2014]
2015. *Why Is EU Struggling With Migrants And Asylum?*. <http://www.bbc.com/news/world-europe-24583286> [5 Oktober 2015]
- Beinin, Joel dan Lisa Hajjar. 2014. *Primer on Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict*. [http://www.merip.org/sites/default/files/Primer\\_on\\_Palestine-Israel%28MERIP\\_February2014%29final.pdf](http://www.merip.org/sites/default/files/Primer_on_Palestine-Israel%28MERIP_February2014%29final.pdf) [4 April 2015]
- Berger, Stacey. 2012. *Violence in Syria Increases While Brasil Takes a Policy of Silence*. [http://www.opeak.net/index.php?option=com\\_k2&view=item&id=12006:violence-in-syria-increases-while-Brasil-takes-a-policy-of-silence](http://www.opeak.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=12006:violence-in-syria-increases-while-Brasil-takes-a-policy-of-silence) [2 Desember 2014]
- Borger, Julian. 2010. *Text of The Iran-Brazil-Turkey Deal*. <http://www.theguardian.com/world/julian-borger-global-security-blog/2010/may/17/iran-brazil-turkey-nuclear> [15 April 2015]
- Brubaker, Rogers. 2005. The 'diaspora' diaspora. *Ethnic and Racial Studies* Vol. 28 No. 1. [http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/brubaker/Publications/29\\_Diaspora\\_diaspora\\_ERS.pdf](http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/brubaker/Publications/29_Diaspora_diaspora_ERS.pdf) [12 Oktober 2015]
- Brown, Hayes. 2013. *Russia And China Provide Practically No Aid To Syrian Refugees*. <http://thinkprogress.org/security/2013/09/03/2562291/russia-china-syria-aid/> [12 Juli 2015]
- Care Research. Tanpa Tahun. *Issues for Refugees and Asylum Seeker*. <http://www.caresearch.com.au/caresearch/tabid/2385/Default.aspx> [2 Desember 2014]
- Christensen, Steen Fryba. 2014. *Brazil-China Bilateral Relations: Between Strategic Partnership And Competition From The Brazilian Perspective*.

<http://web.isanet.org/Web/Conferences/FLACSO-ISA%20BuenosAires%202014/Archive/9ca90f04-e22a-4809-8deb-fb51f1e70546.pdf>

CNN Library. 2014. *ISIS Fast Facts*. [www.cnn.com/2014/08/08/world/isis-fast-facts/](http://www.cnn.com/2014/08/08/world/isis-fast-facts/) [20 Nopember 2014]

Consulate General Of Brazil In Beirut. 2013. *Humanitarian Visa - Basic Information*. <http://www.cgbrasil.org/Templates/InsideTemplate.aspx?PostingId=465> [13 Maret 2015]

Damascus (Reuters). 2010. *Syria's Assad Seeks Investment in Latin America*. <http://www.alarabiya.net/articles/2010/06/25/112260.html> [1 Mei 2015]

DPA dan Haaretz Service. *Syria Slam Israel over Gaza Flotilla, Blockade*. <http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/brazil-syria-slam-israel-over-gaza-flotilla-blockade-1.299260> [15 April 2015]

Elizondo, Gabriel. 2012. *Brazil's Syrians Divided On Bashar Al-Assad*. <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/11/20121118103753804372.html> [25 Juni 2015]

Embassy of the People's Republic of China in the United States of America. Tanpa Tahun. *China Announces More Assistance To Haiti*. <http://www.china-embassy.org/eng/xw/t653186.htm> [8 Juni 2015]

Estarque, Marina dan Karina Gomes. 2014. *Asylum Seekers Continue Search For Support In Brazil*. <http://www.dw.de/asylum-seekers-continue-search-for-support-in-brazil/a-17369877> [2 Juni 2015]

Evaluation Team of Viva Rio. 2005. *Evaluation of Viva Rio Projects "Security and development: Actions at local and regional levels" funded by DFID & "Human Security Partnerships with the Third Sector: Learning from and Multiplying Local Experiences" funded by UNDP*. <http://erc.undp.org/evaluationadmin/downloaddocument.html?docid=3789> [18 Pebruari 2015]

Farah, Ana Gabriela Verotti. 2013. *Largest Trading Partners of Brazil*. <http://thebrazilbusiness.com/article/largest-trading-partners-of-brazil> [11 Juni 2015]

Fauszt, Timea. 2015. *Syria Crisis: Health Threats For Refugees Living On The Fringe*. <http://www.rescue.org/blog/syria-crisis-health-threats-refugees-living-fringe> [25 Juni 2015]

Fersan, Eliane. 2010. *Syro-Lebanese Migration (1880-Present): "Push" and "Pull" Factors*. <http://www.mei.edu/content/syro-lebanese-migration-1880-present-%E2%80%9Cpush%E2%80%9D-and-%E2%80%9Cpull%E2%80%9D-factors> [4 Pebruari 2015]

Fox News Latino. 2013. *Syrian Refugees Flock To Latin America As World Ponders Taking Action Against Assad*. <http://latino.foxnews.com/latino/news/2013/09/06/syrian-refugees-flock-to-latin-america-as-worlds-ponders-taking-action-against/> [26 Pebruari 2015]

\_\_\_\_\_. 2014. *Syria's Refugees Find A New Home In Uruguay And Throughout Latin America*. <http://latino.foxnews.com/latino/news/2014/10/01/syria-refugees-find-new-home-in-uruguay-and-throughout-latin-america/> [20 Oktober 2014]

- Froio, Nicole. 2013. *Brazil's Government Has Set The Favelas And Middle Classes Against Each Other.* <http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/08/brazil-government-set-favelas-against-middle-classes> [3 Pebruari 2015]
- Fusaro, Karin dan Luiz Fernando Godinho. 2013. *Hands Across The Water: Brazil's Large Syrian Community Absorbs Refugees.* <http://reliefweb.int/report/brazil/hands-across-water-brazils-large-syrian-community-absorbs-refugees> [6 Pebruari 2015]
- Haibin, Niu. 2010. *Emerging Global Partnership: Brazil And China.* [http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292010000300011&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292010000300011&script=sci_arttext) [6 Juni 2015]
- Hamann, Eduarda Passarelli. 2012. *Brazil and R2P: A Rising Global Player Struggles to Harmonise Discourse and Practice.* [http://igarape.org.br/wp-content/themes/igarape\\_v2/pdf/A-Rising-Global-Player-Struggles-to-Harmonise-Principles-and-Practice-Nov-2012.pdf](http://igarape.org.br/wp-content/themes/igarape_v2/pdf/A-Rising-Global-Player-Struggles-to-Harmonise-Principles-and-Practice-Nov-2012.pdf) [21 Pebruari 2015]
- Hasson, Amal. 2010. *Syria, Brazil Launch Business Council to Encourage Economic, Trade Cooperation.* <http://www.english.globalarabnetwork.com/201011308249/Economics/syria-brazil-launch-business-council-to-encourage-economic-trade-cooperation.html> [12 April 2015]
- Human Rights Watch. 2014. *Lebanon: Rising Violence Targets Syrian Refugees.* <http://www.hrw.org/news/2014/09/30/lebanon-rising-violence-targets-syrian-refugees> Ilona [25 Juni 2015]
- IANS. 2013. *India Donates \$2,5 mn for Syrian Refugees.* [http://zeenews.india.com/news/world/india-donates-25-mn-for-syrian-refugees\\_825945.html](http://zeenews.india.com/news/world/india-donates-25-mn-for-syrian-refugees_825945.html) [19 Juli 2015]
- Jones, Sam. 2014. *Brazil Focuses On Nurseries, Schools And Jobs To Fight Poverty.* <http://www.theguardian.com/global-development/2014/nov/24/brazil-nurseries-schools-jobs-training-poverty> [3 Pebruari 2015]
- Karim, Maha. 2010. *Syria and Brazil - Mutual History Paves Way to the Future.* <http://www.english.globalarabnetwork.com/201006226309/Economics/syria-and-brazil-mutual-history-paves-way-to-the-future.html> [4 Pebruari 2015]
- Kašpar, Petr. 2011. *The Logic of UNASUR: Its Origins and Institutionalization.* [http://projekter.aau.dk/projekter/files/53154638/The LOGIC OF UNASUR.pdf](http://projekter.aau.dk/projekter/files/53154638/The_LOGIC_OF_UNASUR.pdf) [6 April 2015]
- Kawakibi, Salam. 2010. *The Migration of Syrian Christians.* <http://www.mei.edu/content/migration-syrian-christians> [8 Pebruari 2015]
- Letelier, Leonardo. 2012. *Journey into Brazil's Social Sector.* [http://www.ssireview.org/articles/entry/journey\\_into\\_brazils\\_social\\_sector](http://www.ssireview.org/articles/entry/journey_into_brazils_social_sector) [16 Pebruari 2015]
- Leunsmann, Valerie. 2014. *The Impact of the ICISS Report on State Sovereignty.* <http://www.e-ir.info/2014/01/18/the-impact-of-the-iciss-report-on-state-sovereignty/> [15 Desember 2014]
- Madanat, Haya. 2012. *1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol.* <http://blog.hopesforwomen.org/2012/11/15/1951-refugee-convention-and-the-1967-protocol-by-haya-madanat/> [12 Maret 2015]

- Martel, Frances. 2014. Syrian Refugees Increasingly Starting New Lives in Latin America. <http://www.breitbart.com/national-security/2014/09/18/syrian-refugees-increasingly-starting-new-lives-in-latin-america/> [9 Agustus 2015]
- Merco Press. 2010. *Brazil Recognized The State Of Palestine Based On Borders Before 1967*. <http://en.mercopress.com/2010/12/04/brazil-recognized-the-state-of-palestine-based-on-borders-before-1967> [10 April 2015]
- Milani, Carlos. 2014. *Brazil's South-South Co-operation Strategies: From Foreign Policy to Public Policy*. <http://www.saiia.org.za/occasional-papers/brazils-south%E2%80%93south-co-operation-strategies-from-foreign-policy-to-public-policy> [14 Juni 2015]
- Moqawama.org. 2011. *Syria: Million Man Rally Support Reforms, Friends Reject Foreign Intervention, More Terrorists Arrested*. <http://www.english.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=15554&cid=540#.VS3YBixyH60> [15 April 2015]
- Musacchio, Aldo. 2008. *Brazil under Lula: Off the Yellow BRIC Road*. [https://is.muni.cz/el/1423/podzim2010/MVZ454/um/Brazil under Lula.pdf](https://is.muni.cz/el/1423/podzim2010/MVZ454/um/Brazil%20under%20Lula.pdf) [5 April 2015]
- Newland, Kathleen dan Sonia Plaza. 2013. *What We Know About Diasporas and Economic Developmet*. <http://www.migrationpolicy.org/research/what-we-know-about-diasporas-and-economic-development> [12 Oktober 2015]
- Newsroom. 2014. *Appeal for Syrian Aid*. <http://www.vocfm.co.za/appeal-for-syrian-aid/> [19 Juli 2015]
- Ningthoujam, Alvite Singh. 2014. *FIFA World Cup 2014: A Gateway to Israel-Brazil Defence Ties*. <http://issp.in/tag/israel-brazil-military-cooperation/> [10 April 2015]
- O'Connell, Alison. 2013. *Brazilian Society: The Year Ahead*. <http://www.pulsamerica.co.uk/2013/01/06/what-does-2013-hold-in-store-for-poverty-and-social-inequality-in-brazil/> [3 Pebruari 2015]
- Pedram, Shiva. 2014. *Syrian Refugee Crisis Threatens Stability in the Middle East*. <https://www.americanprogress.org/issues/security/news/2014/08/12/95595/syrian-refugee-crisis-threatens-stability-in-the-middle-east/> [8 Pebruari 2015]
- Phillips, Christopher. 2012. *Syria's Bloody Arab Spring*. [http://www.lse.ac.uk/ideas/publications/reports/pdf/sr011/final\\_lse\\_ideas\\_syriasbloodyarabspring\\_phillips.pdf](http://www.lse.ac.uk/ideas/publications/reports/pdf/sr011/final_lse_ideas_syriasbloodyarabspring_phillips.pdf) [20 Oktober 2014]
- Pitts Jr, Montie Bryan. 2006. *Forging Ethnic Identity Through Faith: Religion and The Syrian-Lebanese Community in Sao Paulo*. <http://etd.library.vanderbilt.edu/available/etd-07262006-113823/unrestricted/thesis.pdf> [19 Maret 2015]
- Putin, Vladimir V.. 2013. *A Plea for Caution From Russia*. <http://www.aianjack.org/wp-content/uploads/2013/08/What-Putin-Has-to-Say-to-Americans-About-Syria-NYTimes.com.pdf> [8 Juni 2015]
- Rahme, Thalia. 2014. *A Syrian in Brazil: An Interview With Global Voices Contributor Rami Alhames*. <http://globalvoicesonline.org/2014/08/17/a-syrian-in-brazil-an-interview-with-global-voices-contributor-rami-alhames/> [6 Pebruari 2015]

- Ramirez, Angela. 2010. *Implications of Syrian President Bashar Al-Assad's Latin American Tour*. <http://csis.org/blog/implications-syrian-president-bashar-al-assad%E2%80%99s-latin-american-tour> [1 Mei 2015]
- Rebaza, Claudia. 2014. *'They Deserve Our Help': Uruguay Welcomes Syrian Refugees*. <http://edition.cnn.com/2014/10/20/world/americas/uruguay-welcomes-syrian-refugees/> [9 Agustus 5]
- Reuters. 2010. *Syria Wants Brazil To Help Negotiate Mideast Peace*. <http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/syria-wants-brazil-to-help-negotiate-mideast-peace-1.298642> [29 Maret 2015]
- Rodger Shanahan. 2011. *R2P: Seeking Perfection in an Imperfect World*. <http://www.e-ir.info/2011/10/07/r2p-seeking-perfection-in-an-imperfect-world/> [24 Nopember 2014]
- Rosseel, Peter, dkk. Tanpa Tahun. *Approaches to North-South, South-South and North-South-South Collaboration: A Policy Document*. [https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/229636/1/POLICY\\_PAPER\\_VLIR\\_UWC\\_NSS.pdf](https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/229636/1/POLICY_PAPER_VLIR_UWC_NSS.pdf) [14 Juni 2015]
- Russell, Sharon Stanton. 2002. *Refugees: Risks and Challenges Worldwide*. <http://www.migrationpolicy.org/article/refugees-risks-and-challenges-worldwide> [16 Desember 2014]
- Sánchez-Alonso, Blanca. 2010. *Making Sense Of Immigration Policy: Argentina, 1870-1930*. [http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/9737/wp\\_10\\_14.pdf;jsessionid=2DDB0C4228A3B1A57501EAED5EC244E9?sequence=1](http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/9737/wp_10_14.pdf;jsessionid=2DDB0C4228A3B1A57501EAED5EC244E9?sequence=1) [24 Maret 2015]
- Savabi, Heidi. 2014. *The Legal Framework and Institutional Assistance for Refugees in Brasil since the Mid-Twentieth Century: The Impact on Refugee Integration and Assistance*. <http://www.trendsandperspectives.info/pdf/updatedPDF20140724/Heidi%20Savabi%20Spring%202014.pdf> [3 Juni 2015]
- Security Council. 2011. *Security Council Fails to Adopt Draft Resolution Condemning Syria's Crackdown on Anti-Government Protestors, Owing to Veto by Russian Federation, China*. <http://www.un.org/press/en/2011/sc10403.doc.htm> [2 Desember 2014]
- Sherwood, Harriet. 2014. *Global Refugee Figure Passes 50m for First Time Since Second World War*. [www.theguardian.com/world/2014/jun/20/global-refugee-figure-passes-50-million-unhcr-report](http://www.theguardian.com/world/2014/jun/20/global-refugee-figure-passes-50-million-unhcr-report) [3 Desember 2014]
- Silva, Cesar Augusto Silva Da. 2013. *Brazil: Human Rights And Environmental Refugees*. [http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-81562013000100008&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-81562013000100008&script=sci_arttext) [3 Juni 2015]
- Singh, Suresh P. 2011. *BRICS and The World Order: A Beginner's Guide*. [http://www.elcorreo.eu.org/IMG/pdf/Building\\_Better\\_Global\\_Economic\\_Brics.pdf](http://www.elcorreo.eu.org/IMG/pdf/Building_Better_Global_Economic_Brics.pdf) [1 Juni 2015]
- Situs resmi CCAB. Tanpa Tahun. *Certification Of Documents: Safety And Security For Arab Importers And Brazilian Exporters*. <http://www.ccab.org.br/arabe-brasil/en/home/services/certification.fss> [17 April 2015]
- \_\_\_\_\_. Tanpa Tahun. *Who We Are / About The Chamber: Bringing Cultures Together Building Opportunities*. <http://www.ccab.org.br/arabe-brasil/en/about-us.fss> [17 April 2015]

- Situs resmi FAO. 2013. *FAO's South-South Cooperation To Benefit From Brazilian Expertise*. <http://www.fao.org/news/story/en/item/170670/icode/> [30 April 2015]
- . 2014. *FAO Receives Brazilian Contribution To Support Family Farming*. <http://www.fao.org/partnerships/news-article/en/c/254039/> [15 Pebruari 2015]
- Situs resmi Kementerian Luar Negeri Brasil. Tanpa Tahun. *India – Brazil – South Africa (IBSA) Dialogue Forum*. [http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com\\_content&view=article&id=7495:india-brazil-south-africa-ibsa-dialogue-forum&catid=144&lang=en-GB&Itemid=434](http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7495:india-brazil-south-africa-ibsa-dialogue-forum&catid=144&lang=en-GB&Itemid=434) [30 April 2015]
- Situs resmi PBB. Tanpa Tahun. *Millenium Development Goals*. <http://www.un.org/millenniumgoals/> [30 April 2015]
- Situs resmi UAC. Tanpa Tahun. *General Union of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture for Arab Countries (A Profile)*. [http://www.uac.org.lb/includes/FCKeditor/upload/File/about\\_us\\_en.pdf](http://www.uac.org.lb/includes/FCKeditor/upload/File/about_us_en.pdf) [17 April 2015]
- Situs resmi UNHCR. <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php> [26 Pebruari 2015]
- Situs resmi Viva Rio. Tanpa Tahun. <http://vivario.org.br/en/partners/> [18 Pebruari 2015]
- Small, Gretchen. 2003. *Brazil's Global Diplomacy Builds Bridges, But to What?*. [http://www.larouchepub.com/eiw/public/2003/eirv30n50-20031226/eirv30n50-20031226\\_044-brazils\\_global\\_diplomacy\\_builds.pdf](http://www.larouchepub.com/eiw/public/2003/eirv30n50-20031226/eirv30n50-20031226_044-brazils_global_diplomacy_builds.pdf) [30 April 2015]
- SNS.SY. 2010. *Assad Meets Brazilian Senate, House Speakers and Syrian Community*. <http://sns.sy/sns/?path=news/read/16439> [15 April 2015]
- Soares, Fábio Veras, dkk. 2010. *Evaluating The Impact Of Brazil's Bolsa Família: Cash Transfer Programs In Comparative Perspective*. [http://lasa-2.univ.pitt.edu/LARR/prot/fulltext/vol45no2/Soar-Riba-Osor\\_173-190\\_45-2.pdf](http://lasa-2.univ.pitt.edu/LARR/prot/fulltext/vol45no2/Soar-Riba-Osor_173-190_45-2.pdf) [3 Pebruari 2015]
- Standing Committee. 1997. *Social and Economic Impact of Large Refugee Populations on Host Developing Countries*. <http://www.unhcr.org/3ae68d0e10.html> [2 Desember 2014]
- Stephen, Chris. 2014. *War In Libya - The Guardian Briefing*. <http://www.theguardian.com/world/2014/aug/29/-sp-briefing-war-in-libya> [18 Pebruari 2015]
- Swaine, Michael D.. 2012. *Chinese Views of the Syrian Conflict*. [http://carnegieendowment.org/files/swaine\\_clm\\_39\\_091312\\_2.pdf](http://carnegieendowment.org/files/swaine_clm_39_091312_2.pdf) [8 Juni 2015]
- The Associated Press. 2014. *China offers \$16 million in aid for Syria refugees, \$10m to Palestinians*. <http://www.haaretz.com/news/middle-east/1.597129> [7 Juli 2015]
- The Guardian. 2008. *Timeline: Israel, Syria and the Golan Heights*. <http://www.theguardian.com/world/2008/may/21/golan.background> [12 April 2015]

- Thielemann, Eiko R. 2006. *Burden Sharing: The International Politics of Refugee Protection*. [http://ccis.ucsd.edu/wp-content/uploads/WP\\_134.pdf](http://ccis.ucsd.edu/wp-content/uploads/WP_134.pdf) [9 Juni 2015].
- Tim Redaksi. 2014. *Brasil Grants Refugee Status to 532 Syrian*. [www.worldbulletin.net/haber/141652/Brasil-grants-refugee-status-to-532-syrians](http://www.worldbulletin.net/haber/141652/Brasil-grants-refugee-status-to-532-syrians) [20 Nopember 2014]
- Trinkunas, Harold. 2015. *Brazil's Global Ambitions*. <http://www.brookings.edu/research/articles/2015/02/04-brazil-global-ambitions-trinkunas> [15 Pebruari 2015]
- Tsai, Yu-tai. 2009. *The Emergence Of Human Security: A Constructivist View*. [https://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol14\\_2/TSAI%20-%202014n2%20IJPS.pdf](https://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol14_2/TSAI%20-%202014n2%20IJPS.pdf) [15 Desember 2014]
- UN News Centre. 2013. *Syrian Refugees Straining Health Services In Region, UN Warns In New Report*. <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44761#.VYtdJaPDVcC> [25 Juni 2015]
- \_\_\_\_\_. 2013. *UN Welcomes Brazil's Offer Of Humanitarian Visas For Syrians Fleeing Conflict*. <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46079#.VW6mVixyH60> [3 Juni 2015]
- UNHCR Brasil. Tanpa Tahun. *Asylum in Brazil: A Statistical Review (2010-2012)*. [http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Asylum\\_in\\_Brazil\\_-\\_A\\_statistical\\_review\\_2010-2012.pdf?view=1](http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Asylum_in_Brazil_-_A_statistical_review_2010-2012.pdf?view=1) [2 Juni 2015]
- UNHCR (The Government of Brazil. 2011. *Country Chapters-UNHCR Resettlement Handbook*. <http://www.refugeelawinformation.org/sites/srlan/files/fileuploads/Brazil-Resettlement.pdf> [13 Juni 2015]
- UNHCR Global Appeal. 2007. *Latin America (Mexico Plan of Action)*. <http://www.unhcr.org/455443b30.pdf> [8 Juni 2015]
- UNHCR. 2007. *Convention And Protocol Relating To The Status Of Refugees*. [https://www.unhcr.org/hk/files/useful\\_resources/Important\\_documents/Convention\\_Protocol.pdf](https://www.unhcr.org/hk/files/useful_resources/Important_documents/Convention_Protocol.pdf) [2 Juni 2015]
- \_\_\_\_\_. 2008. *States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol*. [https://www.unhcr.org/hk/files/useful\\_resources/Important\\_documents/StatesParties\\_to\\_1951\\_Convention\\_as\\_of\\_Oct08.pdf](https://www.unhcr.org/hk/files/useful_resources/Important_documents/StatesParties_to_1951_Convention_as_of_Oct08.pdf) [20 Mei 2015]
- \_\_\_\_\_. 2011. *Convention and Protocol Relating to The Status of Refugees*. <http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html> [20 Nopember 2014]
- \_\_\_\_\_. 2012. *Direitos E Deveres De Solicitantes De Refúgio E Refugiados*. [http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2012/Direitos\\_e\\_Deveres\\_dos\\_Solicitantes\\_de\\_Refugio\\_e\\_Refugiados\\_no\\_Brasil\\_-\\_2012](http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2012/Direitos_e_Deveres_dos_Solicitantes_de_Refugio_e_Refugiados_no_Brasil_-_2012) [24 Pebruari 2015]
- \_\_\_\_\_. 2013. *Countries Hosting Syrian Refugees: Solidarity And Burden-Sharing*. <http://www.unhcr.org/525fe3e59.html> [27 Mei 2015]

- . 2013. *Country Chapters-UNHCR Resettlement Handbook*. <http://www.refworld.org/pdfid/52a077620.pdf> [4 Juni 2015]
- . 2013. *UN Refugee Agency Welcomes Brazil Announcement Of Humanitarian Visas For Syrians*. <http://www.unhcr.org/524555689.html> [27 Pebruari 2015]
- . 2015. *Syria Regional Refugee Response*. <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php> [24 Juni 2015]
- . 2015. *UNHCR Global Appeal 2015 Update: Jordan*. <http://www.unhcr.org/5461e6070.html> [31 Mei 2015]
- United Nations. 2014. *Rule of Terror: Living Under ISIS in Syria*. [http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/HRC\\_CRP\\_ISIS\\_14Nov2014.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/HRC_CRP_ISIS_14Nov2014.pdf) [16 November 2014]
- United States Department of State (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor). 2012. *International Religious Freedom Report*. [http://www.justice.gov/eoir/vll/country/DOS\\_IRF/2012/Brazil.pdf](http://www.justice.gov/eoir/vll/country/DOS_IRF/2012/Brazil.pdf) [14 Maret 2015]
- Vadi, Azhar. 2015. *South African Funded Hospital Attacked in Syria*. <http://www.ciibroadcasting.com/2015/05/05/south-african-funded-hospital-attacked-in-syria/> [19 Juli 2015]
- Van Lindert, Thijs dan Lars van Troost. 2014. *Shifting Power and Human Rights Diplomacy: Brazil*. [https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/rising\\_power\\_brazil.pdf](https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/rising_power_brazil.pdf) [15 Juni 2015]
- Watts, Jonathan. 2015. *A Long Way From Home: Syrians Find Unlikely Refuge In Brazil*. <http://www.theguardian.com/world/2015/mar/11/syrians-refuge-brazil-latin-america-war-refugees> [16 Maret 2015]
- WFP. 2015. *Syrian refugees and food insecurity in Iraq, Jordan and Turkey: Secondary Literature and Data Desk Review*. Hal. 34 [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=OCC8QFjAB&url=https%3A%2F%2Fdata.unhcr.org%2Fsyrianrefugees%2Fdownload.php%3Fid%3D2762&ei=wGCLVdiUKiDjuQTopo\\_YDw&usg=AFOjCNETJc4Llc8PTSoAqsOe8szXULjzvQ&bvm=bv.96782255,bs.l,d.c2E&cad=rja](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=OCC8QFjAB&url=https%3A%2F%2Fdata.unhcr.org%2Fsyrianrefugees%2Fdownload.php%3Fid%3D2762&ei=wGCLVdiUKiDjuQTopo_YDw&usg=AFOjCNETJc4Llc8PTSoAqsOe8szXULjzvQ&bvm=bv.96782255,bs.l,d.c2E&cad=rja) [25 Juni 2015]
- Xia, Lucie Qian. 2014. *The Syrian Crisis and the Responsibility to Protect: A Chinese Perspective*. [http://www.eu-asiacentre.eu/documents/uploads/pub\\_118\\_lucie\\_qian\\_xia\\_-\\_the\\_syrian\\_crisis\\_and\\_the\\_responsibility\\_to\\_protect\\_-\\_a\\_chinese\\_perspective.pdf](http://www.eu-asiacentre.eu/documents/uploads/pub_118_lucie_qian_xia_-_the_syrian_crisis_and_the_responsibility_to_protect_-_a_chinese_perspective.pdf) [8 Juni 2014]
- Zee News. 2010. *Syria'S President Begins Latin America Tour*. [http://zeenews.india.com/news/world/syrias-president-begins-latin-america-tour\\_636484.html](http://zeenews.india.com/news/world/syrias-president-begins-latin-america-tour_636484.html) [9 Pebruari 2015]